



Green Politic: Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan

AHMAD SHOLIKIN
YENDRA ERISON
SITI SHOIMAH
MIDKHOLUS SURUR
NURUL LAILI
ALIF FIRDAUS ZAMZAM

Editor Ahmad Sholikin

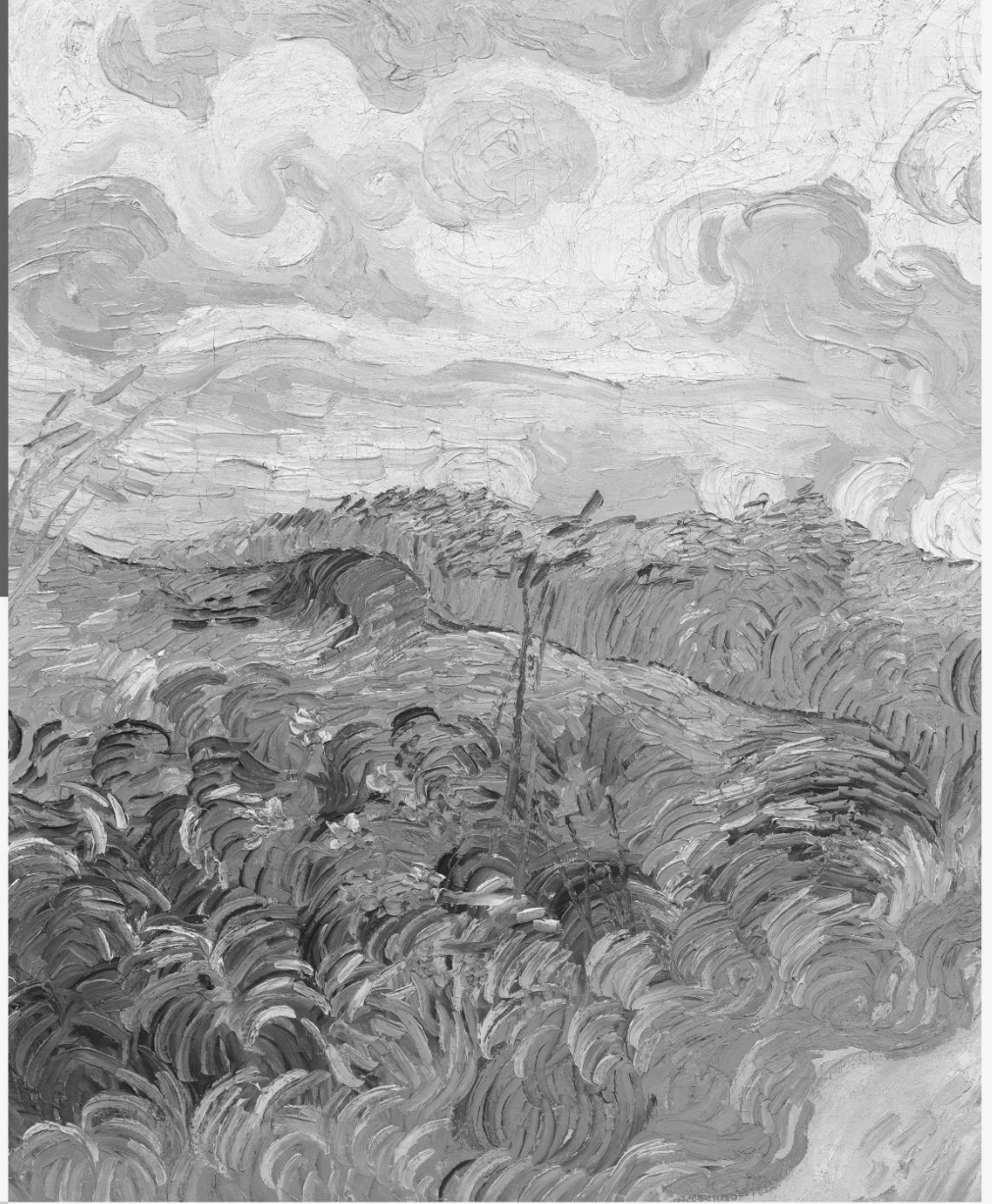


الجامعة الإسلامية دار العلوم

Universitas Islam Darul 'Ulum

UNISDA

University With Global Vision



Green Politic: Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan

AHMAD SHOLIKIN
YENDRA ERISON
SITI SHOIMAH
MIDKHOLUS SURUR
NURUL LAILI
ALIF FIRDAUS ZAMZAM

Editor Ahmad Sholikin

Green Politic: Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan

Ahmad Sholikin, Yendra Erison, Siti Shoimah, Midkholus Surur,
Nurul Laili, Alif Firdaus Zamzam

Editor:

Ahmad Sholikin



Green Politic: Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan

Penulis :

Ahmad Sholikin, Yendra Erison, Siti Shoimah, Midkholus Surur, Nurul Laili, Alif Firdaus Zamzam

ISBN :

978-623-89410-3-2

Editor:

Ahmad Sholikin

Penyunting:

Yendra Erison

Ukuran:

169 hlm, 18 x 25 cm

Desain Sampul dan Tata Letak :

Nurul Laili

Penerbit:

UNISDA PRESS

Redaksi

Jl. Airlangga 03 Sukodadi Lamongan

Telp.(0322) 390497

Faks.0322-390929

Email: unisdapress@unisda.ac.id

Website: <https://unisdapress.unisda.ac.id/>

Cetakan Pertama, Oktober, 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku dengan judul *Green Politic: Menuju Masa Depan Berkelanjutan* dapat hadir di hadapan para pembaca. Buku ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan bumi dan kehidupan generasi yang akan datang, yang kini sedang dihadapkan pada berbagai tantangan lingkungan.

Fenomena perubahan iklim, polusi, kerusakan hutan, hingga krisis energi, menuntut adanya kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari semua pihak. Dalam konteks ini, konsep *green politic* atau politik hijau menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Politik hijau bukan hanya tentang kebijakan lingkungan, melainkan juga tentang bagaimana kita membangun sistem politik dan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan seimbang.

Buku ini berupaya mengupas pemikiran-pemikiran terkait politik hijau, serta memberikan perspektif tentang bagaimana kebijakan berkelanjutan dapat diintegrasikan dalam berbagai sektor kehidupan. Kami berharap, buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pembaca, khususnya para pembuat kebijakan, akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat umum, untuk lebih memahami pentingnya langkah-langkah strategis menuju masa depan yang berkelanjutan.

Tak lupa, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan hingga penerbitan buku ini. Semoga apa yang disampaikan dalam buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya dunia yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan.

[Tim Penulis]

DAFTAR ISI

BAB I Sejarah Perkembangan Politik Hijau	
Ahmad Sholikin	1
BAB II Prinsip-Prinsip Dasar Politik Hijau	
Ahmad Sholikin	15
BAB III Isu-Isu Utama dalam Politik Hijau	
Yendra Erison.....	42
BAB IV Gerakan Hijau di Seluruh Dunia	
Ahmad Sholikin	60
BAB V Kebijakan Publik Hijau	
Midkholus Surur	84
BAB VI Tata Kelola Green Corporate Governance dan Implementasinya di Indoensia	
Siti Shoimah	116
BAB VII Peran Generasi Muda dalam Politik Hijau	
Nurul Laili	128
BAB VIII Tantangan dan Masa Depan Politik Hijau	
Alif Firdaus Zamzam	142
BAB IX Penutup	
Ahmad Sholikin	160

BAB I

Sejarah Perkembangan Politik Hijau

Ahmad Sholikin

1. Pengantar memahami perkembangan Green Politics

Perkembangan Green Politics atau politik hijau semakin relevan dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu-isu lingkungan. Green Politics berfokus pada perlindungan lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, serta keadilan sosial yang berkelanjutan. Konsep ini mencakup berbagai isu mulai dari perubahan iklim, konservasi, hingga transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan (Barry & Eckersley, 2005). Dalam konteks ini, peran aktor-aktor politik, baik di level lokal, nasional, maupun internasional, menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Perdebatan mengenai masa depan planet kita semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir. Dunia menghadapi krisis lingkungan yang semakin mendesak, mulai dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi udara dan air, hingga deforestasi yang masif. Masalah-masalah ini bukan hanya berdampak pada ekosistem alam, tetapi juga mengancam kehidupan manusia secara keseluruhan. Dalam konteks inilah, politik hijau atau *green politics* muncul sebagai sebuah ideologi dan gerakan politik yang menawarkan pendekatan baru untuk menghadapi krisis global ini.

Sejarah perkembangan Green Politics berakar dari gerakan sosial lingkungan pada tahun 1960-an dan 1970-an di negara-negara Barat (Dobson, 2007). Gerakan ini menyoroti dampak destruktif dari industrialisasi yang tidak terkendali, yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan degradasi lingkungan. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi partai-partai politik hijau yang mendorong agenda lingkungan masuk dalam platform politik utama. Di Eropa, partai hijau telah berhasil masuk ke dalam parlemen dan menjadi bagian dari koalisi pemerintah di beberapa negara, seperti Jerman dan Belanda (O'Neill, 2017). Melihat tren global ini, Green Politics tidak hanya menawarkan solusi untuk tantangan lingkungan, tetapi juga menantang paradigma tradisional dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, politik hijau bukan lagi sekedar isu sampingan, tetapi menjadi inti dari perdebatan tentang masa depan yang berkelanjutan bagi umat manusia. Green Politics: Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan merupakan sebuah upaya untuk memahami dan mengartikulasikan

pentingnya politik hijau dalam pembangunan dunia yang lebih berkelanjutan dan adil secara sosial. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar politik hijau, membahas latar belakang historisnya, serta menyoroti urgensi ideologi ini di era modern. Dengan semakin meningkatnya kesadaran global mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekologis, politik hijau menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk merespons tantangan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini.

Secara mendasar, politik hijau berfokus pada perlindungan lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Namun, ideologi ini juga mencakup aspek keadilan sosial, demokrasi partisipatif, dan non-kekerasan. Intinya, politik hijau berupaya menggabungkan isu-isu lingkungan dengan keadilan sosial, mengakui bahwa kerusakan alam tidak bisa dipisahkan dari ketidakadilan sosial. Bagi pendukung politik hijau, kelestarian alam dan kesejahteraan manusia harus berjalan beriringan, dan kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan dampak ekologis serta sosialnya. Lahirnya gerakan politik hijau tak lepas dari sejarah panjang perjuangan lingkungan hidup yang dimulai pada awal abad ke-20. Pada saat itu, industrialisasi dan urbanisasi yang cepat mulai memperlihatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Polusi udara dan air meningkat, hutan-hutan mulai menghilang, dan habitat hewan serta tumbuhan terancam punah. Namun, baru pada paruh kedua abad ke-20, gerakan lingkungan mulai mendapatkan momentum politik yang lebih besar. Tahun 1970-an dan 1980-an menjadi periode penting bagi perkembangan politik hijau, terutama dengan lahirnya partai-partai hijau di Eropa, yang menjadi pionir dalam memasukkan isu lingkungan ke dalam agenda politik nasional dan internasional.

Gerakan politik hijau bukan hanya reaksi terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga sebuah kritik terhadap model pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Banyak negara di dunia masih menganut paradigma pertumbuhan ekonomi tanpa batas, yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Politik hijau mengusulkan perubahan mendasar dalam cara kita memandang pembangunan dan kemajuan, dengan menekankan bahwa kesejahteraan manusia tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kesehatan ekosistem dan keadilan sosial. Di era globalisasi dan perubahan iklim saat ini, politik hijau semakin mendesak untuk diimplementasikan dalam kebijakan publik. Perubahan iklim yang disebabkan oleh

aktivitas manusia telah menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan yang lebih sering dan lebih parah. Tantangan ini memaksa kita untuk berpikir ulang tentang cara kita menjalankan ekonomi, politik, dan kehidupan sehari-hari. Politik hijau menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan, dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, serta pelestarian sumber daya alam. Dalam studi terbaru, ada pergeseran fokus dari sekedar konservasi alam menuju upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang dikenal sebagai Green Economy (Jackson, 2011). Ini mencakup inovasi dalam teknologi ramah lingkungan, ekonomi sirkular, dan kebijakan yang bertujuan mengurangi jejak karbon serta menjaga keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, aktor non-pemerintah seperti organisasi non-profit dan perusahaan multinasional juga memainkan peran penting dalam mengintegrasikan kebijakan lingkungan dalam bisnis mereka (Dryzek et al., 2020).

2. Definisi Politik Hijau

Politik hijau, atau yang dikenal dengan istilah Green Politics, merupakan suatu pendekatan politik yang menekankan pada pentingnya keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan demokrasi partisipatif. Definisi ini mencakup upaya untuk merumuskan kebijakan dan tindakan politik yang berfokus pada perlindungan ekosistem, pengurangan dampak perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan (Carter, 2018). Pada intinya, politik hijau menolak eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali dan mengadvokasi transisi menuju sistem ekonomi dan sosial yang lebih ramah lingkungan (Barry, 2012). Politik hijau atau green politics adalah sebuah ideologi politik yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai inti dari kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Ideologi ini lahir dari kesadaran bahwa kehidupan manusia bergantung sepenuhnya pada kesehatan ekosistem yang menopangnya. Dengan demikian, politik hijau mengusung prinsip keberlanjutan (sustainability)—yakni, memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain keberlanjutan, politik hijau juga mencakup nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi partisipatif, dan non-kekerasan.

Menurut Dobson (2007), politik hijau tidak hanya tentang isu lingkungan, tetapi juga berhubungan dengan nilai-nilai seperti desentralisasi kekuasaan, partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, serta distribusi yang adil atas sumber daya. Politik

hijau mendorong reformasi struktural untuk memastikan bahwa kebijakan publik sejalan dengan prinsip-prinsip ekologi dan keadilan. Hal ini sering kali diwujudkan melalui advokasi untuk penggunaan energi terbarukan, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan implementasi kebijakan yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan (Eckersley, 2004). Sebagai sebuah ideologi, politik hijau berusaha mengatasi krisis lingkungan yang semakin parah akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan. Ideologi ini berbeda dari aliran-aliran politik tradisional yang lebih berfokus pada ekonomi atau kekuasaan. Politik hijau menekankan hubungan yang erat antara manusia dan alam, serta mengadvokasi kebijakan yang menjaga keseimbangan antara keduanya. Dalam konteks ini, politik hijau memandang bahwa kelangsungan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari kelangsungan alam.

Politik hijau muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan global yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Berbeda dengan ideologi politik lainnya seperti kapitalisme, sosialisme, atau liberalisme, politik hijau mengutamakan lingkungan sebagai komponen kunci dalam pengambilan keputusan politik. Pendekatan ini memandang bahwa solusi terhadap masalah sosial, ekonomi, dan politik harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan dari politik hijau sering kali mencakup aspek-aspek yang mendukung kelestarian alam, seperti pengurangan emisi karbon, transisi menuju energi terbarukan, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Salah satu ciri khas politik hijau adalah penolakannya terhadap paradigma pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas. Dalam sistem ekonomi konvensional, pertumbuhan ekonomi sering kali dianggap sebagai indikator keberhasilan suatu negara. Namun, politik hijau mengkritik pandangan ini karena banyak model pertumbuhan ekonomi saat ini mengorbankan lingkungan dan sumber daya alam yang terbatas. Politik hijau memperkenalkan konsep ekonomi sirkular, yang berfokus pada pengurangan limbah, penggunaan ulang sumber daya, dan pemulihan ekosistem, sebagai alternatif terhadap ekonomi linear yang eksploitatif.

Lebih dari sekadar mempromosikan pelestarian lingkungan, politik hijau juga menekankan pentingnya keadilan sosial. Ideologi ini mengakui bahwa dampak dari kerusakan lingkungan sering kali lebih berat dirasakan oleh kelompok-kelompok

masyarakat yang paling rentan, seperti masyarakat adat, kaum miskin, dan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, politik hijau mengusulkan kebijakan yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapat akses yang adil terhadap sumber daya alam dan tidak menjadi korban dari eksploitasi yang merusak. Politik hijau juga bersifat interdisipliner, memadukan isu-isu lingkungan dengan masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti yang dikemukakan oleh Barry dan Eckersley (2005), politik hijau menantang paradigma pembangunan ekonomi konvensional yang mengutamakan pertumbuhan di atas kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, politik hijau tidak hanya menawarkan solusi teknis terhadap permasalahan lingkungan, tetapi juga merumuskan ulang bagaimana masyarakat seharusnya hidup berdampingan dengan alam dalam kerangka yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, politik hijau menekankan pentingnya demokrasi partisipatif, di mana warga negara memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan politik, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Politik hijau mendukung model pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, di mana kebijakan lingkungan ditentukan melalui proses deliberatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, bukan hanya elit politik atau korporasi besar. Dengan demikian, politik hijau bukan hanya sekedar ideologi yang mengadvokasi pelestarian alam, tetapi juga sebuah gerakan politik yang lebih luas, yang berusaha menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Politik hijau mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali hubungan kita dengan alam dan bagaimana keputusan politik kita memengaruhi lingkungan di sekitar kita. Di tengah krisis iklim global, politik hijau menjadi semakin relevan dan mendesak untuk diimplementasikan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.

3. Latar Belakang Historis

Politik hijau atau *Green Politics* memiliki akar historis yang kuat dalam gerakan lingkungan yang muncul pada pertengahan abad ke-20, terutama di negara-negara Barat. Latar belakang dari munculnya politik hijau dapat ditelusuri melalui reaksi terhadap dampak industrialisasi, yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara signifikan dan memperparah eksploitasi sumber daya alam. Gerakan ini mulai berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an, ditandai dengan maraknya aksi protes terhadap polusi udara, kerusakan hutan, serta pencemaran air yang meluas akibat proses industrialisasi intensif (Carter, 2018). Politik hijau lahir dari perkembangan panjang gerakan lingkungan yang

muncul sebagai respons terhadap kerusakan alam akibat industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global mengenai pentingnya pelestarian alam, isu-isu lingkungan yang awalnya hanya dipandang sebagai masalah teknis atau sains, bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik yang terorganisir. Untuk memahami bagaimana politik hijau berkembang, kita perlu menelusuri akar sejarah gerakan lingkungan dan evolusinya menjadi kekuatan politik yang signifikan.

Pada tahun 1970-an, gerakan hijau mulai terorganisir secara politis, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Misalnya, munculnya Partai Hijau di Jerman, yang dibentuk pada tahun 1980, menandai dimulainya era baru di mana isu lingkungan menjadi bagian integral dari platform politik (*Frankland, 2019*). Partai-partai hijau ini awalnya tumbuh dari gerakan akar rumput yang memprotes perlakuan lingkungan oleh pemerintah dan industri, serta mengadvokasi kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, politik hijau berkembang lebih jauh dengan munculnya konsep *Green Economy*, yang menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, transisi energi terbarukan, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Konsep ini menyoroti bagaimana ekonomi dan lingkungan saling terkait, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi harus diselaraskan dengan pelestarian ekosistem (*Jackson, 2011*).

Secara historis, politik hijau telah berkembang dari sekadar gerakan lingkungan menjadi kekuatan politik yang lebih luas dan terstruktur, berfokus pada perubahan kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kesadaran bahwa krisis lingkungan global membutuhkan solusi politis yang mendalam dan komprehensif telah menjadikan politik hijau sebagai salah satu platform utama dalam perdebatan kebijakan publik saat ini. Sejarah gerakan lingkungan dapat ditelusuri sejak era industrialisasi di abad ke-19, ketika masyarakat mulai merasakan dampak negatif dari urbanisasi dan industrialisasi yang cepat. Polusi udara, degradasi tanah, deforestasi, dan hilangnya habitat alami menjadi masalah yang semakin terlihat. Pada masa ini, beberapa pemikir dan tokoh seperti Henry David Thoreau, John Muir, dan George Perkins Marsh mulai menyerukan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam. Karya-karya seperti *Walden* (1854) oleh Thoreau dan *Man and Nature* (1864) oleh Marsh menyoroti dampak negatif eksploitasi alam dan menyerukan kesadaran ekologis yang lebih tinggi.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan konservasi mulai terbentuk, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Gerakan ini berfokus pada upaya pelestarian kawasan alam yang penting, seperti taman nasional dan hutan lindung, serta pengaturan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih bijak. Salah satu pencapaian penting dari periode ini adalah pembentukan National Parks Service di Amerika Serikat pada tahun 1916, yang menandai dimulainya upaya pemerintah untuk melestarikan kawasan alam yang bernilai tinggi. Gerakan lingkungan modern mulai berkembang pada paruh kedua abad ke-20, khususnya pada 1960-an dan 1970-an, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran publik akan dampak buruk aktivitas manusia terhadap lingkungan. Salah satu titik balik penting dalam perkembangan gerakan lingkungan modern adalah publikasi buku *Silent Spring* (1962) oleh Rachel Carson. Buku ini mengungkap dampak negatif penggunaan pestisida, terutama DDT, terhadap ekosistem, terutama burung, dan memicu diskusi luas tentang bahaya bahan kimia industri terhadap alam dan kesehatan manusia.

Gerakan politik hijau juga dipengaruhi oleh konsep-konsep keberlanjutan dan keadilan lingkungan yang dikembangkan pada dekade-dekade berikutnya. Pada tahun 1992, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan, atau yang dikenal sebagai KTT Bumi di Rio de Janeiro, menjadi tonggak penting dalam memperkuat urgensi politik hijau di tingkat global (*Eckersley, 2004*). Pada pertemuan tersebut, negara-negara dunia sepakat untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan dalam strategi pembangunan ekonomi, menegaskan bahwa keberlanjutan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik. Tahun 1970 juga menandai peringatan Hari Bumi pertama, yang diperingati pada 22 April sebagai aksi protes besar-besaran terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh polusi dan limbah industri. Hari Bumi pertama ini mencerminkan betapa luasnya dukungan publik terhadap isu lingkungan dan semakin jelasnya kebutuhan untuk mengintegrasikan agenda lingkungan ke dalam kebijakan publik. Pada dekade yang sama, berbagai organisasi lingkungan internasional seperti Greenpeace dan Friends of the Earth terbentuk, memperluas ruang lingkup dan skala perjuangan lingkungan ke level global.

Gerakan lingkungan yang awalnya terfokus pada advokasi dan edukasi, mulai bergerak ke ranah politik pada 1980-an. Aktivis lingkungan menyadari bahwa perubahan signifikan hanya dapat terjadi jika isu lingkungan diintegrasikan secara langsung ke dalam

kebijakan politik. Dari sinilah lahirnya partai-partai politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian alam. Salah satu partai hijau yang paling awal dan signifikan adalah Die Grünen atau Partai Hijau di Jerman, yang didirikan pada 1980. Partai ini awalnya terbentuk dari gabungan aktivis lingkungan, feminis, pasifis, dan gerakan anti-nuklir. Mereka menentang penggunaan energi nuklir dan menyerukan perlindungan terhadap alam sebagai prioritas politik. Keberhasilan Die Grünen memenangkan kursi di parlemen Jerman pada 1983 menjadi tonggak penting dalam pengakuan formal politik hijau sebagai kekuatan politik yang sah.

Kesuksesan Partai Hijau di Jerman menginspirasi terbentuknya partai hijau di berbagai negara lain, terutama di Eropa. Partai-partai hijau mulai mendapatkan pengaruh politik di beberapa negara seperti Prancis, Belgia, dan Belanda. Mereka membawa isu-isu seperti perubahan iklim, energi terbarukan, dan perlindungan keanekaragaman hayati ke dalam agenda politik nasional, menekankan bahwa kebijakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial dan ekonomi. Politik hijau semakin mendapatkan momentum ketika isu lingkungan global seperti perubahan iklim dan penipisan lapisan ozon mulai mendapat perhatian internasional. Deklarasi KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 adalah salah satu momen penting ketika negara-negara di dunia mengakui perlunya tindakan global untuk melindungi lingkungan. Politik hijau tidak hanya berkembang di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan lingkungan yang lebih kompleks akibat eksploitasi sumber daya alam.

Di tingkat internasional, partai-partai hijau mulai membentuk aliansi politik lintas negara, seperti Global Greens, sebuah jaringan global partai hijau yang terbentuk pada tahun 2001. Aliansi ini memperkuat posisi politik hijau dalam menghadapi tantangan global yang memerlukan solusi lintas batas negara, seperti perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, dan krisis sumber daya. Politik hijau merupakan hasil evolusi panjang dari gerakan lingkungan yang berakar pada kesadaran akan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam. Seiring berjalannya waktu, gerakan ini berkembang menjadi sebuah kekuatan politik yang mengusung agenda keberlanjutan dan keadilan sosial. Dari aksi-aksi lokal hingga pergerakan global, politik hijau telah membawa isu lingkungan ke pusat pengambilan keputusan politik, dengan tujuan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

4. Urgensi Politik Hijau

Di era modern ini, krisis lingkungan telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Fenomena seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi yang merusak, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menjadi ancaman serius terhadap kehidupan di bumi. Di tengah tantangan global ini, politik hijau hadir sebagai sebuah respons penting yang menekankan perlunya kebijakan politik yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta kesejahteraan jangka panjang. Politik hijau bukan lagi hanya menjadi wacana di kalangan akademisi dan aktivis, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak yang harus diintegrasikan dalam kebijakan global dan nasional.

Politik hijau menjadi sangat relevan di era saat ini karena menghadapi ancaman eksistensial terhadap planet dan manusia akibat aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Beberapa faktor yang menjadikan politik hijau penting antara lain:

- Perubahan Iklim

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah perubahan iklim. Aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, telah menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang berakibat pada pemanasan global. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan bahwa suhu rata-rata global telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celsius sejak era pra-industri, dan terus meningkat setiap tahun. Dampak dari perubahan iklim ini tidak hanya terbatas pada peningkatan suhu global, tetapi juga menyebabkan naiknya permukaan laut, bencana alam yang lebih sering dan ekstrem, kekeringan berkepanjangan, serta hilangnya habitat alam.

Politik hijau menempatkan isu perubahan iklim sebagai prioritas utama. Ini karena tanpa tindakan segera untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, perubahan iklim dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Dalam politik hijau, solusi yang ditawarkan mencakup transisi menuju energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, politik hijau juga mendukung investasi dalam teknologi hijau dan inovasi yang dapat membantu memitigasi dampak perubahan iklim.

- Krisis Keanekaragaman Hayati

Dunia saat ini menghadapi hilangnya keanekaragaman hayati dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan terancam punah dalam beberapa dekade mendatang jika aktivitas manusia tidak berubah. Penyebab utama dari hilangnya keanekaragaman hayati ini meliputi deforestasi, degradasi habitat, perubahan penggunaan lahan, perburuan liar, dan pencemaran.

Hilangnya keanekaragaman hayati bukan hanya masalah ekologi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, kesehatan manusia, dan stabilitas ekonomi. Politik hijau menekankan perlunya upaya pelestarian keanekaragaman hayati melalui perlindungan ekosistem, pembatasan aktivitas industri yang merusak, serta pemulihan habitat alam yang terancam. Selain itu, politik hijau juga menekankan pentingnya keadilan bagi komunitas lokal dan masyarakat adat yang sering kali menjadi penjaga utama keanekaragaman hayati.

- Polusi dan Degradasi Lingkungan

Polusi, baik dalam bentuk polusi udara, air, maupun tanah, telah menjadi masalah serius di banyak bagian dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara saja menyebabkan sekitar tujuh juta kematian setiap tahun akibat penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Polusi plastik juga menjadi perhatian besar, dengan diperkirakan sekitar 8 juta ton plastik mengalir ke lautan setiap tahun, mengancam kehidupan laut dan akhirnya masuk ke dalam rantai makanan manusia.

Politik hijau melihat masalah polusi sebagai ancaman yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga kesehatan manusia. Dengan demikian, salah satu tujuan utama politik hijau adalah menciptakan kebijakan yang mendorong pengurangan polusi melalui regulasi industri yang lebih ketat, pengelolaan limbah yang lebih efisien, serta penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Dalam konteks ini, politik hijau juga mendorong perkembangan ekonomi sirkular, di mana limbah dan polusi diminimalkan dengan memaksimalkan daur ulang dan penggunaan ulang material.

- Eksploitasi Sumber Daya Alam

Dunia telah menyaksikan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, mulai dari penebangan hutan, penambangan, hingga eksplorasi minyak dan gas yang merusak.

Hal ini tidak hanya menghabiskan sumber daya alam yang terbatas tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem yang luas. Negara-negara berkembang sering kali menjadi korban dari eksploitasi ini, dengan dampak lingkungan yang serius terhadap masyarakat lokal.

Politik hijau mengadvokasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, di mana eksploitasi dilakukan secara bijaksana dan dalam batas-batas yang dapat diterima alam. Ini mencakup perlindungan terhadap hutan tropis, pengelolaan perikanan yang lestari, serta pembatasan pada industri-industri ekstraktif yang merusak lingkungan. Dalam perspektif politik hijau, sumber daya alam bukan hanya komoditas yang harus dieksploitasi untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga warisan bersama yang harus dilindungi demi kelangsungan hidup generasi mendatang.

- Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi

Masalah lingkungan sering kali diperburuk oleh ketidakadilan sosial dan ekonomi. Negara-negara miskin dan masyarakat yang terpinggirkan, termasuk masyarakat adat, sering kali mengalami dampak paling parah dari kerusakan lingkungan, meskipun mereka memiliki kontribusi yang paling sedikit terhadap penyebabnya. Politik hijau berpendapat bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari isu-isu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, politik hijau tidak hanya fokus pada pelestarian alam, tetapi juga pada distribusi sumber daya yang adil dan perlindungan hak-hak komunitas yang rentan.

Dalam konteks globalisasi dan ketidaksetaraan ekonomi, politik hijau menyerukan perubahan pada struktur ekonomi dan politik global yang selama ini cenderung mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada kesejahteraan jangka panjang. Ini termasuk mendukung model ekonomi yang lebih adil dan inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi tidak dilakukan dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat miskin.

Meskipun relevansi politik hijau sangat jelas, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan politik hijau meliputi:

- Kepentingan Ekonomi Jangka Pendek

Banyak pemerintah dan perusahaan besar masih menempatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek di atas perlindungan lingkungan. Ketergantungan pada bahan bakar fosil dan industri ekstraktif sering kali dilihat sebagai jalan cepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, meskipun itu merusak lingkungan. Hal ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab untuk melindungi lingkungan.

- Kurangnya Kesadaran Publik dan Dukungan Politik

Meskipun kesadaran tentang perubahan iklim dan isu-isu lingkungan telah meningkat, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari urgensi dari krisis ini. Di beberapa negara, masalah lingkungan masih dianggap sebagai isu pinggiran yang tidak mendapat perhatian serius dari para pemimpin politik. Kurangnya dukungan politik dan komitmen yang lemah dari pemerintah sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan hijau.

- Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

Politik hijau memerlukan transisi menuju teknologi hijau dan energi terbarukan, tetapi ini sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Negara-negara berkembang, khususnya, sering kali kekurangan sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk beralih ke model pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Urgensi politik hijau tidak dapat lagi diabaikan. Dengan krisis lingkungan yang terus memburuk, dunia membutuhkan pendekatan politik yang berfokus pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan kesejahteraan jangka panjang. Politik hijau menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan lingkungan saat ini. Meskipun implementasinya tidak mudah, politik hijau memberikan pandangan bahwa kesejahteraan manusia di masa depan bergantung pada hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan, politik hijau harus menjadi bagian inti dari kebijakan global di abad ke-21.

Referensi

Bäckstrand, K., & Kronsell, A. (2015). Rethinking the green state: Environmental governance towards climate and sustainability transitions. *Environmental Politics*, 24(1), 1-19. DOI: 10.1080/09644016.2014.970672

- Barry, J. (2012). The politics of actually existing unsustainability: Human flourishing in a climate-changed, carbon-constrained world. *Environmental Politics*, 21(4), 635-652. DOI: 10.1080/09644016.2012.688355
- Barry, J., & Eckersley, R. (2005). The state and the global ecological crisis. *MIT Press*. ISBN: 9780262026064
- Carter, N. (2018). The politics of the environment: Ideas, activism, policy (3rd ed.). *Cambridge University Press*. ISBN: 9781108472301
- Dobson, A. (2007). Green political thought (4th ed.). *Routledge*. DOI: 10.4324/9780203968725
- Dryzek, J. S., Norgaard, R. B., & Schlosberg, D. (2020). Climate-challenged society. *Oxford University Press*. ISBN: 9780199642906
- Eckersley, R. (2004). The green state: Rethinking democracy and sovereignty. *MIT Press*. ISBN: 9780262050717
- Giddens, A. (2009). The politics of climate change. *Polity Press*. ISBN: 9780745646930
- Jackson, T. (2011). Prosperity without growth: Economics for a finite planet. *Earthscan*. ISBN: 9781849713238
- Lockwood, M. (2013). The political sustainability of climate policy: The case of the UK Climate Change Act. *Global Environmental Change*, 23(5), 1339-1348. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2013.07.001
- Mason, M. (2013). Climate ethics and equity: Extending responsibility for the impacts of climate change. *Environmental Politics*, 22(5), 682-700. DOI: 10.1080/09644016.2013.815761
- Meadowcroft, J. (2005). From welfare state to ecostate? The evolution of environmental governance. *Environmental Politics*, 14(1), 3-26. DOI: 10.1080/0964401042000310172
- Newell, P., & Paterson, M. (2010). Climate capitalism: Global warming and the transformation of the global economy. *Cambridge University Press*. DOI: 10.1017/CBO9780511772108

O'Neill, K. (2017). The environment and international relations (2nd ed.). *Cambridge University Press*. ISBN: 9781107115032

Steffen, W., Rockström, J., Richardson, K., et al. (2018). Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(33), 8252-8259. DOI: 10.1073/pnas.1810141115

BAB II

Prinsip-Prinsip Dasar Politik Hijau

Ahmad Sholikin

Politik hijau, atau green politics, adalah sebuah gerakan ideologis yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Di tengah meningkatnya tantangan lingkungan global—seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran yang merusak—politik hijau menjadi semakin relevan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada pelestarian alam, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi partisipatif, dan non-kekerasan. Dengan mengintegrasikan berbagai dimensi keberlanjutan, politik hijau menawarkan pendekatan holistik untuk mengatasi masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Dalam tulisan ini, kita akan menggali prinsip-prinsip dasar politik hijau, yang menjadi landasan bagi gerakan ini. Prinsip-prinsip ini mencerminkan visi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan harmonis dengan alam. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat lebih memahami bagaimana politik hijau berupaya membangun masa depan yang berkelanjutan, serta mengapa ideologi ini menjadi begitu penting di era krisis lingkungan global yang semakin mendesak.

1. Ekologi sebagai Pusat perhatian dalam politik hijau

Ekologi, sebagai cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, menjadi pusat perhatian dalam politik hijau. Politik hijau, atau green politics, didasarkan pada pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara manusia, alam, dan sistem ekosistem yang menopang kehidupan. Dalam kerangka politik hijau, ekologi dipandang sebagai dasar dari kebijakan dan keputusan politik, yang mempengaruhi segala aspek kehidupan—mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Memprioritaskan ekologi dalam politik hijau bukan hanya tentang menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan yang lebih luas antara manusia dan alam. Di tengah krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, kerusakan habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati, ekologi menjadi elemen inti yang tidak bisa diabaikan. Artikel ini akan menjelaskan mengapa ekologi menjadi pusat perhatian dalam politik hijau dan bagaimana pemahaman tentang ekologi mendorong perumusan kebijakan yang berkelanjutan serta adil.

Ekologi menyoroti hubungan saling ketergantungan antara semua bentuk kehidupan di Bumi. Sistem ekologi mencakup interaksi kompleks antara organisme, termasuk manusia, dengan lingkungan fisik mereka—baik itu tanah, air, udara, maupun makhluk hidup lainnya. Dalam ekosistem, semua komponen ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Kerusakan pada salah satu elemen ini dapat mengganggu keseimbangan dan menyebabkan konsekuensi negatif, baik bagi alam maupun bagi kehidupan manusia. Politik hijau menempatkan pemahaman ekologi sebagai fondasi utama karena tanpa kesadaran akan keterkaitan ini, kebijakan publik cenderung bersifat eksploitatif dan merusak. Contohnya, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam seperti hutan, lautan, dan tanah pertanian sering kali dilakukan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Tanpa pendekatan ekologi, kebijakan pembangunan sering kali berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang dapat terjadi.

Dengan menjadikan ekologi sebagai pusat perhatian, politik hijau mendorong perlunya integrasi keberlanjutan dalam setiap keputusan politik. Keberlanjutan ini mencakup penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, perlindungan terhadap ekosistem, dan pemulihan alam yang telah rusak. Politik hijau mengajarkan bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini akan mempengaruhi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan ekologis menjadi dasar bagi setiap kebijakan politik hijau. Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar yang dihadapi dunia saat ini, dan politik hijau menempatkan isu ini sebagai pusat perhatian. Peningkatan suhu global, akibat dari emisi gas rumah kaca yang berlebihan, telah menyebabkan perubahan besar dalam sistem ekologi dunia. Dampak perubahan iklim termasuk mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, pola cuaca yang tidak menentu, dan peningkatan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, serta badai. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi alam, tetapi juga kehidupan manusia yang bergantung pada stabilitas ekosistem.

Politik hijau mengajukan argumen bahwa krisis iklim tidak dapat diatasi tanpa pemahaman mendalam tentang ekologi. Sebagian besar masalah yang terkait dengan perubahan iklim, seperti deforestasi, pencemaran udara, dan pengurasan sumber daya alam, berakar pada kurangnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip ekologi. Solusi politik hijau terhadap perubahan iklim mencakup upaya global untuk mengurangi emisi

karbon, beralih ke energi terbarukan, serta melindungi ekosistem yang rapuh seperti hutan hujan dan lautan, yang berperan penting dalam penyerapan karbon. Dengan memprioritaskan ekologi, politik hijau juga menyoroti pentingnya langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini termasuk menjaga keberlanjutan pertanian dan sistem pangan yang ramah lingkungan, serta memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim mendapatkan dukungan yang memadai.

Keanekaragaman hayati adalah jantung dari sistem ekologi yang sehat dan stabil. Ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mempertahankan produktivitas, dan menyediakan berbagai layanan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti penyediaan udara bersih, air, dan tanah yang subur. Hilangnya keanekaragaman hayati mengakibatkan runtuhnya ekosistem yang stabil, yang pada akhirnya berdampak negatif pada ketahanan pangan, kesehatan manusia, dan ekonomi. Politik hijau menempatkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati sebagai prioritas karena keberadaan ekosistem yang sehat merupakan fondasi bagi kelangsungan hidup umat manusia. Namun, akibat eksploitasi manusia terhadap alam, keanekaragaman hayati di berbagai belahan dunia mengalami penurunan drastis. Penebangan hutan, konversi lahan pertanian, perburuan liar, serta pencemaran telah menyebabkan banyak spesies tumbuhan dan hewan terancam punah.

Politik hijau mengusulkan kebijakan yang melindungi habitat alami dan memperbaiki ekosistem yang terancam. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan pembentukan kawasan konservasi, tetapi juga perubahan radikal dalam cara manusia mengelola sumber daya alam. Upaya ini mencakup penghentian deforestasi, penghijauan lahan yang rusak, serta perlindungan terhadap spesies yang terancam punah. Selain itu, politik hijau juga mendukung pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang secara tradisional menjadi pelindung keanekaragaman hayati. Salah satu aspek penting dari politik hijau adalah bagaimana prinsip-prinsip ekologi diterapkan dalam model ekonomi. Ekonomi global saat ini sebagian besar didasarkan pada model pertumbuhan yang tak terbatas, yang memicu konsumsi sumber daya alam secara berlebihan dan kerusakan lingkungan yang masif. Politik hijau mengadvokasi ekonomi berkelanjutan yang memperhitungkan kapasitas ekologi planet ini untuk menopang kehidupan manusia.

Ekonomi berkelanjutan dalam konteks politik hijau melibatkan peralihan dari pendekatan ekonomi linier—yang berfokus pada produksi, konsumsi, dan pembuangan—ke model ekonomi sirkular, di mana sumber daya diolah, digunakan, dan didaur ulang secara terus menerus. Model ini bertujuan untuk meminimalkan limbah dan polusi, serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dengan demikian, ekonomi berkelanjutan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang ramah lingkungan. Selain itu, politik hijau menekankan pentingnya menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam harga barang dan jasa. Dalam ekonomi konvensional, biaya lingkungan sering kali diabaikan, sehingga harga produk tidak mencerminkan dampak sebenarnya terhadap alam. Sebagai contoh, harga bahan bakar fosil sering kali lebih murah daripada energi terbarukan karena tidak memasukkan biaya sosial dan ekologis dari polusi yang dihasilkan. Politik hijau mendorong penerapan kebijakan seperti pajak karbon dan insentif untuk energi hijau guna memastikan bahwa dampak lingkungan dimasukkan ke dalam kalkulasi ekonomi.

Ekologi dalam politik hijau tidak hanya berkaitan dengan pelestarian alam, tetapi juga dengan keadilan sosial. Prinsip ini dikenal sebagai keadilan ekologis, yang menekankan bahwa kerusakan lingkungan sering kali berdampak lebih parah pada kelompok masyarakat yang rentan—seperti masyarakat miskin, komunitas adat, dan negara berkembang. Keadilan ekologis menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bersih, serta bahwa biaya kerusakan lingkungan tidak boleh dibebankan pada mereka yang paling tidak berkontribusi terhadap kerusakan tersebut. Politik hijau memandang perlindungan ekologi sebagai bagian integral dari perjuangan untuk keadilan sosial. Isu-isu seperti pencemaran industri, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam sering kali tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperparah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, politik hijau menekankan pentingnya melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak oleh krisis lingkungan, dan memastikan bahwa kebijakan lingkungan didesain untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang, bukan hanya segelintir elit.

Ekologi menjadi pusat perhatian dalam politik hijau karena pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan adil. Dengan menempatkan ekologi di inti kebijakan politik, politik hijau menawarkan solusi holistik untuk menghadapi tantangan lingkungan global yang

semakin mendesak. Dari perubahan iklim hingga hilangnya keanekaragaman hayati, politik hijau menekankan bahwa perlindungan terhadap lingkungan adalah fondasi bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dengan memperjuangkan ekonomi berkelanjutan, keadilan ekologis, dan perlindungan keanekaragaman hayati, politik hijau bertujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih seimbang antara manusia dan alam.

2. Keadilan Sosial dan Lingkungan

Ekologi telah menjadi inti dari politik hijau (*Green Politics*), suatu gerakan politik yang menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Dalam politik hijau, ekologi bukan hanya sekadar aspek teknis tentang pelestarian lingkungan, tetapi juga kerangka ideologis yang mendasari kebijakan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan (Carter, 2018). Politik hijau memandang bahwa untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang, isu-isu lingkungan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan politik. Pendekatan ini mengintegrasikan konsep ekologi ke dalam struktur kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial, untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan krisis lingkungan global lainnya. Politik hijau tidak hanya berbicara tentang pelestarian alam dan ekosistem, tetapi juga menyoroti pentingnya keadilan sosial. Hubungan antara keadilan sosial dan lingkungan merupakan salah satu elemen inti dalam politik hijau, di mana perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari isu-isu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dalam pandangan politik hijau, ketidakadilan sosial sering kali berkelindan dengan kerusakan lingkungan, dan masalah lingkungan tidak dapat sepenuhnya diselesaikan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan.

Konsep keadilan sosial dan lingkungan ini bertumpu pada gagasan bahwa semua manusia, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka, berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, politik hijau menekankan bahwa mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, seperti masyarakat miskin dan negara berkembang, sering kali menjadi pihak yang paling menderita akibat dampaknya. Sub bab ini akan menjelaskan hubungan erat antara keadilan sosial dan lingkungan dalam politik hijau, serta bagaimana konsep keadilan ekologis menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketidakadilan lingkungan merujuk pada situasi di mana kelompok-kelompok masyarakat tertentu, terutama yang miskin dan terpinggirkan, secara tidak proporsional terkena

dampak dari kerusakan lingkungan. Mereka sering kali tinggal di daerah yang paling rentan terhadap bencana lingkungan, seperti banjir, pencemaran udara, atau tumpahan limbah beracun. Contohnya, di kota-kota besar, komunitas miskin sering kali terpaksa tinggal di kawasan industri atau di sekitar tempat pembuangan sampah, di mana polusi udara dan air merajalela.

Politik hijau berkembang dari gerakan lingkungan yang menolak eksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Gerakan ini berawal dari protes terhadap industrialisasi yang merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan kehidupan manusia (*Dobson, 2007*). Sebagai pendekatan politik, politik hijau menganut nilai-nilai ekosentris yang mengutamakan perlindungan dan penghormatan terhadap alam, bukan hanya demi kesejahteraan manusia, tetapi juga untuk menjaga integritas ekosistem secara keseluruhan. Dalam konteks ini, politik hijau menentang model pembangunan ekonomi tradisional yang mengabaikan dampak lingkungan dan menggantinya dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. Prinsip ekologi yang diusung dalam politik hijau menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhitungkan batasan-batasan ekosistem. Hal ini berarti pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, serta pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan (*Newell & Paterson, 2010*).

Dalam perspektif politik hijau, ketidakadilan ini tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi dan politik yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Industrialisasi dan urbanisasi sering kali terjadi tanpa regulasi yang memadai untuk melindungi lingkungan, dan kerusakan yang diakibatkannya justru menimpa masyarakat yang paling lemah secara sosial dan ekonomi. Fenomena ini terjadi di banyak negara berkembang, di mana eksploitasi sumber daya alam sering kali merugikan masyarakat lokal yang hidup bergantung pada lingkungan tersebut. Selain itu, ketidakadilan lingkungan juga tercermin dalam masalah perubahan iklim global. Negara-negara berkembang, yang secara historis berkontribusi lebih sedikit terhadap emisi gas rumah kaca, menghadapi dampak paling parah dari krisis iklim. Negara-negara ini sering kali mengalami bencana alam yang lebih ekstrem, kerawanan pangan, dan kehilangan keanekaragaman hayati, meskipun mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk beradaptasi atau memitigasi dampak tersebut. Politik hijau menekankan perlunya tanggung jawab global yang adil, di mana negara-negara

industri besar yang menjadi kontributor utama kerusakan lingkungan harus memikul tanggung jawab lebih besar untuk membantu negara-negara miskin.

Politik hijau memperkenalkan konsep keadilan ekologis, yang menghubungkan perjuangan untuk keadilan sosial dengan upaya pelestarian lingkungan. Prinsip keadilan ekologis menyatakan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, berhak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya alam, lingkungan yang sehat, serta perlindungan dari kerusakan lingkungan. Keadilan ekologis juga berpendapat bahwa beban kerusakan lingkungan harus dibagi secara adil. Dalam hal ini, negara-negara maju dan industri besar yang memiliki kontribusi terbesar terhadap degradasi lingkungan harus bertanggung jawab lebih besar dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mereka tidak hanya harus mengurangi emisi karbon dan polusi, tetapi juga memberikan dukungan finansial dan teknologi kepada negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Politik hijau menekankan bahwa kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya lingkungan harus diperbaiki untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Ini berarti mendukung kebijakan yang memastikan akses yang setara terhadap air bersih, udara segar, tanah subur, dan sumber daya alam lainnya bagi semua orang. Dalam konteks global, ini juga mencakup reformasi sistem ekonomi dan politik internasional yang selama ini mempromosikan eksploitasi alam yang tidak adil, terutama di negara-negara berkembang. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga meminggirkan masyarakat lokal yang bergantung pada alam untuk mata pencaharian mereka. Penebangan hutan, penambangan, pembangunan infrastruktur skala besar, serta ekspansi pertanian skala industri sering kali mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

Masyarakat adat, yang telah lama hidup berdampingan dengan alam dan memiliki pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sering kali menjadi korban pertama dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri. Hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam sering kali dilanggar atas nama pembangunan ekonomi atau keuntungan jangka pendek. Politik hijau menekankan bahwa keadilan sosial tidak dapat dicapai tanpa menghormati hak-hak masyarakat lokal dan adat untuk mempertahankan hubungan mereka dengan tanah dan lingkungan

mereka. Salah satu landasan utama politik hijau adalah keberlanjutan, yang berakar pada konsep ekologi bahwa penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas regeneratif lingkungan. Konsep ini pertama kali diangkat dalam konteks pembangunan pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992, yang menyatakan bahwa kebijakan pembangunan harus menggabungkan dimensi lingkungan dan ekonomi secara seimbang (*Eckersley, 2004*).

Politik hijau melihat keberlanjutan sebagai suatu keharusan moral dan strategis untuk melindungi planet bagi generasi mendatang. Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas ekosistem akan menimbulkan kerusakan jangka panjang, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, politik hijau mengadvokasi model ekonomi baru yang mengurangi konsumsi sumber daya, mengurangi limbah, dan memastikan bahwa aktivitas manusia tidak melampaui batas kemampuan alam untuk pulih (*Jackson, 2011*). Dalam kerangka keadilan ekologis, politik hijau mendukung perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam mengelola dan melindungi lingkungan mereka sendiri. Ini termasuk mendukung model ekonomi lokal yang berkelanjutan, di mana masyarakat memiliki kendali atas sumber daya alam mereka sendiri dan dapat mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan jangka panjang, bukan hanya keuntungan ekonomi jangka pendek. Selain itu, politik hijau juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan mereka, melalui mekanisme demokrasi partisipatif.

Politik hijau menawarkan berbagai solusi untuk memperbaiki ketidakadilan sosial dan lingkungan, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Beberapa langkah konkret yang diusulkan dalam kerangka politik hijau meliputi:

- **Ekonomi Berkelanjutan**

Salah satu pilar utama politik hijau adalah transisi menuju ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan lingkungan dan sosial. Ekonomi berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kemampuan alam untuk menopang kehidupan. Ini berarti mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi

ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mengadopsi model ekonomi sirkular yang meminimalkan limbah dan polusi.

- Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Lokal dan Adat

Politik hijau mendukung pengakuan penuh atas hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mengelola sumber daya alam mereka sendiri. Ini berarti memberikan hak tanah yang jelas dan melindungi mereka dari pengusuran atau eksploitasi tanpa persetujuan mereka. Selain itu, politik hijau menekankan pentingnya memasukkan pengetahuan tradisional dalam upaya pelestarian lingkungan, karena masyarakat adat sering kali memiliki pengetahuan mendalam tentang bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem.

- Keadilan Iklim

Dalam menghadapi perubahan iklim, politik hijau menekankan pentingnya keadilan iklim, di mana negara-negara kaya dan industri besar yang paling banyak berkontribusi terhadap krisis iklim harus bertanggung jawab lebih besar dalam membantu negara-negara miskin beradaptasi. Ini termasuk memberikan dukungan finansial untuk proyek-proyek adaptasi dan mitigasi di negara-negara berkembang, serta memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dilakukan dengan cara yang adil dan inklusif.

- Kebijakan Lingkungan yang Inklusif

Politik hijau mengusulkan kebijakan lingkungan yang tidak hanya melindungi alam, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Ini berarti menciptakan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan, memastikan akses yang adil terhadap sumber daya alam, serta melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan lingkungan. Politik hijau juga mendukung regulasi industri yang lebih ketat untuk mencegah pencemaran dan eksploitasi berlebihan terhadap alam.

- Keterkaitan Antara Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan

Dalam politik hijau, keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Lingkungan yang sehat adalah prasyarat untuk kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang adil adalah prasyarat untuk menjaga lingkungan yang lestari. Oleh

karena itu, politik hijau menekankan pentingnya integrasi antara upaya untuk mengatasi ketidakadilan sosial dengan perlindungan lingkungan. Ini berarti menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati sumber daya alam dan hidup dalam lingkungan yang bersih dan aman.

Kesadaran akan keterkaitan antara keadilan sosial dan lingkungan mendorong politik hijau untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada perlindungan alam, tetapi juga memperbaiki ketimpangan sosial yang ada. Dengan demikian, politik hijau tidak hanya bertujuan untuk melestarikan lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis dengan alam. Keadilan sosial dan lingkungan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama dalam politik hijau. Ketidakadilan sosial sering kali berdampak pada ketidakadilan lingkungan, di mana masyarakat yang rentan menderita akibat kerusakan alam yang disebabkan oleh struktur ekonomi dan politik yang tidak adil. Politik hijau menawarkan solusi yang mengintegrasikan keadilan sosial dengan keberlanjutan lingkungan, melalui ekonomi berkelanjutan, perlindungan hak-hak masyarakat adat, keadilan iklim, dan kebijakan lingkungan yang inklusif.

Selain itu, politik hijau juga menggabungkan prinsip keadilan sosial dengan ekologi, yang dikenal sebagai keadilan lingkungan. Ini merupakan pengakuan bahwa krisis lingkungan tidak hanya merugikan alam, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan. Sebagai contoh, dampak dari polusi dan perubahan iklim lebih dirasakan oleh masyarakat miskin yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya untuk melindungi diri mereka (*Meadowcroft, 2005*). Dengan demikian, politik hijau memandang isu lingkungan sebagai bagian dari perjuangan untuk keadilan sosial, di mana distribusi yang adil atas sumber daya alam dan manfaat pembangunan harus menjadi tujuan utama.

Meskipun politik hijau telah menarik perhatian yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, penerapannya di dunia nyata masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakcocokan antara prinsip ekologi dengan model ekonomi neoliberal yang dominan, yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus. Sistem ekonomi global saat ini sering kali mengabaikan nilai ekosistem dan melihat alam sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi secara bebas (*Giddens, 2009*). Selain itu, banyak negara dan perusahaan masih enggan untuk beralih dari model

pembangunan yang tidak berkelanjutan ke model yang lebih ramah lingkungan, karena tekanan ekonomi jangka pendek yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, politik hijau tidak hanya memerlukan perubahan dalam kebijakan lingkungan, tetapi juga reformasi struktural dalam sistem ekonomi dan politik internasional. Hal ini menuntut adanya kerjasama lintas sektor dan negara untuk menciptakan kerangka kerja global yang mendukung perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Steffen *et al.*, 2018).

Ekologi memainkan peran sentral dalam politik hijau, karena ia menjadi dasar bagi semua keputusan politik yang berfokus pada keberlanjutan. Politik hijau tidak hanya mendorong perlindungan lingkungan, tetapi juga mengusulkan reformasi menyeluruh dalam sistem ekonomi dan sosial untuk memastikan bahwa kehidupan manusia dapat berlangsung harmonis dengan alam. Dengan memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan, politik hijau menawarkan solusi yang komprehensif terhadap tantangan lingkungan yang semakin mendesak di dunia modern. Meskipun masih menghadapi tantangan besar, politik hijau memiliki potensi untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua makhluk hidup di planet ini.

3. Demokrasi Partisipatif

Demokrasi partisipatif merupakan salah satu pilar utama dalam politik hijau (*Green Politics*). Dalam konteks ini, demokrasi partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Ide ini berakar pada keyakinan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai jika semua lapisan masyarakat berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan lingkungan, alih-alih menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada elit politik atau pasar (Smith, 2009). Demokrasi partisipatif tidak hanya menawarkan model tata kelola yang lebih adil, tetapi juga mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Demokrasi partisipatif adalah salah satu elemen kunci dalam politik hijau yang menekankan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Dalam pandangan politik hijau, masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknokratis atau oleh segelintir elit politik dan ekonomi. Sebaliknya, solusi yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat pada semua tingkatan, mulai dari komunitas lokal hingga skala global.

Politik hijau mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik sebagai cara untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan mencerminkan kebutuhan dan keinginan komunitas lokal. Dalam banyak kasus, kebijakan lingkungan yang didikte dari atas oleh pemerintah atau perusahaan cenderung gagal memahami realitas di lapangan dan sering kali merugikan kelompok masyarakat yang paling rentan (Pateman, 2012). Demokrasi partisipatif, di sisi lain, memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi langsung dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan mereka. Misalnya, dalam banyak gerakan lingkungan, komunitas lokal diberdayakan untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah model *community-based natural resource management* (CBNRM) yang diterapkan di berbagai negara berkembang. Model ini telah berhasil meningkatkan pelestarian sumber daya alam dengan cara melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, air, dan tanah secara berkelanjutan (Berkes, 2004). Dalam konteks ini, demokrasi partisipatif terbukti mampu memperkuat kapasitas masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan bahwa keputusan politik mencerminkan kepentingan lokal.

Politik hijau melihat demokrasi partisipatif sebagai cara untuk mengatasi ketimpangan kekuasaan dan pengaruh yang sering kali membatasi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi partisipatif memberikan suara kepada mereka yang selama ini terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan kekuasaan politik, seperti masyarakat adat, kaum miskin, dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Sub bab ini akan membahas bagaimana politik hijau memandang demokrasi partisipatif, mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam isu-isu lingkungan, dan bagaimana model ini dapat diterapkan secara praktis dalam kebijakan publik.

- Pentingnya Demokrasi Partisipatif dalam Politik Hijau

Dalam konteks politik hijau, demokrasi partisipatif dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berakar pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kelompok elit atau industri. Politik hijau mengakui bahwa isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan degradasi ekosistem mempengaruhi semua orang, tetapi dampaknya paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang sering kali tidak memiliki kekuasaan politik. Oleh karena itu,

pengambilan keputusan yang inklusif dan berbasis partisipasi merupakan cara untuk memastikan bahwa suara semua pihak terdengar dan diakomodasi.

Demokrasi partisipatif memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung dalam proses politik, tidak hanya melalui pemilihan umum, tetapi juga dalam bentuk-bentuk partisipasi lain seperti konsultasi publik, referenda, dan diskusi komunitas. Dalam politik hijau, proses ini dilihat sebagai cara untuk memperdalam demokrasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sehari-hari, terutama dalam hal kebijakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan mereka. Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih adil dan berkelanjutan.

Krisis lingkungan global, termasuk perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran, telah mendorong kebutuhan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Para ahli berpendapat bahwa pendekatan top-down dalam menangani masalah lingkungan sering kali tidak efektif karena tidak memperhitungkan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak langsung. Sebaliknya, pendekatan demokrasi partisipatif yang lebih inklusif memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam upaya menghadapi tantangan lingkungan global (Dryzek, 2013).

Dalam politik hijau, demokrasi partisipatif tidak hanya menjadi alat untuk mencapai kebijakan lingkungan yang lebih adil, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat luas. Ketika orang-orang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, mereka lebih cenderung merasakan tanggung jawab atas kelestarian lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian. Proses ini pada akhirnya membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka (Fung & Wright, 2003).

Lebih jauh, politik hijau mengakui bahwa banyak keputusan yang mempengaruhi lingkungan sering kali diambil oleh pemerintah atau perusahaan besar tanpa masukan dari masyarakat yang terdampak. Hal ini mengarah pada keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan publik atau mengabaikan dampak negatif jangka panjang terhadap ekosistem. Dengan menerapkan prinsip demokrasi partisipatif, politik hijau bertujuan untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan memberikan lebih banyak kendali

kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan mereka.

- Prinsip-Prinsip Demokrasi Partisipatif dalam Politik Hijau

Beberapa prinsip utama dari demokrasi partisipatif yang diterapkan dalam politik hijau meliputi:

Keterbukaan dan Transparansi

Keputusan yang dibuat harus berdasarkan proses yang terbuka dan transparan, di mana semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi yang relevan. Transparansi ini memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang lengkap tentang isu-isu yang dihadapi, serta dampak potensial dari kebijakan yang diusulkan.

Inklusivitas

Demokrasi partisipatif dalam politik hijau menekankan pentingnya melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang sering kali diabaikan, seperti masyarakat adat, kaum miskin, perempuan, dan kaum muda. Partisipasi yang inklusif membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak.

Pemberdayaan Komunitas Lokal

Politik hijau percaya bahwa keputusan yang paling efektif dan berkelanjutan sering kali dibuat pada tingkat lokal, oleh masyarakat yang langsung terdampak oleh isu-isu lingkungan. Pemberdayaan komunitas lokal melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengambilan keputusan lingkungan dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan.

Konsensus dan Kerjasama

Politik hijau mengedepankan pendekatan konsensual dalam pengambilan keputusan, di mana semua pihak berupaya untuk mencapai kesepakatan bersama daripada hanya bergantung pada mayoritas suara. Pendekatan ini memastikan bahwa semua perspektif dan kepentingan dipertimbangkan, terutama dalam isu-isu yang kompleks seperti perubahan iklim dan pelestarian alam.

- Implementasi Demokrasi Partisipatif dalam Isu Lingkungan

Implementasi demokrasi partisipatif dalam konteks kebijakan lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Berikut beberapa contoh bagaimana demokrasi partisipatif dapat diterapkan dalam politik hijau:

Konsultasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan

Salah satu cara paling umum untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah melalui konsultasi publik. Ini dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan masyarakat, diskusi panel, atau survei untuk mengumpulkan pendapat masyarakat tentang kebijakan atau proyek yang akan dilaksanakan, seperti pembangunan infrastruktur atau penggunaan lahan.

Referendum dan Pemungutan Suara Rakyat

Dalam beberapa kasus, politik hijau mendukung penggunaan referendum sebagai cara untuk memberi masyarakat suara langsung dalam isu-isu lingkungan yang signifikan. Misalnya, referendum dapat digunakan untuk memutuskan apakah suatu daerah akan diizinkan untuk mengeksploitasi sumber daya alam tertentu, seperti tambang atau penebangan hutan.

Dewan Lingkungan Komunitas

Politik hijau juga mendorong pembentukan dewan lingkungan komunitas, di mana anggota masyarakat dapat berkumpul untuk mendiskusikan masalah lingkungan lokal dan memberikan masukan kepada pemerintah. Dewan ini bisa berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah lokal, memastikan bahwa suara masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam Proses Penganggaran Lingkungan

Politik hijau mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran, di mana warga dapat ikut serta dalam menentukan prioritas pengeluaran pemerintah, khususnya yang terkait dengan proyek-proyek lingkungan. Ini membantu memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif untuk kepentingan lingkungan dan keberlanjutan.

- Tantangan dan Peluang dalam Demokrasi Partisipatif

Meskipun demokrasi partisipatif menawarkan banyak manfaat dalam hal pengelolaan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya akses masyarakat terhadap informasi dan pendidikan tentang isu-isu lingkungan. Untuk dapat berpartisipasi secara efektif, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang dampak lingkungan dari kebijakan yang diusulkan, serta konsekuensi jangka panjangnya.

Selain itu, kurangnya sumber daya dan waktu sering kali menjadi kendala bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Banyak individu dan komunitas yang harus menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang membuat mereka sulit untuk melibatkan diri secara penuh dalam proses politik. Namun, tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui upaya pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi secara efektif. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) dapat memainkan peran penting dalam menyediakan platform yang memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang setara untuk terlibat dalam proses ini.

Di sisi lain, demokrasi partisipatif juga menawarkan peluang besar bagi penciptaan kebijakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih sejalan dengan kepentingan jangka panjang mereka, serta lebih berakar pada kenyataan lokal.

- Demokrasi Partisipatif sebagai Landasan Keberlanjutan

Dalam politik hijau, demokrasi partisipatif dianggap sebagai landasan utama untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya lebih inklusif, tetapi juga lebih relevan dengan kebutuhan lingkungan dan sosial. Selain itu, demokrasi partisipatif membantu menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan, karena masyarakat merasa memiliki suara dan kendali atas keputusan yang mempengaruhi mereka.

Politik hijau juga melihat demokrasi partisipatif sebagai cara untuk mengatasi ketimpangan kekuasaan dan memastikan bahwa kepentingan publik lebih diutamakan

dibandingkan kepentingan pribadi atau korporasi. Dengan desentralisasi kekuasaan dan peningkatan keterlibatan masyarakat, politik hijau bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang lebih demokratis, adil, dan berkelanjutan. Meskipun demokrasi partisipatif menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya sumber daya dan kapasitas di tingkat lokal untuk benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks. Selain itu, ketidaksetaraan kekuasaan dan akses terhadap informasi sering kali menghambat partisipasi yang bermakna dari masyarakat marginal, yang sering kali paling terpengaruh oleh masalah lingkungan (Young, 2000).

Di beberapa negara, struktur politik dan ekonomi yang tidak demokratis juga membatasi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan besar dan pemerintah yang memiliki kepentingan dalam eksploitasi sumber daya alam sering kali mengabaikan atau bahkan menekan suara masyarakat lokal yang menentang kebijakan yang merusak lingkungan. Dalam situasi seperti ini, demokrasi partisipatif menghadapi tantangan besar untuk diterapkan secara efektif (Escobar, 2017). Untuk memperkuat demokrasi partisipatif dalam politik hijau, perlu adanya reformasi dalam struktur politik yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Ini mencakup peningkatan akses terhadap informasi, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan dan pelatihan lingkungan. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam keputusan politik yang memengaruhi lingkungan harus dijamin oleh negara dan diakui di tingkat internasional (Smith, 2009).

Demokrasi partisipatif juga harus beradaptasi dengan tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, politik hijau harus mendorong kerjasama internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi masyarakat. Ini mencakup mekanisme untuk memperluas partisipasi masyarakat lintas negara dan memperkuat pengaruh gerakan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan lingkungan di tingkat global (Goodin, 1996). Demokrasi partisipatif memainkan peran penting dalam politik hijau sebagai alat untuk mencapai kebijakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, demokrasi partisipatif memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung

dalam pelestarian lingkungan dan menjawab tantangan krisis lingkungan global. Meskipun menghadapi berbagai kendala, demokrasi partisipatif memiliki potensi besar untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan, jika didukung dengan reformasi struktural yang memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan efektif.

Demokrasi partisipatif adalah pilar penting dalam politik hijau, karena memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Dengan prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan pemberdayaan komunitas lokal, demokrasi partisipatif bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, yang mencerminkan kepentingan semua pihak. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal partisipasi dan akses informasi, model ini menawarkan peluang besar untuk menciptakan solusi lingkungan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

4. Ekonomi Berkelanjutan

Ekonomi berkelanjutan merupakan konsep kunci dalam politik hijau yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Tujuan utama dari ekonomi berkelanjutan adalah menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga melindungi sumber daya dan kualitas hidup bagi generasi mendatang (*Jackson, 2011*). Dalam politik hijau, ekonomi berkelanjutan dilihat sebagai jalan keluar dari model pembangunan konvensional yang mengejar pertumbuhan tanpa batas dan cenderung merusak ekosistem. Dengan memfokuskan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, ekonomi hijau berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan negatif sekaligus menciptakan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. Ekonomi berkelanjutan adalah konsep yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam politik hijau, ekonomi berkelanjutan menjadi pusat perhatian karena tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan manusia saat ini, tetapi juga menjaga ekosistem dan sumber daya alam agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Dalam bab ini, kita akan membahas konsep ekonomi berkelanjutan secara mendalam dan bagaimana penerapannya dalam politik hijau untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan harmonis dengan alam.

Ekonomi berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang mengoptimalkan kesejahteraan manusia tanpa mengorbankan lingkungan alam. Pendekatan ini menolak model ekonomi tradisional yang hanya fokus pada pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*) sebagai indikator utama kemajuan. Sebaliknya, ekonomi berkelanjutan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi. Ada tiga pilar utama dalam ekonomi berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Ekonomi berkelanjutan didasarkan pada beberapa prinsip inti, salah satunya adalah penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa sistem ekonomi harus memprioritaskan energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, dan biomassa, daripada bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui dan merusak lingkungan. Selain itu, ekonomi berkelanjutan menekankan pentingnya daur ulang dan pengurangan limbah, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan (*Goodland & Daly, 1996*).

Dalam kerangka ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh diukur hanya dari produk domestik bruto (PDB), tetapi juga dari kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, indikator keberhasilan ekonomi harus mencakup aspek-aspek seperti kesejahteraan masyarakat, akses terhadap layanan dasar, dan keanekaragaman hayati. Pendekatan ini menentang konsep tradisional yang menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir, dan sebaliknya menempatkan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama (*Costanza et al., 2014*). Dalam ekonomi berkelanjutan, sumber daya alam dilihat sebagai aset yang terbatas dan harus digunakan dengan bijak. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan sumber daya yang penting untuk kehidupan, seperti air bersih, udara segar, tanah subur, dan ekosistem yang sehat. Selain itu, ekonomi berkelanjutan menekankan pentingnya keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa kekayaan dan manfaat ekonomi didistribusikan secara adil, sehingga semua orang dapat menikmati hasil dari pembangunan ekonomi tanpa menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar.

Politik hijau mengintegrasikan ekonomi berkelanjutan ke dalam kebijakan publik dan praktik bisnis dengan beberapa prinsip penting:

- Penggunaan Sumber Daya yang Bijaksana

Dalam ekonomi berkelanjutan, penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan efisien. Politik hijau mendukung pengurangan penggunaan bahan baku yang tidak dapat diperbarui dan mendorong inovasi dalam teknologi ramah lingkungan yang memungkinkan daur ulang dan pemanfaatan kembali material. Misalnya, penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air merupakan komponen kunci dalam mencapai keberlanjutan ekonomi.

Keadilan Ekologis dan Sosial

Ekonomi berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi keuntungan ekonomi secara adil. Ini berarti bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang paling rentan, harus mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi. Politik hijau menentang model ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang dan memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, politik hijau memperjuangkan keadilan ekologis, di mana masyarakat yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan mendapatkan kompensasi dan perlindungan.

Perlindungan terhadap Keanekaragaman Hayati

Politik hijau memahami bahwa ekonomi yang berkelanjutan tidak mungkin terwujud tanpa menjaga keanekaragaman hayati. Hutan, laut, dan berbagai ekosistem alam lainnya memiliki nilai ekonomi dan ekologi yang tak ternilai. Ekonomi berkelanjutan menekankan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan. Politik hijau mendorong perlindungan terhadap spesies yang terancam punah, konservasi lahan kritis, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab.

Pembangunan Ekonomi Lokal

Politik hijau mengedepankan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan sebagai alternatif terhadap globalisasi ekonomi yang sering kali merusak lingkungan dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Ekonomi lokal berfokus pada pemberdayaan komunitas lokal dalam mengelola sumber daya alam mereka, memproduksi barang dan jasa secara lokal, serta menjaga ketahanan pangan. Dalam model ini, masyarakat lokal memiliki kontrol yang lebih besar atas ekonomi mereka dan tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya oleh korporasi multinasional.

- Penerapan Ekonomi Berkelanjutan dalam Politik Hijau

Penerapan ekonomi berkelanjutan dalam politik hijau dilakukan melalui berbagai kebijakan dan inisiatif yang mendorong keberlanjutan. Beberapa contoh penerapannya antara lain:

Pengembangan Energi Terbarukan

Salah satu prioritas utama dalam politik hijau adalah transisi dari energi berbasis bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Energi fosil, seperti minyak, batu bara, dan gas alam, tidak hanya terbatas, tetapi juga merupakan penyebab utama dari pemanasan global dan polusi lingkungan. Oleh karena itu, politik hijau mendorong investasi dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor energi bersih.

Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan memastikan bahwa sumber daya digunakan kembali secara terus menerus. Politik hijau mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui kebijakan daur ulang, pengurangan limbah, dan desain produk yang ramah lingkungan. Dalam model ini, barang-barang yang sudah tidak digunakan akan diolah kembali menjadi bahan baku untuk produk baru, sehingga mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan dari pembuangan limbah.

Pajak Karbon dan Insentif Hijau

Pajak karbon adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam ekonomi berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Politik hijau mendukung penerapan pajak karbon yang adil, di mana perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi tinggi harus membayar biaya tambahan, sementara perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan diberi insentif. Pendapatan dari pajak karbon dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek keberlanjutan, seperti pengembangan infrastruktur hijau, transportasi umum yang ramah lingkungan, dan program-program pelestarian alam.

Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Pertanian

Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang paling penting dalam ekonomi hijau. Politik hijau mendukung pertanian organik dan praktik-praktik pertanian yang regeneratif sebagai alternatif terhadap pertanian industri yang sering kali merusak tanah, mencemari air, dan mengurangi keanekaragaman hayati. Pertanian yang berkelanjutan tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan lokal. Ini melibatkan penggunaan metode pertanian yang ramah lingkungan, seperti agroforestri, rotasi tanaman, dan pemanfaatan pupuk alami.

- Tantangan dan Peluang Ekonomi Berkelanjutan

Meskipun ekonomi berkelanjutan menawarkan banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari industri tradisional yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil dan praktik-praktik yang tidak ramah lingkungan. Perubahan ke ekonomi hijau membutuhkan investasi awal yang besar dalam teknologi baru, infrastruktur, dan pelatihan tenaga kerja, yang sering kali dianggap mahal oleh pemerintah dan sektor swasta.

Selain itu, kurangnya kesadaran publik tentang pentingnya ekonomi berkelanjutan juga menjadi hambatan. Banyak masyarakat yang masih melihat pertumbuhan ekonomi dalam kerangka tradisional dan tidak memahami hubungan antara aktivitas ekonomi dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan dan advokasi menjadi sangat penting dalam upaya mempromosikan ekonomi berkelanjutan.

Namun, di sisi lain, ada banyak peluang yang muncul dari penerapan ekonomi berkelanjutan. Salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja baru dalam sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan industri hijau. Selain itu, dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen untuk produk-produk yang ramah lingkungan, banyak perusahaan yang mulai beralih ke model bisnis yang lebih berkelanjutan, menciptakan pasar baru yang potensial.

- Masa Depan Ekonomi Berkelanjutan

Ekonomi berkelanjutan bukan hanya solusi sementara, tetapi juga merupakan jalan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam politik hijau, ekonomi berkelanjutan dianggap sebagai kerangka kerja yang dapat membantu dunia mengatasi tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan

mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam sistem ekonomi global, kita dapat menciptakan dunia di mana kesejahteraan manusia dan pelestarian lingkungan berjalan seiring.

Model pertumbuhan ekonomi konvensional yang didominasi oleh kapitalisme pasar bebas sering kali dianggap tidak berkelanjutan, terutama karena ketergantungannya pada eksploitasi sumber daya alam yang terus menerus. Model ini cenderung mengabaikan dampak lingkungan, seperti degradasi tanah, deforestasi, dan perubahan iklim, yang merupakan hasil dari produksi dan konsumsi yang berlebihan (*Jackson, 2009*). Sebagai respons terhadap krisis lingkungan global, ekonomi berkelanjutan menantang asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa batas dapat terus berjalan tanpa mengorbankan ekosistem. Ekonomis yang mendukung keberlanjutan, seperti Tim Jackson dan Herman Daly, berpendapat bahwa sistem ekonomi konvensional harus beralih ke ekonomi yang stabil, di mana pertumbuhan diukur dari kualitas kehidupan manusia dan keselarasan dengan alam, bukan dari peningkatan material tanpa batas (*Jackson, 2011; Daly, 1991*). Mereka menekankan bahwa tanpa perubahan struktural dalam cara sistem ekonomi beroperasi, kerusakan lingkungan yang lebih besar dan ketidaksetaraan sosial akan terus meningkat.

Teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Inovasi dalam energi terbarukan, pertanian organik, dan efisiensi sumber daya telah membantu mengurangi dampak negatif dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Salah satu contoh nyata adalah perkembangan energi surya dan angin, yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor energi bersih (*IRENA, 2019*). Namun, penting untuk dicatat bahwa teknologi saja tidak cukup untuk mencapai ekonomi berkelanjutan. Perubahan dalam pola konsumsi dan produksi juga diperlukan. Misalnya, konsep *circular economy* atau ekonomi sirkular berusaha untuk menciptakan sistem produksi di mana produk dan material didesain untuk digunakan kembali atau didaur ulang, sehingga mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya baru (*Stahel, 2016*). Dengan demikian, ekonomi berkelanjutan membutuhkan kombinasi antara inovasi teknologi dan perubahan perilaku ekonomi.

Meskipun ekonomi berkelanjutan menawarkan berbagai solusi untuk krisis lingkungan dan sosial, implementasinya di dunia nyata masih menghadapi banyak

tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kemauan politik dan ekonomi untuk beralih dari model pertumbuhan konvensional. Banyak pemerintah dan perusahaan masih tergantung pada industri yang merusak lingkungan, seperti bahan bakar fosil, agribisnis, dan industri manufaktur berat, yang sering kali memprioritaskan keuntungan jangka pendek di atas keberlanjutan jangka panjang (*Newell & Paterson, 2010*). Selain itu, transisi menuju ekonomi berkelanjutan juga menghadapi tantangan dalam hal keadilan sosial. Perubahan besar dalam struktur ekonomi dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat yang rentan, seperti kehilangan pekerjaan di sektor-sektor industri tradisional. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung ekonomi berkelanjutan harus diiringi dengan mekanisme perlindungan sosial untuk memastikan bahwa transisi ini tidak memperburuk ketidaksetaraan sosial, melainkan membantu menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan (*Bina, 2013*).

Dalam politik hijau, ekonomi berkelanjutan dilihat sebagai satu-satunya jalan menuju masa depan yang adil dan lestari. Dengan berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi sumber daya, dan inovasi hijau, ekonomi berkelanjutan menawarkan model alternatif untuk pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Untuk mewujudkan visi ini, politik hijau harus mendorong reformasi kebijakan yang mendukung investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan sistem produksi yang lebih adil dan inklusif. Politik hijau juga harus berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan mendorong perubahan perilaku di tingkat individu dan komunitas. Ini mencakup inisiatif untuk mengurangi konsumsi berlebihan, meningkatkan daur ulang, dan mendukung produk dan jasa yang ramah lingkungan. Dengan demikian, ekonomi berkelanjutan tidak hanya menjadi agenda politik, tetapi juga menjadi bagian integral dari perubahan sosial yang lebih luas menuju masa depan yang berkelanjutan (*Hopwood, Mellor, & O'Brien, 2005*).

Ekonomi berkelanjutan adalah komponen penting dari politik hijau yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, transisi menuju ekonomi berkelanjutan sangat penting untuk menjawab krisis lingkungan dan sosial yang semakin mendesak. Dengan menggabungkan inovasi teknologi, kebijakan yang mendukung keberlanjutan, dan perubahan perilaku masyarakat, ekonomi berkelanjutan dapat menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih adil dan lestari. Keberhasilan

ekonomi berkelanjutan sangat bergantung pada kemauan politik, dukungan dari sektor bisnis, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu memainkan peran kunci dalam mendorong kebijakan hijau yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sementara sektor swasta harus berinovasi dan beradaptasi dengan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat dalam mendukung ekonomi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjangnya.

Ekonomi berkelanjutan adalah konsep yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam politik hijau, konsep ini diterapkan melalui berbagai kebijakan dan inisiatif yang mendukung energi terbarukan, ekonomi sirkular, pajak karbon, dan pertanian berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan, seperti resistensi dari industri tradisional dan kurangnya kesadaran publik, ekonomi berkelanjutan menawarkan peluang besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan dari pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat, ekonomi berkelanjutan dapat menjadi jalan menuju masa depan yang lebih hijau dan sejahtera.

Referensi

- Berkes, F. (2004). Rethinking community-based conservation. *Conservation Biology*, 18(3), 621-630.
- Bina, O. (2013). The green economy and sustainable development: an uneasy balance?. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 31(6), 1023-1047.
- Carter, N. (2018). *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I., ... & Turner, R. K. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. *Global Environmental Change*, 26, 152-158.
- Daly, H. E. (1991). *Steady-State Economics: Second Edition With New Essays*. Island Press.
- Dobson, A. (2007). *Green Political Thought* (4th ed.). Routledge.
- Dryzek, J. S. (2013). *The Politics of the Earth: Environmental Discourses* (3rd ed.). Oxford University Press.

- Eckersley, R. (2004). *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. MIT Press.
- Escobar, A. (2017). *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Duke University Press.
- Frankland, E. G. (2019). The Green Party in Germany: A Success Story? In *Green Parties in Europe* (pp. 1-19). Routledge.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance. *Politics and Society*, 29(1), 5-41.
- Giddens, A. (2009). *The Politics of Climate Change*. Polity Press.
- Goodin, R. E. (1996). *Green Political Theory*. Polity Press.
- Goodland, R., & Daly, H. (1996). Environmental sustainability: universal and non-negotiable. *Ecological Applications*, 6(4), 1002-1017.
- Hopwood, B., Mellor, M., & O'Brien, G. (2005). Sustainable development: mapping different approaches. *Sustainable Development*, 13(1), 38-52.
- IRENA. (2019). *Renewable Energy and Jobs Annual Review 2019*. International Renewable Energy Agency.
- Jackson, T. (2009). *Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet*. Earthscan.
- Jackson, T. (2011). *Prosperity Without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrow* (2nd ed.). Routledge.
- Meadowcroft, J. (2005). From welfare state to ecostate? The evolution of environmental governance. *Environmental Politics*, 14(1), 3-26.
- Newell, P., & Paterson, M. (2010). *Climate Capitalism: Global Warming and the Transformation of the Global Economy*. Cambridge University Press.
- Pateman, C. (2012). Participatory democracy revisited. *Perspectives on Politics*, 10(1), 7-19.
- Smith, G. (2009). *Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation*. Cambridge University Press.
- Stahel, W. R. (2016). Circular economy. *Nature News*, 531(7595), 435.

Steffen, W., Rockström, J., Richardson, K., et al. (2018). Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(33), 8252-8259.

Young, I. M. (2000). *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press.

BAB III

Isu-Isu Utama dalam Politik Hijau

Yendra Erison

1. Perubahan Iklim: Dampak perubahan iklim dan solusi yang ditawarkan oleh politik hijau.

Perubahan Iklim (Climate Change), telah menjadi isu global selama beberapa dekade bagi banyak negara di dunia. Perubahan iklim mulai menjadi isu politik pada tahun 1970-an, dengan upaya aktif dari para aktivis dan pemerintah untuk menangani krisis lingkungan secara global. Sehingga sampai hari ini masih menjadi perhatian dalam berbagai pertemuan dan konferensi internasional yang bertujuan untuk menemukan solusi yang efektif. Pada tahun 1972, PBB menggelar konferensi pertama yang berfokus pada isu lingkungan di Stockholm, Swedia. Dalam konferensi tersebut, dibahas 26 prinsip yang menekankan pentingnya masalah lingkungan sebagai prioritas utama (United Nations, 1972). Menurut laporan Oxfam, sejak tahun 1990 hingga sekarang, hampir 94% bencana alam di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang dan dunia ketiga, disebabkan oleh masalah lingkungan yang memperparah perubahan iklim (Dankelman, 2002) (Kencana, 2023). Dampak perubahan iklim kini semakin nyata, dan hal ini tidak terjadi tanpa sebab. Penyebab utamanya adalah tanggung jawab negara-negara industri yang mengalami pertumbuhan pesat, namun mengabaikan prinsip-prinsip ekologis dalam praktik korporasi mereka.

Secara matematis, pemanasan global tidak terjadi secara mendadak dalam beberapa bulan atau belasan tahun, melainkan merupakan hasil dari akumulasi bertahap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Pemanasan global yang berlangsung lama telah mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Negara-negara berkembang juga merasakan dampaknya, namun mereka seringkali kekurangan sumber daya untuk beradaptasi dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca tersebut. Beberapa dampak negatif meliputi penurunan hasil produksi pangan, gangguan terhadap fluktuasi dan distribusi ketersediaan air, penyebaran hama dan penyakit tanaman, serta pengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi manusia (Lim et al., 2007).

Global Environment Outlook (bagian dari UNEP) melaporkan bahwa tingkat emisi "carbon dioxide" tahun 1990 mencapai 4 kali lipat tahun 1950 dan 65 juta hektar (dari 3500 juta hektar) hutan punah pada periode tahun 1990 – 1995, 70 persen sumber daya ikan di samudra 'over-fished' akibat 'over- capacity' armada penangkapan ikan yang mencapai 40 persen. IPCC memprediksi kenaikan temperatur mencapai 2,5 sampai 10,4 derajat celsius sampai periode seratus tahun mendatang dan permukaan laut telah mengalami kenaikan mencapai 9 inci dan diprediksi naik lagi antara 3,5 sampai 34,6 inci tahun 2100 (Bonn, 2002). Variasi dari indikator tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa perubahan iklim yang terjadi secara masif merupakan tantangan global, tetapi juga menegaskan bahwa perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia.

Lahirnya Protokol Kyoto menandakan kesepakatan global, khususnya dari negara-negara industri, untuk berkomitmen dalam mengurangi dampak gas rumah kaca. Oleh karena itu Protokol Kyoto sendiri adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang, dan mulai berlaku pada tahun 2005. Protokol ini merupakan bagian dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Protokol Kyoto bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca yang merupakan faktor utama pemanasan global.

Kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan dampaknya, terutama terkait perubahan iklim dan bencana alam, telah mendorong gerakan lingkungan di seluruh dunia untuk mengambil berbagai tindakan. Upaya perlindungan lingkungan, baik dalam skala kecil maupun besar, semakin gencar dilakukan. Banyak kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui program-program berkelanjutan dan edukasi, serta didukung oleh berbagai inisiatif lingkungan global, seperti, *Britain Camps for Climate Action (CCA)* (Mattias Wahlstrom, Cris Rootes, 2013), *Sierra Club dan The National Audubon Society di Amerika* (Tokar, 2016b). *German Climate Movement di Jerman* (Tokar, 2016). *The Australian Climate Movement, Green Peace, Friends of The Earth, Forum Brasileiro de Mudancas Climaticas di Brazil, China Civil Climate Action Network (CCAN) di Cina* (Kencana, 2023). Serta *WALHI di Indonesia* (Nilan & Wibawanto, 2019). Selain itu, gerakan-gerakan lingkungan yang berfokus pada ekologi politik feminis juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang krisis lingkungan dan perubahan iklim, seperti gerakan *Chipko di India* (Gullotta et al., 2020) (Santoso, 2015).

Atas dasar itu, Politik hijau, sebagai gerakan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan keadilan sosial, memberikan sejumlah solusi untuk menangani dampak perubahan iklim. Gerakan ini mengusung pendekatan yang tidak hanya berfokus pada isu ekologi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik secara holistik. Berikut adalah beberapa solusi kunci yang diajukan oleh politik hijau dalam menghadapi perubahan iklim:

1. Transisi ke Energi Terbarukan

Transisi ke energi terbarukan merupakan langkah penting dalam mengatasi krisis iklim. Energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, hidroelektrik, dan biomassa, menawarkan alternatif yang bersih dan berkelanjutan dibandingkan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Peralihan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga untuk menciptakan sistem energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan beralih ke sumber energi terbarukan, ketergantungan pada minyak, batu bara, dan gas alam yang merusak lingkungan dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, transisi ini juga membuka peluang ekonomi baru dengan menciptakan lapangan kerja di sektor energi hijau serta mengurangi risiko kerusakan ekosistem. Investasi dalam teknologi terbarukan dan kebijakan yang mendukung penggunaannya diharapkan mampu mempercepat pergeseran global menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

2. Ekonomi Sirkular dan Pengurangan Limbah

Ekonomi sirkular adalah konsep yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dengan cara mengurangi limbah, mendaur ulang, dan menggunakan kembali produk serta material. Berbeda dengan ekonomi linear yang bergantung pada pola "ambil, buat, buang," ekonomi sirkular bertujuan untuk menjaga bahan dalam siklus penggunaan selama mungkin. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban lingkungan tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon dan menghemat sumber daya alam. Salah satu aspek utama dari ekonomi sirkular adalah pengelolaan limbah yang berkelanjutan, termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan daur ulang. Dengan mengurangi limbah yang tidak terurai dan memanfaatkan kembali material, ekonomi sirkular berkontribusi pada pelestarian lingkungan, mendorong inovasi, serta menciptakan peluang ekonomi baru. Implementasi model ini juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas, membantu memerangi perubahan iklim, dan mendukung keseimbangan ekosistem.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Keadilan Iklim

Pemberdayaan masyarakat dan keadilan iklim adalah konsep penting dalam upaya menghadapi perubahan iklim secara inklusif dan adil. Pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim, memastikan bahwa solusi yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini termasuk memberikan edukasi, akses informasi, serta dukungan kepada masyarakat untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, seperti bencana alam dan penurunan kualitas sumber daya alam. Sementara itu, keadilan iklim menekankan pentingnya distribusi yang adil dari beban dan manfaat dalam menangani krisis iklim. Negara-negara berkembang dan komunitas rentan, yang seringkali paling terdampak oleh perubahan iklim namun paling sedikit berkontribusi terhadap emisi karbon global, membutuhkan bantuan dan dukungan dari negara-negara maju yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menciptakan krisis ini. Dengan memperkuat keterlibatan masyarakat dan memastikan keadilan dalam respons terhadap perubahan iklim, kita dapat membangun strategi yang lebih berkelanjutan dan setara dalam menghadapi tantangan iklim global.

4. Pertanian Berkelanjutan dan Pengelolaan Lahan

Pertanian berkelanjutan dan pengelolaan lahan yang bijak adalah kunci dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga ketahanan pangan global. Pertanian berkelanjutan bertujuan untuk menghasilkan pangan dengan cara yang ramah lingkungan, meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Metode seperti agroekologi dan pertanian organik diutamakan, karena dapat meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi erosi, dan memperbaiki kualitas air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, seperti pencegahan deforestasi dan reboisasi, sangat penting untuk menjaga hutan sebagai penyerap karbon alami yang vital bagi mitigasi perubahan iklim. Dengan mengelola lahan secara berkelanjutan, kita dapat

mencegah degradasi tanah, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta memastikan bahwa lahan pertanian tetap produktif dalam jangka panjang. Inisiatif ini tidak hanya membantu mengatasi dampak perubahan iklim, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya alam.

5. Transportasi Ramah Lingkungan

Transportasi ramah lingkungan adalah salah satu strategi utama dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan mengalihkan fokus dari kendaraan berbahan bakar fosil ke sistem transportasi yang lebih bersih, seperti kendaraan listrik, sepeda, dan transportasi umum berbasis energi terbarukan, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Peningkatan infrastruktur untuk transportasi publik, seperti bus dan kereta yang efisien, serta pengembangan jalur sepeda yang aman, turut berkontribusi pada pengurangan kemacetan dan polusi. Selain itu, promosi kendaraan listrik dan pengembangan teknologi baterai yang lebih baik juga menjadi prioritas, karena kendaraan listrik menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel. Melalui pendekatan ini, kita dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan dari sektor transportasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan udara yang lebih bersih dan mobilitas yang lebih efisien.

6. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan pembangunan berkelanjutan berfokus pada menciptakan pertumbuhan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kebijakan ini melibatkan penggunaan sumber daya alam secara efisien, pengelolaan limbah yang efektif, dan perlindungan terhadap ekosistem. Dalam perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur, prinsip-prinsip berkelanjutan diintegrasikan dengan desain yang ramah lingkungan dan efisiensi energi. Selain itu, kebijakan ini mendorong investasi dalam teknologi bersih dan energi terbarukan, serta memastikan keadilan sosial dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga merupakan bagian penting dari kebijakan ini, untuk mendorong praktik berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat, ekonomi yang berkelanjutan, dan masyarakat yang lebih adil.

7. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Pendidikan dan kesadaran lingkungan memainkan peran krusial dalam upaya melawan perubahan iklim dan krisis lingkungan global. Pendidikan lingkungan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu lingkungan, dampak perubahan iklim, dan solusi yang dapat diterapkan untuk melindungi planet kita. Melalui kurikulum yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, program pelatihan, dan kampanye kesadaran publik, masyarakat dapat lebih sadar akan tanggung jawab

mereka terhadap lingkungan dan cara-cara untuk mengurangi jejak ekologis mereka. Kesadaran lingkungan yang tinggi memotivasi individu dan komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam praktek-praktek ramah lingkungan, seperti pengurangan limbah, daur ulang, dan penggunaan energi bersih. Selain itu, program edukasi yang efektif membekali generasi mendatang dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pelopor dalam solusi lingkungan yang inovatif. Dengan meningkatkan kesadaran dan menyediakan pendidikan yang relevan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih peduli dan proaktif dalam menjaga keberlanjutan planet kita untuk masa depan.

8. Pengaturan dan Regulasi yang Lebih Kuat

Pengaturan dan regulasi yang lebih kuat merupakan elemen kunci dalam upaya menangani perubahan iklim dan melindungi lingkungan. Kebijakan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan, industri, dan individu mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Ini termasuk penerapan batasan emisi gas rumah kaca, peraturan pengelolaan limbah, dan standar efisiensi energi yang harus dipatuhi. Regulasi yang kuat juga melibatkan pemberian insentif bagi praktik berkelanjutan, seperti subsidi untuk energi terbarukan dan teknologi bersih, serta penerapan pajak karbon untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dengan penegakan hukum yang efektif, pelanggaran lingkungan dapat diminimalkan dan dampak negatif terhadap ekosistem dapat dikurangi. Pengaturan yang lebih ketat tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan tetapi juga mendorong inovasi dan investasi dalam solusi yang lebih ramah lingkungan. Melalui kebijakan dan regulasi yang komprehensif, kita dapat menciptakan kerangka kerja yang mendukung keberlanjutan dan memastikan bahwa upaya perlindungan lingkungan dilakukan secara konsisten dan efektif (Hayatulah et al., 2023).

2. Keanekaragaman Hayati: Pentingnya keanekaragaman hayati dan ancaman yang dihadapinya.

Penurunan keanekaragaman hayati adalah salah satu masalah lingkungan yang penting. Meskipun Indonesia dikenal sebagai salah satu negara "megadiversity", negara yang memiliki keanekaan hayati yang tinggi di dunia (Iskandar, 2017) yang menawarkan berbagai manfaat dalam hal ekologi, ekonomi, estetika, dan kenyamanan. Tentu, pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi salah satu fokus utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan 17 SDGs (RI, 2022). adalah "Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan ekosistem daratan secara berkelanjutan, mengelola hutan dengan cara yang berkelanjutan, memerangi penggurunan, serta menghentikan dan membalikkan degradasi tanah dan kehilangan keanekaragaman hayati."

Membangun ketahanan sosial sambil mempertahankan keberlanjutan lingkungan adalah faktor kunci dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan memperdalam pemahaman dan kecintaan

masyarakat terhadap keanekaragaman hayati untuk memotivasi mereka dalam pengelolaan yang berkelanjutan.

Fenomena keanekaragaman hayati menggambarkan keragaman kehidupan di bumi yang mencakup variasi spesies, genetik, dan ekosistem. Keanekaragaman spesies mencakup semua makhluk hidup, dari mikroorganisme hingga hewan besar, yang masing-masing memainkan peran penting dalam ekosistem. Keanekaragaman genetik di dalam spesies memastikan kemampuan adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan lingkungan dan penyakit. Sementara itu, keanekaragaman ekosistem meliputi berbagai habitat seperti hutan, padang rumput, dan terumbu karang, yang menyediakan layanan ekosistem vital seperti pembersihan air, pengaturan iklim, dan penyerbukan tanaman. Fenomena ini sangat penting karena mendukung keseimbangan ekologis dan kesehatan planet, serta menyediakan sumber daya dan manfaat esensial bagi kehidupan manusia. Melindungi keanekaragaman hayati adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang (Hayatulah et al., 2023).

Akan tetapi keanekaragaman hayati hingga hari ini di seluruh dunia sedang menghadapi ancaman serius yang menggoyahkan keseimbangan ekosistem dan kehidupan di bumi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan biodiversitas adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, urbanisasi, dan perluasan lahan pertanian. Selain itu, perubahan iklim yang memperburuk kondisi lingkungan, polusi yang merusak ekosistem darat dan laut, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan juga mempercepat penurunan jumlah spesies. Kehadiran spesies invasif yang menyebar akibat aktivitas manusia semakin mengancam flora dan fauna asli. Gabungan dari masalah-masalah ini tidak hanya mengancam kelangsungan spesies, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup manusia, terutama bagi mereka yang bergantung pada sumber daya alam. Diperlukan upaya global yang lebih terkoordinasi dan efektif untuk melindungi serta memulihkan keanekaragaman hayati yang kian terancam (Setiawan & Erison, 2024).

Atas hal itu, kesadaran akan pentingnya peran biodiversitas bagi kehidupan di bumi, serta kekhawatiran atas semakin memburuknya keanekaragaman hayati, telah menjadi perhatian para pakar dan pemimpin dunia sejak akhir abad lalu. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brasil, tahun 1992, diambil keputusan penting yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan planet ini. Dalam pertemuan yang bertepatan dengan peringatan 20 tahun Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972, para pemimpin politik, ilmuwan, media, dan perwakilan organisasi non-pemerintah dari 179 negara sepakat untuk mengambil langkah penting. Fokus pertemuan tersebut adalah menangani dampak aktivitas sosial-ekonomi manusia terhadap lingkungan. Mereka menyusun agenda komprehensif dan cetak biru untuk aksi internasional bersama terkait lingkungan hidup dan pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama bagi semua pihak. Keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Diperlukan perspektif baru dalam cara kita memproduksi dan mengonsumsi,

bagaimana kita hidup dan bekerja, bagaimana kita menjaga kelestarian sumber daya alam, serta bagaimana kita membuat keputusan demi menciptakan ekonomi yang berkelanjutan (Sukara, 2008).

Salah satu pencapaian dari konferensi dunia adalah tercapainya kesepakatan untuk membentuk Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang dikenal sebagai Convention on Biodiversity (CBD). Tanggal penandatanganan konvensi ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati atau International Day for Biodiversity, yang diperingati setiap 22 Mei. Perayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati serta perlunya pelestarian. Ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi kondisi biodiversitas setiap tahun dan menyoroti kebutuhan mendesak dalam memulihkan ekosistem yang rusak. Peringatan ini juga menekankan pentingnya kerja sama dari semua pihak, terutama komunitas lokal dan kaum muda. Partisipasi komunitas lokal dalam inisiatif terkait keanekaragaman hayati sangat penting, karena mereka bergantung pada biodiversitas untuk mata pencaharian dan memiliki pengetahuan turun-temurun tentang kondisi lingkungan di sekitarnya. Perayaan ini diharapkan menjadi kesempatan untuk berbagi informasi, teknik, praktik terbaik, serta pembelajaran di antara masyarakat yang terlibat. Termasuk juga dalam kegiatan restorasi, bertujuan untuk merumuskan strategi yang efektif demi mencapai tujuan inisiatif tersebut (Utami & Sebrina, 2024).

Begitu pula dengan peran generasi muda. Mereka perlu memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dan harus dilibatkan dalam upaya konservasi serta pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan alasan berikut:

- Generasi muda memainkan peran krusial dalam menentukan masa depan. Mereka harus terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati serta sumber daya alam lainnya agar dapat memahami, mengembangkan keterampilan, dan menerapkan strategi serta perilaku yang mendukung tujuan tersebut.
- Pendidikan membantu generasi muda memahami keanekaragaman hayati dan manfaatnya dengan lebih baik. Hal ini dapat memandu mereka untuk mengadopsi gaya hidup yang mendukung konservasi dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.
- Generasi muda diharapkan dapat mengembangkan ide-ide yang cerdas, solutif, dan inovatif untuk mengatasi berbagai masalah global, seperti penurunan keanekaragaman hayati, dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan kemajuan ilmiah.
- Generasi muda dapat bekerja sama dengan pengambil keputusan, ilmuwan, dan pihak lainnya untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul.
- Generasi muda perlu didorong untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, sebagai langkah penting untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan.

Dari kelima alasan tadi menegaskan bahwa pentingnya keikutsertaan generasi muda dalam melindungi, menjaga, merawat dan melestarikan keanekaragaman hayati demi

terjaganya bumi di masa yang akan datang. Karena sejatinya apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Artinya, jika kita hari ini semua elemen, semua generasi bersama-sama melindungi, menjaga, merawat dan melestarikan keanekaragaman hayati yang kita miliki hari ini, maka tidak dapat dipungkiri kita juga akan mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita hari ini acuh ataupun tidak peduli terhadap kelangsungan dan kelestarian keanekaragaman hayati yang kita miliki. Jangan disesali kelangkaan, kepunahan bahkan kehancuran di masa yang akan datang pun tidak bisa dihindarkan.

Sehingga tindakan melindungi, menjaga, merawat dan melestarikan keanekaragaman hayati sesuai dengan hasil pertemuan terakhir Konvensi Biodiversitas (CoP 15) berlangsung secara paralel di Kunming, Tiongkok dan Montreal, Kanada, Desember 2022. Kesepakatan visi 2050 dan 23 target 2030 telah dihasilkan untuk melindungi dan merestorasi alam, melindungi biodiversitas, dan mencegah kepunahan spesies. Rencana tersebut berfokus pada beberapa bidang, antara lain melawan kehilangan biodiversitas, mengurangi polusi dan limbah, menangani perubahan iklim, serta mempromosikan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkelanjutan. Target yang telah disepakati antara lain meliputi:

- Melestarikan dan merestorasi ekosistem
- Meningkatkan ketangguhan biodiversitas terhadap perubahan iklim
- Peningkatan keragaman genetik hewan dan tanaman peliharaan
- Menjamin bahwa manfaat dari biodiversitas dapat didistribusikan secara merata.

3. Pencemaran: Jenis-jenis pencemaran dan upaya untuk mengatasinya.

Lingkungan biasanya dipahami sebagai segala sesuatu yang mengelilingi kehidupan atau organisme. Lingkungan mencakup semua elemen di sekitar kita yang dapat memengaruhi kehidupan individu maupun masyarakat di suatu tempat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan erat kaitannya dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Manusia sekalipun yang diberi akal dan pikiran, yang sekiranya mampu mengolah, menjaga, melestarikan dan merawat lingkungan. Akan tetapi tidak sedikit pula dari manusia yang memiliki pikiran dan tindakan dengan tanpa rasa bersalah merusak lingkungan. Isu pencemaran adalah masalah global yang sering diperbincangkan. Penanganan serius dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi dampak negatif yang timbul dan mencegah pencemaran lingkungan. Pencemaran terjadi ketika siklus materi di lingkungan mengalami perubahan yang mengganggu keseimbangan struktur dan fungsi. Ketidakseimbangan ini bisa disebabkan oleh proses alam atau aktivitas manusia (Erison et al., 2023).

Seiring dengan kemajuan peradaban, perbaikan kualitas hidup, dan pertumbuhan populasi, pembangunan di berbagai sektor terus berkembang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Manusia merupakan satu-satunya komponen biotik dalam Lingkungan Hidup yang mampu secara sengaja mengubah maupun memperbaiki kondisi lingkungan. Fenomena ini diiringi oleh perubahan sosial budaya yang semakin

materialistik dan konsumtif, serta perkembangan teknologi dan politik yang pesat, yang menyebabkan munculnya persoalan baru yang disebut dengan pencemaran lingkungan. Akibatnya, banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) seringkali diubah fungsinya menjadi kawasan perkantoran, pemukiman, pusat perdagangan, industri, pelabuhan, bandara, dan berbagai fasilitas lainnya.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi memiliki dua aspek yang berbeda. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi yang cepat akan banyak membuka lowongan kerja dan tentunya menyerap banyak tenaga kerja, mengoptimalkan penggunaan faktor produksi, dan menghasilkan pendapatan nasional yang melimpah. Di sisi lain, para ekonom menyatakan bahwa aktivitas ekonomi yang berlangsung dengan cepat dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena sisa-sisa yang dihasilkan selama proses tersebut dapat menyebabkan degradasi dan kerusakan lingkungan. Adapun jenis kerusakan maupun pencemaran lingkungan yang dimaksud sebagai berikut.

- **Pencemaran Udara**

Pencemaran udara terjadi ketika atmosfer tercemar oleh zat berbahaya seperti bahan kimia dan partikel yang mengurangi kualitas udara, serta berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan. Sumber utama polusi udara berasal dari aktivitas manusia, termasuk emisi kendaraan bermotor yang menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO_x), dan hidrokarbon. Industri dan pabrik juga menyumbang polusi dengan melepaskan sulfur dioksida (SO₂), karbon dioksida (CO₂), serta partikel halus seperti PM2.5 dan PM10. Pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara dan minyak, serta kebakaran hutan turut meningkatkan polutan di udara. Polusi udara dapat memicu berbagai masalah kesehatan serius, seperti gangguan pernapasan, termasuk asma, bronkitis, hingga kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara mempercepat pemanasan global dan perubahan iklim melalui efek rumah kaca. Hujan asam yang terbentuk dari sulfur dioksida dan nitrogen oksida merusak ekosistem, menghancurkan vegetasi, dan mengganggu kualitas air dan tanah. Semua faktor ini menjadikan pencemaran udara ancaman besar bagi kehidupan dan kelestarian lingkungan.

- **Pencemaran Air**

Pencemaran air terjadi ketika zat-zat berbahaya, seperti bahan kimia, limbah, atau mikroorganisme, masuk ke dalam sumber air seperti sungai, danau, laut, atau air tanah, sehingga menurunkan kualitas air dan mengganggu kehidupan akuatik serta kesehatan manusia. Sumber utama pencemaran air berasal dari aktivitas manusia, seperti limbah industri yang mengandung bahan beracun seperti logam berat (misalnya merkuri dan timbal), pestisida, serta bahan kimia organik. Limbah rumah tangga, termasuk sampah, deterjen, dan kotoran, juga dapat mencemari air jika pengelolaannya tidak memadai. Di bidang pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan pencemaran air melalui aliran permukaan yang membawa zat-zat ini ke badan air. Tumpahan minyak dari kapal tanker atau pengeboran minyak di lepas pantai menciptakan lapisan minyak di permukaan laut, yang sangat berbahaya bagi makhluk

laut. Dampak pencemaran air meliputi ancaman terhadap kehidupan organisme air, seperti ikan, terumbu karang, dan makhluk akuatik lainnya, serta kerusakan ekosistem perairan. Bagi manusia, air yang tercemar menjadi tidak layak konsumsi dan dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, kolera, serta keracunan logam berat. Selain itu, pencemaran air mengurangi hasil sektor perikanan dan pertanian, serta meningkatkan biaya pengolahan air untuk keperluan sehari-hari. Jika tidak segera ditangani, masalah ini akan memperburuk krisis air bersih dan membahayakan kelestarian lingkungan serta kesehatan global.

- **Pencemaran Tanah**

Pencemaran tanah terjadi ketika tanah terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya atau polutan yang merusak ekosistem dan menurunkan kualitas serta produktivitas tanah. Penyebab utamanya adalah aktivitas manusia, seperti pembuangan limbah industri yang mengandung logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan bahan kimia beracun. Penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan dalam pertanian juga berkontribusi, karena residunya meresap ke dalam tanah, merusak kesuburan dan organisme tanah. Limbah plastik yang sulit terurai serta tumpahan minyak dari industri turut mencemari tanah dan mengurangi kesuburannya. Dampaknya termasuk penurunan hasil panen, hilangnya nutrisi, dan gangguan ekosistem tanah. Pencemaran ini juga dapat mencemari air tanah, yang berisiko bagi kesehatan manusia dan hewan, serta menyebabkan penyakit serius akibat paparan bahan kimia berbahaya. Secara keseluruhan, pencemaran tanah memberikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan manusia.

- **Pencemaran Suara**

Pencemaran suara atau kebisingan terjadi ketika suara berlebihan atau tidak diinginkan melebihi batas normal, mengganggu kenyamanan dan keseimbangan hidup manusia serta hewan. Sumber utamanya adalah aktivitas manusia, seperti lalu lintas kendaraan bermotor, industri, dan konstruksi yang menggunakan mesin berat, serta bandara dan tempat hiburan yang menghasilkan suara keras. Dampaknya pada manusia mencakup gangguan fisik dan mental, seperti stres, gangguan tidur, kelelahan, penurunan konsentrasi, bahkan gangguan pendengaran dan masalah jantung. Pada hewan, kebisingan mengganggu komunikasi, migrasi, dan perilaku, terutama bagi satwa liar yang bergantung pada suara. Pencemaran suara ini sering kali diabaikan, tetapi sangat memengaruhi kualitas hidup manusia dan keseimbangan alam.

- **Pencemaran Cahaya**

Pencemaran cahaya terjadi ketika penggunaan cahaya buatan yang berlebihan atau tidak tepat mengganggu lingkungan dan kehidupan makhluk hidup, terutama pada malam hari. Ini terjadi ketika lampu jalan, papan reklame, lampu gedung, atau stadion menerangi area yang tidak membutuhkan cahaya. Bentuk pencemaran cahaya meliputi skyglow yang membuat langit malam di kota terlalu terang sehingga bintang sulit terlihat, glare yang menyilaukan, dan light trespass yang menerangi area yang seharusnya gelap. Dampaknya memengaruhi satwa nokturnal, seperti burung dan serangga, dengan mengganggu ritme alami mereka, termasuk pola migrasi dan makan. Pada manusia, pencemaran cahaya dapat mengganggu ritme sirkadian yang mengatur pola tidur dan kesehatan, meningkatkan risiko insomnia dan penyakit kronis. Selain itu, pencemaran

cahaya menyulitkan pengamatan astronomi karena langit malam menjadi terlalu terang. Dengan meningkatnya urbanisasi, masalah ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesejahteraan makhluk hidup.

- **Pencemaran Radioaktif**

Pencemaran radioaktif merujuk pada kontaminasi lingkungan oleh zat radioaktif yang memancarkan radiasi berbahaya, biasanya disebabkan oleh kecelakaan nuklir, pengelolaan limbah yang buruk, atau uji coba senjata nuklir. Insiden besar seperti Chernobyl dan Fukushima telah melepaskan radiasi ke udara, mencemari tanah dan air dalam jangka panjang. Dampak dari pencemaran ini sangat serius, termasuk penyakit radiasi akut, peningkatan risiko kanker, dan mutasi genetik. Radiasi juga merusak ekosistem, mempengaruhi tanaman, hewan, dan mikroorganisme, serta mencemari sumber daya alam yang sulit dipulihkan. Pencemaran radioaktif tidak hanya mengancam kesehatan manusia dan hewan, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi yang berkepanjangan, menjadikannya salah satu bentuk pencemaran paling berbahaya dan sulit ditangani (Nugraha et al.,2021).

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencemaran memberikan dampak besar pada kesehatan manusia, ekosistem, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Pencemaran udara mengganggu pernapasan dan berkontribusi pada perubahan iklim; pencemaran air merusak kehidupan akuatik dan mengancam kesehatan; pencemaran tanah mengurangi kesuburan dan mempengaruhi rantai makanan; pencemaran suara menimbulkan stres dan masalah kesehatan; pencemaran cahaya mengganggu ritme alami; dan pencemaran radioaktif dapat menyebabkan penyakit serius serta kerusakan ekosistem jangka panjang. Oleh karena itu, upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik sangat diperlukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran, demi menjaga keseimbangan alam dan kesehatan generasi mendatang.

Diantaranya upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Pertama, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan mengenai dampak pencemaran dan pentingnya menjaga lingkungan. Regulasi dan kebijakan yang ketat, seperti undang-undang tentang pengelolaan limbah dan emisi, harus diimplementasikan dan diawasi dengan saksama. Mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan sistem pengolahan limbah yang efisien, juga merupakan langkah penting. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, praktik pertanian organik, dan promosi daur ulang dapat membantu mengurangi limbah dan pencemaran. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti bersih-bersih dan penanaman pohon, akan memperkuat usaha tersebut. Infrastruktur hijau, seperti taman kota dan jalur hijau, juga berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dan pengurangan polusi. Pemantauan rutin terhadap kualitas lingkungan dan kerja sama internasional untuk menangani isu pencemaran lintas batas adalah langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Dengan menerapkan

strategi-strategi ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sebagai negara yang strategis di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, tersebar luas di daratan dan lautan. Kekayaan alam ini merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia untuk digunakan demi kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam berada di bawah pemerintah untuk mengatur penggunaannya demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hanya bertindak sebagai wakil dari rakyat yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya alam, namun pemilik sebenarnya dari sumber daya tersebut adalah seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan undang-undang.

Sumber daya alam, baik yang bersifat biotik maupun abiotik, merupakan kekayaan bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi hewan, tumbuhan, air, dan udara, sementara yang tidak dapat diperbarui mencakup emas, perak, dan minyak bumi. Sumber daya alam memiliki peran penting sebagai modal dalam pertumbuhan ekonomi dan sebagai penunjang kehidupan. Hasil hutan, laut, perikanan, pertambangan, dan pertanian berkontribusi terhadap PDB nasional dan membuka lapangan pekerjaan (HANUM et al., 2015). Maka tidak bisa dipungkiri sumber daya alam memiliki arti yang mendalam bagi kehidupan manusia. Bagi berbagai komunitas di Indonesia, kekayaan alam bukan hanya sekedar sumber pendapatan ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas sosial, budaya, dan politik mereka. Di setiap pelosok nusantara, dari hutan-hutan Kalimantan hingga pesisir Papua, sumber daya alam memainkan peran sentral dalam membentuk peradaban. Setiap suku dan budaya memiliki cara pandang yang unik terhadap bagaimana mereka mengelola dan menguasai kekayaan alam di sekitarnya. Bagi mereka, alam bukan hanya sekedar alat,

melainkan juga penopang kehidupan dan simbol keberadaan mereka di dunia ini (Hidayat, 2011). Dikarenakan dalam persepsi yang berkembang, masyarakat adat melihat diri mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta, dengan hubungan yang saling terkait, bergantung satu sama lain, dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, penting untuk membentuk hubungan yang harmonis, seimbang, dan selaras agar tercipta keselarasan antara manusia dan lingkungannya.

Akan tetapi, hingga hari ini kegiatan industri ekstraktif yang mengeksploitasi alam tidak hanya menyebabkan berkurangnya hutan yang berperan menyerap emisi karbon dioksida, tetapi juga mempercepat pemanasan global dan mengancam mata pencaharian puluhan juta masyarakat adat. Hal ini terlihat dari hasil penelitian dari WALHI mengungkapkan bahwa 159 juta hektar lahan telah disediakan untuk investasi industri ekstraktif. Dari jumlah tersebut, 82,91% daratan dan 29,75% wilayah laut secara resmi dikuasai oleh korporasi. Selain itu, menurut data IPBES tahun 2018, Indonesia kehilangan hutan seluas 680 ribu hektar setiap tahun, menjadikannya yang tertinggi di Asia Tenggara. Sementara itu, data dari KLHK mencatat bahwa dari 105 sungai yang ada, 101 di antaranya mengalami pencemaran dengan tingkat sedang hingga berat. Bukan hanya itu, antara tahun 2013 hingga 2019, WALHI menemukan fakta mengejutkan bahwa penguasaan lahan sawit di Indonesia hanya dikuasai oleh 25 taipan. Total hutan yang mereka kendalikan mencapai 12,3 juta hektar, dan dari luas tersebut, 5,8 juta hektar telah diubah menjadi perkebunan sawit setelah mendapatkan izin. Padahal di Indonesia terdapat 50-70 juta masyarakat adat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya dari hutan (WALHI, 2021).

Dewasa ini menjelaskan sebagian dari banyaknya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh para *free riders* atau disebut juga dengan penunggang gratis. Dikatakan demikian, karena para penunggang gratis ini hanya sebagai penikmat ataupun sekedar menikmati atas kerusakan yang mereka lakukan tetapi mereka tidak dirugikan dari apa yang mereka lakukan tersebut. Sehingga perilaku buruk seperti itu sangat mudah dilakukan ketika norma yang dapat mengikatnya semakin memudar, disertai dengan lemahnya penegakan hukum. Hal inilah yang terjadi di Indonesia. Dua kenyataan dapat menjadi tolak ukur atau faktor yang menjadi penyebab serta akibat yang ditimbulkannya (Kuswoyo, 2024).

Masalah tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah upaya pendidikan lingkungan hidup yang telah dilakukan selama ini belum maksimal. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan hanya mencakup area sekitar tempat tinggal kita? Dan apakah masyarakat kini mengalami krisis kepedulian terhadap lingkungan? Situasi ini perlu kita diskusikan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Pembahasan tentang lingkungan alam atau lingkungan hidup tetap relevan untuk masa kini dan seterusnya (As'ari, 2018)(Erison et al., 2023). Oleh sebab itu, Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci dan komprehensif mengenai cara melakukannya:

1) Pengelolaan yang Efisien

Sumber daya alam seperti mineral, air, hutan, dan bahan bakar fosil terbatas. Pengelolaan yang efisien melibatkan penggunaan sumber daya secara efektif dan dengan kerugian minimal. Ini melibatkan:

- **Optimalisasi Penggunaan Teknologi:** Teknologi canggih, seperti sensor cerdas dan sistem otomatisasi, dapat membantu meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.
- **Pengurangan Pemborosan:** Pemborosan sumber daya bisa dikurangi dengan merancang ulang proses produksi dan konsumsi. Misalnya, dalam industri manufaktur, material sisa bisa diolah kembali untuk mengurangi kebutuhan bahan baku.
- **Mendorong Produksi yang Berkelanjutan:** Industri-industri perlu menerapkan prinsip "ekonomi sirkular", di mana barang-barang yang diproduksi dirancang untuk digunakan, diperbaiki, didaur ulang, dan diproduksi kembali secara berulang.

2) Penggunaan Energi Terbarukan

Menggunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya, angin, dan air, dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas dan berdampak buruk pada lingkungan. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung penggunaan energi terbarukan termasuk:

- **Investasi dalam Teknologi Terbarukan:** Teknologi untuk menghasilkan energi terbarukan, seperti panel surya dan turbin angin, harus lebih terjangkau dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.
- **Mendukung Riset dan Inovasi:** Pemerintah dan industri perlu terus berinvestasi dalam riset yang mengembangkan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien, seperti baterai penyimpanan energi dan pembangkit listrik berbasis air.
- **Diversifikasi Sumber Energi:** Jangan hanya bergantung pada satu jenis energi terbarukan; penting untuk memanfaatkan berbagai jenis sumber energi sesuai dengan potensi geografis dan lingkungan lokal.

3) Rehabilitasi dan Reklamasi Lahan

Sumber daya alam sering dieksploitasi dari lahan atau wilayah tertentu. Setelah pengambilan sumber daya seperti kayu, mineral, atau minyak, biasanya area tersebut mengalami kerusakan. Tujuan dari reklamasi dan rehabilitasi adalah untuk memulihkan ekosistem yang terganggu dan mengembalikan fungsi alamnya. Beberapa contoh penerapan:

- **Reboisasi dan Penghijauan:** Setelah hutan ditebang, lahan harus segera direboisasi untuk mengembalikan tutupan hutan dan mengurangi erosi tanah serta meningkatkan biodiversitas.
- **Reklamasi Tambang:** Lahan bekas tambang yang telah digali perlu dipulihkan dengan menanam vegetasi lokal dan memastikan struktur tanahnya kembali stabil.
- **Pemulihan Ekosistem:** Ekosistem pesisir, seperti hutan bakau dan terumbu karang yang rusak akibat pembangunan atau polusi, harus dipulihkan dengan pendekatan berbasis komunitas dan teknologi restorasi yang efektif.

4) Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang

Pengelolaan limbah yang baik dapat mengurangi kebutuhan terhadap eksploitasi sumber daya baru. Dengan mendaur ulang bahan-bahan, kita dapat mengurangi penggunaan bahan mentah dan polusi. Langkah-langkah yang bisa diambil antara lain:

- Pendaaurulangan Material: Bahan seperti plastik, kaca, kertas, dan logam dapat didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses produksi.
- Desain Produk untuk Daur Ulang: Produk dirancang dengan mempertimbangkan daur ulang sejak awal, sehingga bahan-bahannya mudah dipisahkan dan digunakan kembali.
- Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai: Mengurangi produksi dan konsumsi plastik sekali pakai yang tidak dapat terurai adalah langkah penting untuk mengurangi limbah global.

5) Konservasi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hilangnya satu spesies dapat mengganggu rantai makanan dan fungsi ekosistem secara signifikan. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk melindungi keanekaragaman hayati termasuk:

- Perlindungan Habitat: Membangun kawasan lindung seperti taman nasional, suaka margasatwa, atau cagar alam untuk melindungi spesies dari gangguan manusia.
- Penghentian Deforestasi: Menjaga hutan yang menjadi habitat bagi jutaan spesies adalah langkah penting dalam mempertahankan keanekaragaman hayati.
- Penegakan Hukum yang Ketat: Memberlakukan peraturan yang ketat untuk mencegah perburuan liar, perdagangan hewan langka, dan penebangan hutan secara ilegal.

6) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Masyarakat perlu diberi pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan dengan:

- Kampanye Kesadaran Lingkungan: Menggunakan media dan pendidikan formal untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang pentingnya melindungi sumber daya alam.
- Pelatihan dan Sertifikasi: Menyediakan pelatihan bagi pekerja industri dalam pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam proyek konservasi dan pemulihan lingkungan.

7) Peraturan dan Kebijakan Lingkungan

Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui regulasi yang efektif. Beberapa aspek kebijakan meliputi:

- Standar Lingkungan: Menetapkan standar ketat tentang emisi, pencemaran, dan praktik penambangan serta penebangan untuk meminimalkan dampak lingkungan.

- Insentif bagi Perusahaan Hijau: Memberikan insentif fiskal, seperti pengurangan pajak atau subsidi, kepada perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- Penghargaan atas Inovasi Berkelanjutan: Memberikan penghargaan kepada bisnis dan komunitas yang berhasil menerapkan inovasi dalam keberlanjutan sumber daya.

8) Pengelolaan Air yang Bijak

Air merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital namun rentan terhadap bahaya pencemaran dan overutilisasi. Beberapa langkah pengelolaan air yang bijak meliputi:

- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Melindungi daerah tangkapan air dan ekosistem sungai untuk memastikan ketersediaan air yang bersih dan sehat.
- Teknologi Hemat Air: Mengembangkan dan mempromosikan teknologi hemat air, seperti irigasi tetes untuk pertanian, dan sanitasi ramah lingkungan di perkotaan.
- Pengolahan Air Limbah: Memastikan bahwa air limbah diproses sebelum dibuang ke alam untuk mencegah pencemaran sumber air.

9) Penguatan Partisipasi Lokal

Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam penting karena memiliki pengetahuan tradisional yang berharga dan kepentingan langsung dalam keberlanjutan lingkungan mereka. Langkah-langkahnya:

- Pengelolaan Berbasis Komunitas: Memberdayakan komunitas lokal untuk mengelola hutan, sungai, dan sumber daya lainnya dengan memperhatikan kearifan lokal.
- Bagi Hasil yang Adil: Masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber daya yang dikelola, termasuk melalui pariwisata berbasis alam dan hasil hutan non-kayu.

Dengan pendekatan yang terpadu ini, pengelolaan sumber daya alam dapat menjamin ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang, sambil juga mempertahankan keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup manusia.

Referensi

- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, F. U. N. (2021). Peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. *Hukum Tora*, 7(2), 283-298. <https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295>
- As'ari, R. (2018). *PENGETAHUAN DAN SIKAP MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HUBUNGANNYA DENGAN PERILAKU MENJAGA KELESTARIAN KAWASAN BUKIT SEPULUH RIBU DI KOTA TASIKMALAYA*. 4(1), 9-18.
- Bonn. (2002). *A GUIDE TO THE CLIMATE CHANGE CONVENTION AND ITS*.
- Dankelman, I. (2002). Climate change: Learning from gender analysis and women's experiences of organising for sustainable development. *Gender and Development*, 10(2), 21-29. <https://doi.org/10.1080/13552070215899>
- Erison, Y., Sholikin, A., Surur, M., & Mabururi, M. A. (2023). " *Leadership and Smart*

Environment Policy " Studi Kasus Implementasi Smart Environment di Pekanbaru. 15(3), 521-535.

Gullotta, G., Loret, E., Stewart, C., & Sarti, F. (2020). *Traffic Attractors and Congestion in the Urban Context , the Case of the City of Rome.* 545-559.
<https://doi.org/10.4236/jgis.2020.126032>

HANUM, F., NUGRAHANI, E. H., & SUSANTI, S. (2015). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan Dalam Model Sewa Ekonomi. *Journal of Mathematics and Its Applications*, 14(2), 57-69. <https://doi.org/10.29244/jmap.14.2.57-69>

Hayatulah, G. E., Mahasari, J., Ihsan, M., Bagus, M., Wicaksono, A., & Alhamda, S. (2023). *No Title.* 5(2), 266-276.

Hidayat. (2011). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal. *Pengelolaan Sumber Daaya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*, 19-32.

Iskandar, J. (2017). Etnobiologi dan Keragaman Budaya di Indonesia. *Umbara*, 1(1), 27-42. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9602>

Kencana, N. (2023). " *Green Aisyiyah " : Praksis Ekofeminis Gerakan Aisyiyah dalam Mengatasi Perubahan Iklim di Indonesia.* 8(3), 158-166.

Kuswoyo. (2024). *Politik Perusakan Lingkungan.* Koran.Tempo.Co.
<https://koran.tempo.co/read/opini/488223/sebab-akibat-korupsi-sumber-daya-alam>

Lim, S. Il, Park, D. H., Lee, S. J., Han, S. S., & Choi, M. S. (2007). Reliability Enhancement Scheme for IEC61850 Based Substation Automation System. *Power Plants and Power Systems Control 2006*, 207-211. <https://doi.org/10.1016/B978-008046620-0/50035-9>

Mattias Wahlstrom, Cris Rootes, M. W. (2013). Studying Global Environmental Meetings. *Global Environmental Politics*, 13(August), 46-64. <https://doi.org/10.1162/GLEP>

Nilan, P., & Wibawanto, G. R. (2019). *Using the work of Beck to Analyse Indonesian Student Activists and Forms of Risk Is environmental engineering environmen- tally informed ?* 8(1992).

RI, B. (2022). *Peran BPK RI dalam SDGs.*
https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_page_1652255145.pdf

Santoso, W. Y. (2015). *Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.* 1(3), 371-390.

Setiawan, H., & Erison, Y. (2024). *Rivalry of Issues in the Public Sphere : How are Ecologycal Issues Positioned in the 2019 Political Party campaigns ?* 2(1), 34-41.

Sukara, E. (2008). *Industri berbasis keanekaragaman hayati, masa depan indonesia.* 01(2), 1-12.

Tokar, B. (2016a). *The Greens as a Social Movement : Values and Conflicts.* January 2006.

Tokar, B. (2016b). *The Greens as a Social Movement. The Left Libertarianism of the Greens, January 2006,* 95-125. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39263-4_4

- United Nations. (1972). *United Nations Conference on the Human Environment, 5-16 June 1972, Stockholm*. United Nations.
<https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>
- Utami, L. F., & Sebrina, N. (2024). *Pengaruh Rating Risiko ESG dan Pengungkapan Keanekaragaman Hayati terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan* 1,2. 6(3), 1241-1256.
- WALHI. (2021). *Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global*. Wwww.Walhi.or.Id. <https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global>

BAB IV

Gerakan Hijau di Seluruh Dunia

Ahmad Sholikin

1. Sejarah Gerakan Hijau di Dunia

Gerakan hijau atau *green movement* muncul sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industrialisasi dan urbanisasi yang pesat. Gerakan ini berfokus pada pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola berkelanjutan. Pada awalnya, gerakan hijau dimulai sebagai protes lokal terhadap masalah lingkungan tertentu, tetapi seiring waktu berkembang menjadi gerakan global yang mempengaruhi kebijakan publik, ekonomi, dan budaya (Miller, 2012). Dalam politik hijau, gerakan ini sering kali dikaitkan dengan advokasi untuk transisi menuju ekonomi berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, dan demokrasi partisipatif. Gerakan hijau atau gerakan lingkungan hidup merupakan salah satu respons global terhadap berbagai ancaman yang muncul akibat kerusakan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim, polusi udara, degradasi lahan, serta penurunan keanekaragaman hayati menjadi isu-isu utama yang menggugah kesadaran publik dan memobilisasi berbagai kelompok masyarakat untuk bertindak. Munculnya gerakan hijau ini menunjukkan bahwa ada kesadaran kolektif di antara individu, organisasi, dan pemerintah di seluruh dunia akan pentingnya melestarikan lingkungan demi generasi mendatang.

Gerakan hijau dapat dilacak kembali ke akhir abad ke-19, ketika dampak negatif dari revolusi industri mulai dirasakan. Ketergantungan pada bahan bakar fosil, deforestasi yang meluas, serta pencemaran air dan udara mengancam keseimbangan ekosistem. Pada saat itu, muncul kekhawatiran di kalangan para ilmuwan, filsuf, dan aktivis tentang dampak destruktif industrialisasi terhadap alam. Hal ini kemudian memunculkan kelompok-kelompok advokasi yang mengusung perlindungan alam sebagai fokus utama mereka. Salah satu gerakan yang paling menonjol pada awal abad ke-20 adalah munculnya taman nasional di Amerika Serikat, yang bertujuan untuk melindungi wilayah-wilayah alam liar dari eksploitasi manusia. Gerakan hijau modern berakar pada protes dan pergerakan sosial yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Pada masa ini, industrialisasi yang masif mengakibatkan degradasi lingkungan, terutama polusi udara dan air, yang memicu reaksi dari kelompok masyarakat yang peduli akan lingkungan. Salah satu momen penting dalam sejarah

gerakan hijau adalah penerbitan buku Rachel Carson berjudul *Silent Spring* pada tahun 1962, yang memperingatkan publik tentang bahaya penggunaan pestisida dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Buku ini menandai awal dari gerakan lingkungan modern di Amerika Serikat dan memperluas kesadaran global tentang masalah ekologi (Carson, 1962).

Selain itu, berbagai peristiwa lingkungan yang mengerikan pada abad ke-20, seperti insiden kebocoran gas di Bhopal (1984) dan kecelakaan nuklir Chernobyl (1986), memperkuat sentimen publik tentang perlunya perlindungan lingkungan. Insiden-insiden ini mengarah pada pembentukan berbagai organisasi lingkungan internasional dan gerakan akar rumput yang mendukung aksi langsung untuk melindungi bumi dari eksploitasi yang tidak terkendali (Guha, 2000). Namun, gerakan lingkungan baru mendapatkan momentum yang signifikan pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah publikasi buku Rachel Carson yang berjudul *Silent Spring* pada tahun 1962. Buku ini mengungkapkan dampak buruk penggunaan pestisida terhadap lingkungan, terutama pada populasi burung, dan menjadi salah satu pemicu kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Setelah *Silent Spring*, berbagai organisasi lingkungan mulai bermunculan dan memperluas cakupan perjuangan mereka, dari isu-isu lokal hingga masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan penipisan lapisan ozon.

Pada era globalisasi, gerakan hijau telah melampaui batas-batas negara. Organisasi lingkungan internasional seperti Greenpeace, Friends of the Earth, dan World Wildlife Fund (WWF) menjadi aktor penting dalam mengadvokasi kebijakan lingkungan di tingkat global. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk menghadapi tantangan-tantangan lingkungan yang bersifat lintas batas, seperti polusi udara dan air yang merugikan wilayah luas, pencemaran laut, serta emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Selain itu, Konferensi Stockholm pada tahun 1972 menandai salah satu langkah penting dalam upaya internasional untuk mengatasi masalah lingkungan. Pada konferensi ini, negara-negara mulai menyepakati perlunya kerja sama global dalam menangani isu-isu ekologi. Kemudian, pada 1992, Konferensi Rio de Janeiro menghasilkan Deklarasi Rio yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan sebagai solusi bagi masalah

lingkungan dan ekonomi yang saling berkaitan. Deklarasi ini mendorong banyak negara untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih ramah alam.

Dengan meningkatnya kesadaran tentang krisis iklim, gerakan hijau juga semakin banyak mengandalkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan pesan mereka dan memobilisasi dukungan. Kampanye lingkungan kini tidak hanya mengandalkan advokasi tradisional, tetapi juga menggunakan platform digital untuk menciptakan gerakan massal yang melibatkan individu dari seluruh penjuru dunia. Gerakan *Fridays for Future* yang dipimpin oleh Greta Thunberg, misalnya, adalah contoh gerakan hijau global yang berhasil menarik perhatian generasi muda di berbagai belahan dunia untuk mendesak pemerintah agar bertindak lebih cepat dalam menangani krisis iklim. Gerakan hijau tidak bersifat monolitik; gerakan ini mencakup berbagai pendekatan dan fokus yang berbeda-beda. Di satu sisi, terdapat kelompok-kelompok yang menekankan pentingnya konservasi alam, perlindungan spesies yang terancam punah, dan pelestarian habitat alami. Kelompok-kelompok ini sering kali bekerja sama dengan lembaga-lembaga ilmiah untuk memastikan bahwa keputusan kebijakan didasarkan pada data ilmiah yang akurat.

Di sisi lain, terdapat pula gerakan yang lebih radikal, yang mengusung agenda anti-kapitalisme dan menentang eksploitasi alam yang disebabkan oleh sistem ekonomi global yang dianggap merusak. Kelompok-kelompok ini menganggap bahwa upaya perlindungan lingkungan tidak akan berhasil tanpa perubahan mendasar dalam cara kita memproduksi dan mengonsumsi sumber daya alam. Mereka menuntut peralihan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil, yang mengutamakan kesejahteraan ekologis dan sosial daripada pertumbuhan ekonomi semata. Pada 1970-an dan 1980-an, gerakan hijau di Eropa dan Amerika Utara mulai berorganisasi secara lebih formal, dengan pembentukan partai-partai politik hijau, seperti Partai Hijau di Jerman dan Kanada. Partai-partai ini memperjuangkan agenda yang fokus pada keadilan lingkungan, perdamaian, dan demokrasi partisipatif. Di Jerman, misalnya, Partai Hijau (*Die Grünen*) yang didirikan pada 1980 berhasil mendapatkan dukungan luas dan menjadi kekuatan politik penting yang mempengaruhi kebijakan nasional, terutama dalam hal energi terbarukan dan pelestarian lingkungan (*Frankland, 2016*).

Di Amerika Serikat, gerakan hijau juga mengalami momentum yang signifikan pada periode yang sama, terutama melalui kegiatan protes terhadap penggunaan energi nuklir dan advokasi untuk energi bersih. Di Kanada, Partai Hijau berhasil mengorganisir gerakan

anti-pembalakan liar di British Columbia, yang kemudian menjadi bagian penting dari politik lingkungan nasional (Carter, 2013). Meskipun gerakan hijau sering kali diasosiasikan dengan negara maju, negara berkembang juga memiliki sejarah panjang dalam hal gerakan lingkungan, meski dengan konteks yang berbeda. Di India, gerakan Chipko pada tahun 1970-an adalah salah satu contoh paling menonjol dari gerakan hijau di negara berkembang. Gerakan ini melibatkan komunitas lokal yang, terutama para perempuan, memeluk pohon untuk mencegah deforestasi oleh perusahaan kayu. Gerakan ini tidak hanya menyoroti perlindungan lingkungan tetapi juga aspek keadilan sosial dan hak-hak komunitas lokal (Shiva, 1989). Di Afrika, gerakan hijau juga telah menjadi bagian penting dari perjuangan melawan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan multinasional. Wangari Maathai, seorang aktivis lingkungan asal Kenya, mendirikan Gerakan Sabuk Hijau (Green Belt Movement) pada 1977, yang berfokus pada penanaman pohon, pemberdayaan perempuan, dan konservasi tanah. Gerakan ini berkembang menjadi salah satu organisasi lingkungan terbesar di Afrika dan membantu menanam lebih dari 50 juta pohon di seluruh benua (Maathai, 2003).

Memasuki abad ke-21, gerakan hijau telah menjadi lebih terorganisir dan global. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim, kelompok-kelompok lingkungan mulai menekan pemerintah untuk mengambil tindakan lebih serius terhadap isu-isu lingkungan. Salah satu bentuk respons global yang penting terhadap krisis iklim adalah Perjanjian Paris tahun 2015, di mana hampir semua negara di dunia setuju untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi pemanasan global (UNFCCC, 2015). Gerakan hijau global juga mendapatkan momentum melalui kampanye internasional seperti *Fridays for Future* yang dipimpin oleh Greta Thunberg, yang menginspirasi jutaan orang muda di seluruh dunia untuk menuntut tindakan yang lebih berani terhadap perubahan iklim. Kampanye ini menunjukkan bahwa generasi muda saat ini sangat sadar akan pentingnya menjaga planet ini untuk masa depan mereka (Thunberg, 2019).

Meskipun gerakan hijau telah mencapai banyak keberhasilan, tantangan besar masih menghadang. Di banyak negara, pemerintah dan industri besar masih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas kelestarian lingkungan, sering kali mengorbankan sumber daya alam demi keuntungan jangka pendek. Selain itu, konflik antara kebutuhan akan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dan

perlunya melindungi lingkungan global sering kali menimbulkan ketegangan dalam upaya internasional untuk memerangi perubahan iklim (Newell, 2005). Namun, gerakan hijau terus berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan ini. Salah satu tren yang menarik adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik hijau melalui gerakan akar rumput dan advokasi untuk demokrasi partisipatif. Teknologi baru, seperti energi terbarukan, juga memberikan harapan untuk solusi yang lebih berkelanjutan dalam mengatasi krisis lingkungan. Dengan momentum yang terus berkembang, gerakan hijau diperkirakan akan terus menjadi kekuatan utama dalam upaya global untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan (Dryzek, 2013).

Sejarah gerakan hijau menunjukkan perjalanan panjang dari protes lokal menjadi gerakan global yang mempengaruhi kebijakan publik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Meskipun menghadapi banyak tantangan, gerakan hijau telah berhasil mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola lingkungan di berbagai belahan dunia. Masa depan gerakan ini tergantung pada kemampuan untuk terus beradaptasi dengan tantangan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks, serta dalam mendorong transisi menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, gerakan hijau juga mencakup upaya-upaya lokal yang berfokus pada isu-isu lingkungan spesifik di wilayah tertentu. Misalnya, di beberapa negara berkembang, gerakan hijau sering kali terkait dengan perjuangan melawan deforestasi ilegal, degradasi tanah, dan pencemaran air yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat setempat. Di Afrika, misalnya, *Green Belt Movement* yang didirikan oleh Wangari Maathai berfokus pada penanaman pohon sebagai upaya untuk melawan deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Meskipun gerakan hijau telah mencapai banyak kesuksesan, tantangan yang dihadapi tetap besar. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari sektor-sektor industri yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam. Industri minyak, gas, dan pertambangan, misalnya, sering kali memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang besar, sehingga menyulitkan upaya-upaya legislasi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan. Selain itu, perubahan kebijakan lingkungan sering kali memerlukan investasi besar dan reformasi struktural yang dapat menimbulkan resistensi di tingkat nasional dan internasional. Tantangan lain adalah ketidakadilan lingkungan yang dirasakan oleh banyak negara berkembang. Meskipun negara-negara maju

merupakan kontributor terbesar terhadap emisi karbon dioksida dan polusi global, negara-negara berkembang justru yang sering kali mengalami dampak terburuk dari krisis iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. Ketidakadilan ini telah menjadi salah satu isu utama dalam perdebatan internasional mengenai bagaimana tanggung jawab global harus dibagi dalam mengatasi masalah lingkungan.

Namun, di balik tantangan-tantangan tersebut, gerakan hijau juga memiliki banyak peluang untuk berkembang. Meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya pelestarian lingkungan telah membuka ruang bagi inovasi teknologi yang berkelanjutan. Energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, kini menjadi alternatif yang semakin terjangkau dan kompetitif dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang baru bagi gerakan hijau untuk menyebarkan pesan mereka lebih luas dan cepat, serta untuk membangun jaringan kerja sama yang lebih kuat di antara para aktivis. Gerakan hijau adalah manifestasi dari kesadaran global akan krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Melalui berbagai upaya advokasi, kampanye, dan aksi langsung, gerakan ini bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua makhluk hidup. Meskipun tantangan yang dihadapi besar, dengan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, masih ada harapan untuk mengatasi ancaman-ancaman lingkungan yang kian mendesak. Transformasi menuju masa depan yang lebih hijau memerlukan komitmen kolektif serta perubahan mendasar dalam cara kita hidup dan berinteraksi dengan alam.

2. Sejarah Singkat Gerakan Hijau

Gerakan hijau, yang juga dikenal sebagai gerakan lingkungan hidup, adalah upaya kolektif untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup di seluruh dunia. Gerakan ini mencakup berbagai inisiatif dan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan penurunan keanekaragaman hayati. Meskipun gerakan ini memiliki akar yang dalam dalam sejarah, perkembangan gerakan hijau telah bervariasi di berbagai negara, dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi setempat. Artikel ini akan membahas sejarah singkat gerakan hijau dan bagaimana perkembangan gerakan ini berbeda-beda di berbagai belahan dunia. Gerakan hijau atau *green movement* adalah upaya global yang muncul sebagai respons terhadap degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia, khususnya sejak Revolusi

Industri. Gerakan ini berfokus pada isu-isu seperti perubahan iklim, polusi, deforestasi, serta pelestarian keanekaragaman hayati, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Akar dari gerakan ini dapat ditemukan sejak akhir abad ke-19, ketika industrialisasi mulai menunjukkan dampak negatif terhadap alam dan kehidupan manusia.

Salah satu momen penting dalam sejarah gerakan hijau modern adalah penerbitan *Silent Spring* karya Rachel Carson pada tahun 1962, yang mengekspos bahaya pestisida terhadap ekosistem. Buku ini menjadi pemicu lahirnya kesadaran global tentang dampak destruktif aktivitas manusia terhadap lingkungan (Carson, 1962). Reaksi publik terhadap buku tersebut mendorong terbentuknya kelompok-kelompok lingkungan dan meningkatkan pengaruh gerakan hijau di Amerika Serikat dan Eropa. Pada dekade 1970-an, gerakan hijau semakin matang dengan lahirnya sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) lingkungan berskala internasional seperti Greenpeace dan Friends of the Earth. Organisasi-organisasi ini berfokus pada kampanye global untuk melawan praktik industri yang merusak lingkungan, seperti penangkapan ikan berlebihan, polusi industri, dan penggundulan hutan (Doherty & Doyle, 2006). Tahun 1972, Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia, yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi landasan bagi munculnya kerangka hukum internasional untuk melindungi lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Ward, 1973).

Selain itu, gerakan hijau juga berkembang menjadi gerakan politik dengan terbentuknya partai-partai hijau di berbagai negara, dimulai di Jerman dengan lahirnya *Die Grünen* pada tahun 1980. Partai Hijau di Jerman, sebagai salah satu pionir, berhasil menggabungkan isu lingkungan dengan platform politik yang mengusung keadilan sosial, perdamaian, dan demokrasi partisipatif (Frankland, 2016). Kesuksesan partai ini menginspirasi terbentuknya partai hijau di negara-negara lain, termasuk di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, yang pada akhirnya memperluas cakupan politik hijau ke skala global. Gerakan hijau terus berkembang sepanjang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, didorong oleh meningkatnya kekhawatiran global terhadap perubahan iklim. Konferensi Perubahan Iklim PBB dan perjanjian seperti Protokol Kyoto (1997) dan Perjanjian Paris (2015) mencerminkan dorongan internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi pemanasan global hingga di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri (UNFCCC, 2015). Meskipun tantangan besar masih ada, gerakan hijau terus

memainkan peran kunci dalam mengarahkan perhatian dunia terhadap urgensi perubahan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, sejarah singkat gerakan hijau menunjukkan bahwa sejak pertengahan abad ke-20, gerakan ini telah tumbuh dari kesadaran lokal menjadi gerakan global yang mempengaruhi kebijakan internasional. Meskipun menghadapi banyak tantangan, gerakan ini tetap menjadi kekuatan utama dalam upaya global untuk mencapai keberlanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem dunia.

Gerakan hijau modern dapat dilacak kembali ke akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika dampak negatif dari industrialisasi mulai dirasakan. Di Amerika Serikat, salah satu tonggak awal adalah pendirian taman nasional pertama di Yellowstone pada tahun 1872, yang bertujuan untuk melindungi lanskap alam dari eksploitasi industri. Konsep taman nasional ini kemudian diadopsi oleh banyak negara lain sebagai upaya untuk melestarikan keindahan alam dan biodiversitas. Namun, gerakan hijau yang lebih terorganisir muncul pada pertengahan abad ke-20, dengan publikasi buku *Silent Spring* oleh Rachel Carson pada tahun 1962. Buku ini mengungkapkan dampak buruk pestisida terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, yang memicu gelombang kesadaran lingkungan di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Inisiatif-inisiatif seperti Earth Day yang pertama kali dirayakan pada tahun 1970 di Amerika Serikat, menandai awal dari gerakan hijau modern yang lebih terstruktur dan global.

Perkembangan di Amerika Utara

Di Amerika Utara, gerakan hijau berkembang pesat sejak pertengahan abad ke-20. Di Kanada, gerakan lingkungan mulai mendapatkan momentum pada 1970-an dengan pembentukan berbagai organisasi seperti Greenpeace pada tahun 1971. Greenpeace lahir dari gerakan anti-perang dan menjadi salah satu organisasi lingkungan internasional yang paling terkenal dengan kampanye-kampanyenya melawan uji coba nuklir dan penangkapan paus komersial. Di Amerika Serikat, selain Earth Day, munculnya berbagai organisasi lingkungan seperti Sierra Club dan Natural Resources Defense Council (NRDC) memainkan peran penting dalam advokasi kebijakan lingkungan. Pada tahun 1990-an, gerakan hijau di Amerika Serikat semakin fokus pada isu perubahan iklim, terutama setelah laporan pertama dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) pada tahun 1990.

Perkembangan di Eropa

Di Eropa, gerakan hijau memiliki sejarah yang juga cukup kaya. Jerman adalah salah satu negara yang paling awal mengadopsi prinsip-prinsip hijau. Partai Hijau Jerman, yang didirikan pada tahun 1980, menjadi salah satu partai lingkungan politik pertama yang berhasil meraih kursi di parlemen dan mempengaruhi kebijakan lingkungan negara tersebut. Di Inggris, gerakan lingkungan juga mendapatkan dukungan signifikan dengan pembentukan Greenpeace UK dan Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) yang aktif dalam pelestarian spesies burung. Di Swedia, gerakan hijau mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah, dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung energi terbarukan dan perlindungan lingkungan. Konferensi Lingkungan Internasional di Stockholm pada tahun 1972, yang merupakan salah satu acara penting dalam sejarah gerakan hijau global, diselenggarakan di Swedia dan mengarah pada pembentukan Program Lingkungan PBB (UNEP).

Perkembangan di Asia

Di Asia, gerakan hijau berkembang dengan kecepatan yang bervariasi tergantung pada negara. Di Jepang, gerakan lingkungan mulai mendapatkan perhatian pada tahun 1970-an dengan peluncuran berbagai kampanye untuk mengatasi polusi udara dan pencemaran tanah. Jepang juga menjadi pelopor dalam teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya dan hidrogen. Di India, gerakan hijau awalnya lebih bersifat lokal dan sering kali dipimpin oleh kelompok-kelompok masyarakat adat yang melawan deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam. Contohnya adalah Gerakan Chipko pada tahun 1970-an, di mana penduduk lokal memeluk pohon untuk mencegah penebangan. Seiring waktu, gerakan lingkungan di India semakin terorganisir dengan pembentukan berbagai organisasi non-pemerintah yang bekerja pada isu-isu seperti air bersih, energi terbarukan, dan perubahan iklim.

Di China, meskipun negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, masalah lingkungan seperti pencemaran udara dan air menjadi perhatian utama. Pemerintah China mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu ini dengan meluncurkan inisiatif seperti Green GDP dan berinvestasi dalam energi terbarukan. Gerakan hijau di China juga semakin didorong oleh masyarakat sipil dan aktivis yang menuntut tindakan lebih lanjut terhadap pencemaran lingkungan.

Di Afrika, gerakan hijau sering kali berkaitan dengan isu-isu yang lebih mendesak seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh paling terkenal adalah Green Belt Movement di Kenya yang didirikan oleh Wangari Maathai pada tahun 1977. Gerakan ini berfokus pada penanaman pohon untuk melawan deforestasi dan memberdayakan perempuan serta komunitas lokal. Di Afrika Selatan, gerakan lingkungan juga mendapatkan momentum dengan fokus pada isu-isu keadilan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Afrika Selatan dan berbagai organisasi non-pemerintah bekerja sama untuk mengatasi pencemaran dan dampak perubahan iklim yang semakin terasa di wilayah tersebut. Gerakan hijau telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal kemunculannya, dengan kontribusi penting dari berbagai negara di seluruh dunia. Dari taman nasional pertama di Amerika Serikat hingga gerakan lingkungan di Kenya, setiap wilayah telah berkontribusi pada pemahaman dan penanganan masalah lingkungan global. Meskipun tantangan masih ada, gerakan hijau telah menunjukkan kemampuannya untuk mempengaruhi kebijakan, memperbaiki lingkungan, dan meningkatkan kesadaran publik. Dengan terus beradaptasi dan berinovasi, gerakan hijau diharapkan dapat terus memainkan peran penting dalam melindungi planet kita untuk generasi mendatang.

3. Peran Partai Hijau dalam Politik Global

Partai Hijau telah menjadi aktor politik penting dalam panggung internasional sejak kemunculannya pada akhir abad ke-20. Gerakan ini lahir dari kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan menciptakan kebijakan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dan alam. Partai Hijau membawa isu-isu lingkungan ke dalam arena politik formal, menawarkan platform yang menekankan keadilan sosial, demokrasi partisipatif, dan keberlanjutan ekologis. Sejak didirikan, partai-partai hijau telah memperluas pengaruh mereka dalam politik nasional dan global, dan memainkan peran kunci dalam menekan pemerintah untuk bertindak atas masalah-masalah lingkungan, terutama dalam konteks perubahan iklim. Partai Hijau, yang berakar dari gerakan lingkungan hidup dan keadilan sosial, telah berkembang menjadi kekuatan politik yang signifikan di berbagai negara. Mereka mempromosikan agenda yang berfokus pada keberlanjutan, perubahan iklim, hak asasi manusia, dan reformasi ekonomi berbasis lingkungan. Meskipun awalnya bersifat lokal, Partai Hijau kini berperan penting

dalam politik global, mendorong kebijakan yang mengutamakan kepedulian terhadap bumi serta kesejahteraan sosial yang adil. Dalam konteks politik internasional, Partai Hijau menunjukkan bahwa isu-isu lingkungan dan sosial semakin tidak terpisahkan dari diskursus politik arus utama. Artikel ini akan membahas peran Partai Hijau dalam mempengaruhi kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi di tingkat global serta kontribusinya dalam mendorong perubahan paradigma dalam politik internasional.

Partai Hijau pertama kali muncul sebagai reaksi terhadap isu-isu lingkungan dan sosial yang mulai mendominasi perdebatan publik pada pertengahan abad ke-20. Partai Hijau yang pertama kali didirikan adalah Values Party di Selandia Baru pada tahun 1972, yang diikuti oleh pendirian partai serupa di Jerman, Kanada, dan berbagai negara Eropa lainnya pada dekade 1980-an. Di Jerman, Partai Hijau, atau *Die Grünen*, menjadi salah satu partai hijau yang paling berpengaruh dan berhasil masuk ke parlemen nasional pada tahun 1983. Mereka menjadi suara penting dalam politik Jerman, membawa isu-isu seperti pelestarian lingkungan, energi terbarukan, dan perdamaian. Pada tingkat internasional, partai ini membantu mendefinisikan agenda politik hijau global. Partai Hijau secara umum berfokus pada empat pilar utama yang menjadi prinsip ideologis mereka: demokrasi partisipatif, keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan non-kekerasan. Demokrasi partisipatif berpusat pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, sementara keberlanjutan ekologis menuntut reformasi dalam kebijakan energi, transportasi, dan industri agar lebih ramah lingkungan. Keadilan sosial menekankan distribusi yang adil dari sumber daya dan hak-hak yang sama bagi semua orang, sementara non-kekerasan mencerminkan penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan sebagai alat penyelesaian konflik.

Partai Hijau pertama kali muncul di Eropa, dengan partai-partai seperti *Die Grünen* di Jerman yang didirikan pada tahun 1980. Partai ini dianggap sebagai pelopor dalam membawa isu lingkungan ke dalam politik arus utama. *Die Grünen* mendasarkan platform politik mereka pada prinsip-prinsip ekologi, non-kekerasan, keadilan sosial, dan demokrasi partisipatif. Dalam beberapa dekade berikutnya, partai ini berhasil memperoleh dukungan signifikan di Jerman, bahkan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan di tingkat federal dan regional (Frankland, 2016). Keberhasilan *Die Grünen* mendorong pembentukan partai hijau di negara lain, seperti Partai Hijau Kanada dan Partai Hijau Inggris, yang memperluas cakupan politik hijau di berbagai belahan dunia.

Salah satu kontribusi utama Partai Hijau di kancah politik global adalah advokasi yang konsisten untuk isu-isu lingkungan yang mendesak, seperti perubahan iklim, pelestarian sumber daya alam, dan transisi menuju energi terbarukan. Di banyak negara, Partai Hijau menjadi kekuatan utama yang menekan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih progresif dalam mengatasi perubahan iklim. Mereka sering kali berkoalisi dengan gerakan sosial dan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk memobilisasi aksi di lapangan, serta melobi pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas (Carter, 2013).

Dalam konteks politik global, Partai Hijau telah memainkan peran signifikan dalam perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Di Eropa, Partai Hijau Eropa (European Green Party) telah menggunakan posisi mereka di Parlemen Eropa untuk menekan pemerintah Uni Eropa agar berkomitmen pada target pengurangan emisi gas rumah kaca yang ambisius serta memperluas penggunaan energi terbarukan (Oberthür & Kelly, 2008). Selain itu, Partai Hijau secara konsisten mendorong reformasi pada sistem ekonomi global, dengan menekankan pentingnya ekonomi berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan lebih berorientasi pada keadilan sosial. Keberhasilan Partai Hijau dalam politik global tidak hanya terbatas pada advokasi kebijakan lingkungan, tetapi juga dalam keterlibatan mereka di pemerintahan. Di beberapa negara, Partai Hijau telah berhasil berpartisipasi dalam pemerintahan koalisi. Di Jerman, misalnya, *Die Grünen* menjadi bagian dari pemerintahan koalisi dengan Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Selama periode ini, *Die Grünen* berhasil memengaruhi kebijakan energi dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan menghentikan program nuklir Jerman (Rüdiger, 2012).

Di Kanada, Partai Hijau juga berhasil memenangkan kursi di parlemen dan memainkan peran penting dalam memperdebatkan kebijakan terkait energi dan perubahan iklim. Di Selandia Baru, Partai Hijau telah bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai isu, termasuk kebijakan energi dan pengelolaan sumber daya alam, menjadikannya salah satu partai hijau paling berpengaruh di dunia (Burton & Lachapelle, 2011). Meskipun Partai Hijau telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara idealisme hijau dengan realitas politik praktis. Dalam beberapa kasus, Partai Hijau terpaksa membuat kompromi dalam kebijakan untuk berkoalisi dengan

partai lain atau untuk mendapatkan dukungan luas di antara pemilih. Misalnya, meskipun Partai Hijau menentang penggunaan energi nuklir, di beberapa negara mereka harus menerima kebijakan nuklir sebagai bagian dari kesepakatan politik (*Müller-Rommel & Poguntke, 2002*). Selain itu, isu lingkungan sering kali kalah penting dibandingkan dengan isu ekonomi dan keamanan di banyak negara. Krisis ekonomi global dan meningkatnya ketidakstabilan politik telah menggeser fokus publik dari isu lingkungan ke masalah lain, yang menyebabkan partai hijau harus bersaing dengan partai-partai lain dalam mendapatkan perhatian dan dukungan pemilih. Meskipun menghadapi tantangan, peran Partai Hijau dalam politik global diperkirakan akan terus berkembang, terutama dengan semakin meningkatnya urgensi untuk menangani krisis iklim. Dukungan publik terhadap kebijakan hijau juga terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim. Di masa depan, Partai Hijau diperkirakan akan semakin mempengaruhi kebijakan global terkait energi, penggunaan sumber daya alam, dan keadilan sosial. Dengan semakin banyaknya negara yang berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon, Partai Hijau memiliki peluang besar untuk memainkan peran utama dalam membentuk kebijakan transisi energi global yang berkelanjutan (*Dobson, 2007*).

Peran Partai Hijau dalam politik global sangat penting dalam memperjuangkan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Dari advokasi kebijakan lingkungan hingga keterlibatan dalam pemerintahan, Partai Hijau telah menjadi aktor kunci dalam membawa isu-isu hijau ke dalam politik arus utama. Meskipun menghadapi tantangan yang kompleks, masa depan Partai Hijau tampak menjanjikan seiring dengan meningkatnya urgensi global untuk menangani masalah perubahan iklim dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Di Eropa, Partai Hijau telah menjadi pemain politik yang berpengaruh, terutama dalam isu-isu terkait perubahan iklim dan energi terbarukan. Partai Hijau Eropa, sebuah koalisi dari berbagai partai hijau nasional, memainkan peran penting di Parlemen Eropa. Mereka berhasil mendorong kebijakan-kebijakan seperti pengurangan emisi karbon, transisi ke energi bersih, serta peningkatan standar lingkungan dan kesehatan publik. Di Jerman, Die Grünen menjadi salah satu partai politik utama, dengan keberhasilan signifikan dalam mempengaruhi kebijakan energi. Pada 2011, mereka berhasil mendesak pemerintah Jerman untuk menghentikan penggunaan tenaga nuklir secara bertahap, yang kemudian diikuti dengan peningkatan investasi dalam energi terbarukan. Keberhasilan mereka di Jerman memicu inspirasi bagi partai hijau di negara-negara Eropa lainnya.

Selain Jerman, negara-negara seperti Prancis, Swedia, dan Belgia juga melihat peningkatan dukungan terhadap Partai Hijau. Di Prancis, Europe Écologie Les Verts (EELV) mulai memperoleh lebih banyak suara, khususnya dalam pemilihan regional, dan aktif dalam mengadvokasi reformasi lingkungan dan sosial yang signifikan. Di Swedia, Partai Hijau (Miljöpartiet) telah menjadi bagian dari pemerintahan koalisi sejak awal 2000-an, memainkan peran penting dalam merancang kebijakan lingkungan yang progresif. Peran Partai Hijau tidak terbatas di Eropa. Di Kanada, Green Party of Canada telah mendapatkan pengaruh yang signifikan meskipun tidak pernah memegang kendali pemerintahan. Pada 2019, Partai Hijau Kanada berhasil memenangkan tiga kursi di Parlemen, menunjukkan peningkatan dukungan terhadap isu-isu hijau di negara tersebut. Partai ini terus menekan pemerintah untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap perubahan iklim dan melaksanakan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan.

Di Australia, Partai Hijau Australia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Mereka menekankan pentingnya transisi ke energi terbarukan, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan ekonomi. Meskipun berada di luar kekuasaan eksekutif, mereka memainkan peran penting dalam membentuk perdebatan politik mengenai isu-isu iklim di negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam ini. Di Amerika Serikat, Partai Hijau (Green Party of the United States) berperan sebagai partai alternatif yang mencoba memecah hegemoni politik dua partai utama, Demokrat dan Republik. Meskipun tidak pernah memenangkan kursi dalam pemilihan nasional, Partai Hijau AS berhasil mendorong isu-isu lingkungan dan sosial ke dalam perdebatan nasional, terutama melalui kampanye presidensial yang dilakukan oleh Ralph Nader pada tahun 2000 dan Jill Stein pada 2012 dan 2016.

Partai Hijau tidak hanya berfokus pada isu-isu domestik tetapi juga berkontribusi dalam kebijakan global. Di dalam forum-forum internasional seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP), politisi dari Partai Hijau sering kali menjadi pendukung paling vokal dalam mendorong tindakan lebih tegas terhadap perubahan iklim. Mereka menekankan perlunya komitmen global untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Partai Hijau memainkan peran dalam mendorong transformasi ekonomi global. Mereka mendukung konsep "ekonomi hijau" yang mengedepankan penggunaan energi bersih, pengurangan limbah, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Ekonomi hijau ini juga bertujuan untuk

menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam sektor-sektor seperti energi terbarukan dan pertanian organik, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada industri yang merusak lingkungan.

Meskipun telah mencatat sejumlah kesuksesan, Partai Hijau juga menghadapi tantangan dan kritik. Salah satu tantangan terbesar adalah bahwa mereka sering kali dianggap sebagai partai niche, yang hanya fokus pada isu-isu lingkungan tanpa menawarkan solusi komprehensif untuk masalah ekonomi dan sosial lainnya. Selain itu, di beberapa negara, dukungan terhadap Partai Hijau sering kali terpecah karena adanya perbedaan pandangan mengenai strategi politik yang harus diambil, apakah bekerja dalam koalisi dengan partai-partai besar atau tetap mempertahankan identitas mereka sebagai partai independen. Kritik lain yang sering diarahkan kepada Partai Hijau adalah bahwa agenda hijau mereka dianggap tidak realistis atau terlalu radikal. Kebijakan-kebijakan seperti penghentian segera penggunaan bahan bakar fosil atau pengurangan drastis dalam konsumsi energi sering kali ditolak oleh kelompok-kelompok bisnis dan industri, yang menganggap bahwa hal tersebut akan merugikan ekonomi.

Peran Partai Hijau dalam politik global semakin tidak dapat diabaikan. Mereka tidak hanya berhasil memasukkan isu-isu lingkungan ke dalam arus utama politik, tetapi juga telah memberikan kontribusi penting dalam mendorong reformasi kebijakan di tingkat nasional dan internasional. Meskipun tantangan masih ada, terutama dalam hal pengakuan politik yang lebih luas, Partai Hijau telah membuktikan bahwa keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial adalah pilar penting dalam politik masa depan. Dukungan terhadap mereka diperkirakan akan terus tumbuh seiring meningkatnya kesadaran akan dampak krisis iklim dan perlunya tindakan segera.

4. Peran Aktor Non-Negara (LSM, Komunitas, dan Individu) dalam Gerakan Hijau.

Gerakan hijau atau gerakan lingkungan hidup tidak hanya melibatkan negara dan pemerintah dalam upaya melestarikan lingkungan dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, dan penurunan keanekaragaman hayati. Aktor non-negara, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas lokal, dan individu, memainkan peran kunci dalam menggerakkan perubahan ini. Aktor-aktor ini sering menjadi katalisator bagi inisiatif-inisiatif lingkungan yang inovatif, mendorong kesadaran publik, mengadvokasi kebijakan yang lebih hijau, serta menawarkan solusi yang berkelanjutan untuk masalah lingkungan. Dalam upaya global untuk menghadapi

krisis lingkungan, aktor non-negara seperti LSM, komunitas, dan individu memainkan peran yang semakin penting. Gerakan hijau, yang awalnya didorong oleh partai politik dan pemerintah, kini juga didorong oleh tindakan kolektif di luar arena formal. Aktor-aktor non-negara ini tidak hanya mengadvokasi perubahan kebijakan, tetapi juga terlibat dalam proyek lapangan yang nyata dan inovatif untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Melalui advokasi, mobilisasi massa, dan implementasi solusi langsung, mereka menjadi komponen penting dalam gerakan hijau modern.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah lama menjadi pilar utama dalam advokasi lingkungan dan gerakan hijau. LSM seperti Greenpeace, World Wide Fund for Nature (WWF), dan Friends of the Earth telah berperan besar dalam meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi laut. Salah satu kekuatan utama LSM adalah kemampuannya untuk beroperasi di tingkat global sekaligus lokal, memberikan tekanan kepada pemerintah dan perusahaan multinasional untuk bertindak lebih berkelanjutan (*Doherty & Doyle, 2013*). Greenpeace, misalnya, dikenal dengan aksi-aksi langsungnya yang menyoroti praktik-praktik destruktif terhadap lingkungan. LSM ini menggunakan kampanye media, lobi internasional, dan demonstrasi publik untuk menekan pemerintah dan korporasi agar bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari tindakan mereka (*Princen & Finger, 2012*). Dalam kasus deforestasi di Amazon, LSM lingkungan memainkan peran penting dalam mengadvokasi kebijakan perlindungan hutan yang lebih ketat dan meningkatkan kesadaran global terhadap dampak deforestasi terhadap perubahan iklim dan keanekaragaman hayati (*Nepstad et al., 2014*).

Selain itu, LSM juga menjadi wadah kolaborasi internasional untuk masalah lingkungan. Misalnya, dalam negosiasi internasional mengenai perubahan iklim seperti Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (COP), LSM memainkan peran penting dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan memobilisasi opini publik. Mereka sering bertindak sebagai penghubung antara komunitas lokal dan aktor global, memastikan bahwa suara-suara dari akar rumput juga didengar dalam proses pengambilan keputusan internasional (*Oberthür & Ott, 2008*). Komunitas lokal sering kali berada di garis depan dalam menghadapi dampak langsung dari degradasi lingkungan. Oleh karena itu, mereka memainkan peran penting dalam gerakan hijau dengan melakukan tindakan yang lebih bersifat lokal namun berdampak signifikan. Banyak komunitas di seluruh dunia

yang telah beradaptasi dan mulai menerapkan praktek-praktek ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan wilayah mereka. Inisiatif-inisiatif lokal seperti proyek pertanian organik, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan energi terbarukan skala kecil telah menjadi model bagi keberlanjutan di tingkat akar rumput (Agyeman et al., 2002).

Salah satu contoh peran komunitas adalah inisiatif pertanian perkotaan di banyak kota besar di seluruh dunia. Komunitas-komunitas perkotaan di tempat seperti Detroit, AS, dan Havana, Kuba, telah mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang tidak hanya memberikan solusi pangan lokal tetapi juga membantu mengurangi jejak karbon kota (Anguelovski, 2015). Inisiatif semacam ini menjadi penting dalam konteks urbanisasi yang cepat, di mana solusi lokal dapat berkontribusi pada kelestarian lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, komunitas adat juga sering menjadi penjaga utama bagi wilayah alam yang masih terjaga. Di banyak bagian dunia, komunitas-komunitas adat telah mengelola hutan, tanah, dan laut mereka selama berabad-abad dengan cara yang berkelanjutan, menawarkan model konservasi yang telah terbukti efektif. Pengakuan atas hak-hak komunitas adat untuk mengelola sumber daya alam mereka telah menjadi fokus utama gerakan hijau global dalam beberapa dekade terakhir (Bryan, 2012).

Individu juga memiliki peran yang signifikan dalam gerakan hijau, terutama dalam hal membangun kesadaran dan mendorong perubahan perilaku. Kampanye lingkungan seperti *Fridays for Future*, yang dimulai oleh aktivis muda Greta Thunberg, menunjukkan bahwa tindakan individu dapat memicu gerakan global. Aksi-aksi protes ini telah berhasil mendorong pemerintah untuk mengambil sikap lebih tegas terkait kebijakan perubahan iklim, serta memobilisasi jutaan orang di seluruh dunia untuk menuntut tindakan lebih cepat dari pemimpin global (Martiskainen et al., 2020). Lebih jauh, gaya hidup ramah lingkungan yang dipilih oleh individu-individu juga telah menjadi bagian dari gerakan hijau. Perubahan pola konsumsi, seperti mengurangi penggunaan plastik, beralih ke transportasi publik, dan memilih produk-produk berkelanjutan, merupakan langkah-langkah kecil yang memiliki dampak kumulatif besar. Kampanye-kampanye seperti *zero waste* dan *minimalism* adalah contoh bagaimana perubahan individu dapat membantu mengurangi tekanan pada lingkungan secara signifikan (Hobson, 2020).

Di tingkat kebijakan, individu sering kali berperan dalam mendorong pemerintah lokal dan nasional untuk mengadopsi kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Di banyak negara, petisi, kampanye media sosial, dan aksi-aksi langsung yang dipimpin oleh

individu-individu telah berhasil memaksa pemerintah untuk memperkenalkan kebijakan yang mendukung transisi energi, pelestarian hutan, dan perlindungan keanekaragaman hayati (*Tormos-Aponte & García-López, 2018*). Kolaborasi antara LSM, komunitas lokal, dan individu sering kali menjadi kekuatan utama dalam keberhasilan gerakan hijau. Misalnya, dalam kampanye untuk menghentikan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara di berbagai negara, LSM bekerja sama dengan komunitas lokal yang terdampak, sementara individu-individu membantu menyebarluaskan kampanye tersebut melalui media sosial. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan tekanan pada pemerintah dan korporasi untuk mengubah kebijakan mereka (*Schlosberg & Coles, 2016*).

Gerakan global untuk memerangi perubahan iklim juga menunjukkan kekuatan kolaborasi antara aktor non-negara. Di berbagai konferensi perubahan iklim, LSM, komunitas lokal, dan individu sering kali menggabungkan kekuatan mereka untuk menekan para pembuat kebijakan agar membuat keputusan yang lebih ambisius dalam hal pengurangan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (*Fisher & Nasiritousi, 2016*). Aktor non-negara—termasuk LSM, komunitas, dan individu—memainkan peran sentral dalam gerakan hijau, baik di tingkat lokal maupun global. Mereka tidak hanya mengadvokasi perubahan kebijakan, tetapi juga memprakarsai solusi konkret untuk masalah lingkungan. Kolaborasi di antara mereka telah berhasil mempercepat transisi menuju keberlanjutan dan memobilisasi jutaan orang untuk bertindak. Di masa depan, peran mereka akan semakin penting dalam memastikan tercapainya tujuan-tujuan lingkungan yang ambisius dan mendesak di tingkat global.

Bagian ini membahas peran LSM, komunitas, dan individu dalam gerakan hijau, mengeksplorasi bagaimana mereka berkontribusi terhadap perubahan signifikan di berbagai bidang, termasuk konservasi, advokasi, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, aktor-aktor non-negara ini terus memperkuat posisinya sebagai pemain penting dalam menjaga keberlanjutan planet ini.

- Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Gerakan Hijau

LSM atau Non-Governmental Organizations (NGO) telah menjadi salah satu aktor paling berpengaruh dalam gerakan hijau. Mereka memiliki kebebasan lebih

dibandingkan aktor-aktor negara, terutama dalam hal advokasi dan pengawasan kebijakan lingkungan, yang memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam merespon tantangan lingkungan global.

Advokasi Kebijakan dan Kampanye Global

LSM internasional seperti Greenpeace, World Wildlife Fund (WWF), dan Friends of the Earth telah lama berada di garis depan gerakan hijau, mendorong pemerintah dan perusahaan multinasional untuk bertindak lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Greenpeace, misalnya, telah menjalankan kampanye global yang agresif melawan penangkapan ikan ilegal, penebangan hutan, dan pengujian nuklir. Mereka tidak hanya berfokus pada advokasi, tetapi juga sering kali menggunakan aksi langsung sebagai cara untuk menarik perhatian publik dan pembuat kebijakan.

WWF, di sisi lain, lebih berfokus pada konservasi spesies dan habitat yang terancam. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai contoh, WWF terlibat dalam upaya melindungi hutan tropis di Amazon melalui program Amazon Region Protected Areas (ARPA) yang berusaha menciptakan kawasan konservasi untuk mengurangi deforestasi di kawasan tersebut.

Pendanaan dan Implementasi Proyek Lingkungan

Selain kampanye dan advokasi, LSM juga memainkan peran penting dalam pendanaan proyek lingkungan. The Nature Conservancy, misalnya, tidak hanya menjalankan kampanye pelestarian, tetapi juga secara langsung terlibat dalam pembelian dan pengelolaan tanah yang kaya keanekaragaman hayati untuk mencegah degradasi lingkungan. LSM ini menunjukkan bagaimana organisasi non-pemerintah dapat memiliki peran nyata dan praktis dalam menjaga lingkungan melalui tindakan langsung di lapangan.

Meningkatkan Kesadaran Publik

LSM juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan. Mereka sering kali menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat tentang ancaman lingkungan yang muncul dan cara-cara untuk mengatasinya. Melalui publikasi, kampanye media, dan pendidikan, LSM membangun dukungan publik untuk

inisiatif hijau. Contohnya, kampanye "Save the Arctic" dari Greenpeace tidak hanya berfokus pada penyelamatan ekosistem Arktik, tetapi juga berusaha untuk melibatkan masyarakat luas dalam mendorong pemerintah agar mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang berencana mengeksploitasi sumber daya di wilayah tersebut .

- Peran Komunitas dalam Gerakan Hijau

Komunitas lokal sering kali menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan proyek-proyek lingkungan di tingkat akar rumput. Mereka memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang ekosistem di wilayah mereka dan memiliki peran penting dalam menerapkan solusi yang berkelanjutan dan relevan dengan konteks setempat.

Gerakan Hijau Lokal

Gerakan hijau sering kali bermula dari komunitas lokal yang berusaha melindungi sumber daya alam mereka. Salah satu contoh yang terkenal adalah Gerakan Chipko di India pada tahun 1970-an, di mana masyarakat desa di kaki bukit Himalaya memeluk pohon untuk mencegah penebangan hutan yang akan menyebabkan erosi tanah dan penurunan kualitas lingkungan mereka . Gerakan ini kemudian menginspirasi gerakan hijau di seluruh dunia sebagai contoh perlawanan damai terhadap eksploitasi lingkungan oleh korporasi dan pemerintah yang tidak bertanggung jawab.

Inisiatif Pembangunan Berkelanjutan

Komunitas juga terlibat dalam upaya pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya lokal yang ramah lingkungan. Di banyak daerah pedesaan di Afrika, misalnya, komunitas lokal telah bekerja sama dengan LSM untuk mengelola sumber daya air dan hutan secara berkelanjutan, sambil tetap memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan ekonomi mereka. Program Community Based Natural Resource Management (CBNRM) di Namibia adalah contoh di mana komunitas lokal diberdayakan untuk mengelola satwa liar dan sumber daya alam dengan cara yang menguntungkan secara ekonomi dan ekologis .

Kearifan Lokal sebagai Solusi Lingkungan

Komunitas lokal sering kali memiliki kearifan lokal yang dapat menjadi solusi untuk masalah lingkungan. Di berbagai bagian Asia dan Amerika Latin, masyarakat adat telah lama mengembangkan sistem pertanian, pengelolaan hutan, dan pemanfaatan sumber

daya yang lebih berkelanjutan. Di Indonesia, misalnya, masyarakat adat di Kalimantan telah menerapkan sistem hutan adat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan hutan dari eksploitasi sembari tetap memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan .

- Peran Individu dalam Gerakan Hijau

Selain LSM dan komunitas, individu juga memiliki peran yang signifikan dalam gerakan hijau, baik sebagai pemimpin, aktivis, maupun konsumen yang sadar lingkungan. Aksi-aksi individu sering kali menjadi pemicu perubahan skala besar di berbagai bidang.

Aktivis Lingkungan

Aktivis lingkungan, seperti Greta Thunberg, telah menjadi simbol perlawanan global terhadap perubahan iklim. Dengan gerakan Fridays for Future, Thunberg berhasil menginspirasi jutaan anak muda di seluruh dunia untuk menuntut tindakan yang lebih tegas dari pemerintah dalam menghadapi krisis iklim . Aktivisme individu seperti ini menunjukkan bahwa individu, terutama generasi muda, memiliki peran penting dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih hijau.

Pemimpin Masyarakat dan Bisnis

Selain aktivis, banyak pemimpin masyarakat dan pengusaha juga telah memainkan peran dalam mempromosikan solusi hijau. Elon Musk, misalnya, sebagai pendiri Tesla, telah memainkan peran penting dalam mempromosikan kendaraan listrik sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi . Inisiatif Musk menunjukkan bagaimana inovasi individu dapat mengubah industri dan mendorong transisi ke teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Konsumen Sadar Lingkungan

Peran individu sebagai konsumen juga sangat penting dalam gerakan hijau. Konsumen yang sadar lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dengan memilih produk yang lebih berkelanjutan. Misalnya, peningkatan permintaan akan produk organik dan ramah lingkungan telah mendorong industri pertanian dan manufaktur untuk mengubah cara mereka beroperasi. Selain itu, kebiasaan individu seperti pengurangan penggunaan

plastik, daur ulang, dan hemat energi juga memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan jejak karbon secara keseluruhan.

Aktor non-negara seperti LSM, komunitas lokal, dan individu telah memainkan peran kunci dalam menggerakkan gerakan hijau di seluruh dunia. LSM berperan dalam advokasi kebijakan dan pendanaan proyek lingkungan, komunitas lokal menjadi aktor utama dalam pelaksanaan proyek-proyek keberlanjutan, sementara individu memimpin perubahan melalui aktivisme, inovasi, dan konsumsi sadar. Kolaborasi antara aktor-aktor ini dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan dampak yang lebih besar dalam mengatasi tantangan lingkungan global. Dengan kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya menjaga lingkungan, peran aktor non-negara dalam gerakan hijau akan semakin menonjol, memastikan bahwa masa depan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

Referensi

- Agyeman, J., Bullard, R. D., & Evans, B. (2002). Exploring the nexus: Bringing together sustainability, environmental justice and equity. *Space and Polity*, 6(1), 77-90.
- Anguelovski, I. (2015). *Neighborhood as refuge: Community reconstruction, place remaking, and environmental justice in the city*. MIT Press.
- Bryan, J. (2012). Rethinking territory: Social justice and neoliberalism in Latin America's territorial turn. *Geography Compass*, 6(4), 215-226.
- Burton, B., & Lachapelle, G. (2011). Green Parties in Transition: The End of Grass-roots Politics?. *Environmental Politics*, 20(6), 847-861.
- Carter, A. (2013). The politics of the environment: Ideas, activism, policy. *Environmental Politics*, 22(2), 368-369.
- Dobson, A. (2007). *Green Political Thought*. Routledge.
- Doherty, B., & Doyle, T. (2006). Beyond borders: Transnational politics, social movements, and modern environmentalism. *Environmental Politics*, 15(5), 697-712.
- Doherty, B., & Doyle, T. (2013). Environmentalism, resistance and solidarity: The politics of place in the era of globalisation. *Environmental Politics*, 22(5), 850-869.

- Dryzek, J. S. (2013). *The Politics of the Earth: Environmental Discourses* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Fisher, D. R., & Nasiritousi, N. (2016). The roles of non-state actors in climate change governance: Understanding agency through governance profiles. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16(1), 109-126.
- Frankland, E. G. (2016). Die Grünen: From protest party to political power. *German Politics*, 25(3), 319-331.
- Guha, R. (2000). *Environmentalism: A global history*. Oxford University Press.
- Hobson, K. (2020). Small stories of closing loops: Social circularity and the everyday circular economy. *People, Place and Policy*, 14(3), 174-186.
- Maathai, W. (2003). *The Green Belt Movement: Sharing the Approach and the Experience*. Lantern Books.
- Martiskainen, M., Axon, S., Sovacool, B. K., Sareen, S., Faller, F., & Hopkins, D. (2020). New modes of governing energy: A review of the literature on the roles and responsibilities of non-state actors. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 123, 109707.
- Miller, C. A. (2012). *Global environmental politics: From person to planet*. Routledge.
- Müller-Rommel, F., & Poguntke, T. (2002). Green parties in national governments: from protest to acquiescence?. *Environmental Politics*, 11(1), 133-145.
- Nepstad, D., Schwartzman, S., Bamberger, B., Santilli, M., Ray, D., Schlesinger, P., & Lefebvre, P. (2014). Inhibition of Amazon deforestation and fire by parks and indigenous lands. *Conservation Biology*, 18(1), 46-57.
- Newell, P. (2005). *Climate for Change: Non-State Actors and the Global Politics of the Greenhouse*. Cambridge University Press.
- Oberthür, S., & Kelly, C. R. (2008). EU leadership in international climate policy: Achievements and challenges. *The International Spectator*, 43(3), 35-50.
- Princen, T., & Finger, M. (2012). *Environmental NGOs in world politics: Linking the local and the global*. Routledge.

- Rüdiger, W. (2012). The German Greens in the 2011 Baden-Württemberg State Election: A First Green Minister-President?. *Environmental Politics*, 21(1), 153-157.
- Schlosberg, D., & Coles, R. (2016). The new environmentalism of everyday life: Sustainability, material flows, and movements. *Contemporary Political Theory*, 15(2), 160-181.
- Shiva, V. (1989). *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. Zed Books.
- Thunberg, G. (2019). *No One Is Too Small to Make a Difference*. Penguin Books.
- Tormos-Aponte, F., & García-López, G. A. (2018). Polycentric struggles: The experience of the global climate justice movement. *Environmental Politics*, 27(2), 239-254.
- UNFCCC. (2015). *Paris Agreement*. United Nations Framework Convention on Climate Change.
- Ward, B. (1973). *Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet*. W. W. Norton & Company.

BAB V

Kebijakan Publik Hijau

Midkholus Surur

1. Energi Berkelanjutan: Kebijakan terkait pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional tahun 2014 menyatakan dalam pasal 2 bahwa kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi didasarkan atas prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk mencapai kemandirian energi dan ketahanan energi nasional (Ramadani, 2018). Pengelolaan energi yang dimaksud adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi, penyediaan cadangan strategis, dan konservasi sumber daya energi. Perubahan dalam paradigma kebijakan pengelolaan energi yang semua menjadikan sumber daya energi sebagai komoditi ekspor dalam menghasilkan devisa menjadi paradigma energi sebagai modal pembangunan nasional diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor energi sehingga dapat digunakan untuk mendorong pengembangan sektor energi. Dalam membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional, pengelolaan energi mendorong kondisi terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan potensi sumber dalam negeri.

1.1. Secara umum, kebijakan yang terkait dengan pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi bertujuan untuk:

a. Mendorong penggunaan energi terbarukan: Ini mencakup berbagai sumber seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi.

- **Tenaga Surya**

Pengembangan listrik tenaga surya di Indonesia, masih mengalami berbagai tantangan. Kebijakan yang ada kini dinilai masih menyulitkan peminat dan investor listrik tenaga surya. Adapun beberapa rintangan bagi PLTS yang terkoneksi jaringan, antara lain ketentuan *built operate own and transfer* (BOOT) yang mengharuskan kepemilikan proyek dialihkan kepada PLN, setelah masa kontrak selesai. Pengembang listrik tenaga surya juga terpaksa menerima harga patokan berdasarkan harga listrik beban dasar (base load) batubara yang selama ini sudah dapat subsidi negara. Regulasi mengenai Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) yang memaksakan energi terbarukan termasuk solar PV bersaing dengan PLTU batubara bisa merusak kepercayaan pasar listrik tenaga surya di Indonesia. (Ketut Sugirianta et al., 2016) Keputusan pemerintah pakai BPP sebagai acuan masih dipertanyakan karena dinilai tak transparan baik dalam penyusunan maupun penetapan persentase BPP. Tak ada pertimbangan dan kejelasan juga soal bagaimana perubahan atau fluktuasi BPP dari tahun ke tahun. Kondisi ini, menyulitkan pengembang dalam menghitung finansial jangka panjang. Pengembangan

PLTS untuk kawasan terpencil juga membuat badan usaha berpikir ulang ketika syarat minimal elektrifikasi daerah setempat yang menjadi wilayah ijin pengusahaan sebesar 95% sehinggamemberatkan secara investasi. Pemerintah melalui berbagai Lembaga/Kementerian mempunyai kewajiban yang sama dalam hal meningkatkan kesejahteraan bagi daerah terpencil melalui berbagai macam program sehingga resiko terjadi tumpang tindih pada saat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah menjadi besar.

- Angin

Sumber energi fosil yang selama ini digunakan diperkirakan akan habis, karena eksploitasi besarbesaran untuk mengimbangi keperluan akan energi untuk kebutuhan. Untuk itu perlu dikembangkan sumber energi listrik yang bisa diperbaharui salah satunya energi dari tenaga angin. Keuntungan utama dari penggunaan pembangkit listrik tenaga angin adalah sumber energi ini yang terbarukan. Hal ini berarti pemanfaatan sumber energi ini tidak akan berkurang, sedangkan penggunaan bahan bakar atau sumber energi dari fosil dengan bertambahnya waktu akan habis. Keuntungan lain menggunakan sumber energi dengan tenaga angin merupakan sumber energi yang ramah lingkungan, dimana penggunaannya tidak mengakibatkan emisi gas buang atau polusi yang bisa merusak lingkungan.

Dengan alasan itu dimasa depan tenaga angin bisa menjadi sumber energi yang bisa diandalkan. (Marnoto, 2010) Selama ini kendala yang dihadapi untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin memerlukan biaya besar dan memerlukan kecepatan angin besar untuk menggerakkan kincir yang ukurannya besar, dengan teknologi yang dibuat pada penelitian ini kecepatan angin tidak dipermasalahkan karena kecepatan angin yang digunakan rendah.

- Energi Air

Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Itu disebabkan kondisi topografi Indonesia bergunung dan berbukit serta dialiri oleh banyak sungai dan daerah daerah tertentu mempunyai danau/waduk yang cukup potensial sebagai sumber energi air.

Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) adalah salah satu teknologi yang sudah terbukti (proven), tidak merusak lingkungan, menunjang diversifikasi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan, menunjang program pengurangan pemanfaatan BBM, dan sebagian besar memakai kandungan lokal.

Besar potensi energi air di Indonesia adalah 74.976 MW, sebanyak 70.776 MW ada di luar Jawa, yang sudah termanfaatkan adalah sebesar 3.105,76 MW sebagian besar berada di Pulau Jawa. Pembangunan setiap jenis pembangkit listrik didasarkan pada kelayakan teknis dan ekonomis dari pusat listrik serta

hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan. (Arinaldo, Mursanti, and Tumiwa 2019).

Sebagai pertimbangan adalah tersedianya sumber energi tertentu, adanya kebutuhan (permintaan) energi listrik, biaya pembangkitan rendah, serta karakteristik spesifik dari setiap jenis pembangkit untuk pendukung beban dasar (*base load*) atau beban puncak (*peak load*)

Selain PLTA, energi mikrohidro (PLTMH) yang mempunyai kapasitas 200-5.000 kW potensinya adalah 458,75 MW, sangat layak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di daerah pedesaan di pedalaman yang terpencil ataupun pedesaan di pulau-pulau kecil dengan daerah aliran sungai yang sempit. (Donalek 2020).

Biaya investasi untuk pengembangan pembangkit listrik mikrohidro relatif lebih murah dibandingkan dengan biaya investasi PLTA. Hal ini disebabkan adanya penyederhanaan standar konstruksi yang disesuaikan dengan kondisi pedesaan.

- Panas Bumi

Salah satu energi terbarukan yang sangat potensial untuk menjadi sumber pemanfaatan energi terbesar adalah energi panas bumi. Di tengah rencana transisi penggunaan energi terbarukan tersebut, tidak banyak yang sadar bahwa Indonesia memiliki potensi energiterbarukan geotermal (panas bumi) terbesar di dunia. Sampai saat ini, pemanfaatan potensi tersebut belum maksimal. Posisi Indonesia dalam wilayah tumbukan lempeng tektonik dan garis khatulistiwa membuat negara ini memiliki cadangan energi yang besar. Indonesia memiliki cadangan energi fosil seperti minyak, gas dan batu bara dan cadang energi nonfosil seperti energi geotermal, air, angin, dan matahari. Penggunaan energi fosil bersifat merusak lingkungan dan cadangannya yang terus menipis. Maka ketergantungan terhadap energi fosil harus dikurangi dengan menggantinya dengan energi terbarukan dengan cadangan yang berlimpah, salah satunya geotermal (Daud & Gaffar, 2019).

Melihat potensi pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia perlu diperhatikan bahwa hal itu bukanlah isapan jempol belaka. Karenajumlah potensi sumber daya geotermal Indonesia sekitar 11.073 Megawatt listrik (MWe) dan cadangannya sekitar 17.506 MWe. Kapasitas pembangkit listrik secara nasional yang pada akhir 2016 memproduksi listrik 59,6 Gigawatt (GWe) atau 59.600 MWe. Maka, jika potensi tersebut digunakan semua sebagai pembangkit listrik, maka menambah kapasitas 18% dari total produksi listrik saat ini. Angka tersebut bukanlah merupakan angka yang kecil untuk hanya sekedar dilewatkan (Daud & Gaffar, 2019). Sehingga, perencanaan energi dalam bidang ini harus diperhatikan sedemikian rupa sehingga pemanfaatannya dapat direalisasikan dengan maksimal.

- b. Meningkatkan efisiensi energi: Artinya menggunakan energi lebih sedikit untuk menghasilkan output yang sama.

Menggandakan tingkat kemajuan efisiensi energi tentu merupakan tantangan besar, namun bukan berarti target tersebut tidak dapat dicapai. Dalam 10 tahun ke belakang, 90% negara telah mencapai target kemajuan tingkat efisiensi 4% setidaknya satu kali, termasuk Indonesia. Selama periode tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara G20 – selain Tiongkok, Perancis, dan Inggris – yang telah melakukan hal serupa selama 5 tahun berturut-turut. Berikutnya, Indonesia harus meningkatkan kemajuan dengan kebijakan yang komprehensif dan meningkatkan penerapan teknologi yang sudah tersedia.

Hal lain yang patut disoroti dari isu ini adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi secara efisien. Itu sebabnya, diperlukan edukasi kepada masyarakat yang lebih luas tentang efisiensi energi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk meningkatkannya. Pemahaman mengenai efisiensi energi seharusnya dapat diajarkan sejak dini dan secara berkelanjutan untuk mendorong perubahan perilaku.

Preferensi masyarakat terhadap penerapan efisiensi energi dapat memotivasi keputusan sektor swasta untuk berinvestasi pada teknologi yang efisien. Pada akhirnya, perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada pilihan individu, tetapi juga pada faktor-faktor lain, seperti ketersediaan teknologi pendukung yang terjangkau dan informasi yang mudah mereka pahami.

- c. Mengurangi emisi gas rumah kaca:

Upaya dan solusi mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) perlu dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kerusakan dari pemanasan global. Dampak gas rumah kaca di tanah air sendiri sudah banyak dirasakan pada berbagai sektor. Suhu yang semakin meningkat berimbas pada kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup sekitar.

Demi mewujudkan transisi pengurangan emisi karbon di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 mendatang. Dengan adanya dukungan internasional maka level emisi karbon bisa dinaikkan hingga 41%. Langkah ini menjadi salah satu solusi mengurangi GRK di tanah air.

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah yang dilaksanakan dalam beberapa sektor, di antaranya adalah *Forestry and Other Land Uses* (FOLU), pertanian, energi, pengolahan limbah, serta Industrial Process and Product Uses (IPPU). Secara keseluruhan, upaya pengurangan GRK berfokus pada sektor kehutanan dan guna lahan.

Sektor kehutanan dan guna lahan diklaim sebagai kontributor GRK terbesar di Indonesia selain dari sektor FOLU yang dapat menghasilkan sekitar 60% emisi karbon, dan sektor energi yang mampu menghasilkan 36% GRK.

Solusi mengurangi GRK yang sektor FOLU lakukan dapat dilihat dari tren positif pengendalian kebakaran lahan dan hutan. Pada tahun 2020, persentase pengendalian kebakaran berada di angka 82%.

Kemudian, pemerintah juga telah melaksanakan proses rehabilitasi hutan bakau dengan target seluas 600.000 hektar pada tahun 2024. Indonesia memiliki ambisi besar pada sektor FOLU sebagai *carbon net sink* di 2030. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan terjadinya netralitas karbon di sektor tersebut.

d. Menjamin ketahanan energi : Mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil.

Upaya penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi. Dalam rangka diversifikasi, penggunaan energi dari *non-renewable energy resources* ke *renewable energy resources*, misalnya:

- Menggagas upaya mengganti BBM dengan Bio-diesel
- Mendorong pembangunan PLT mikro hidro di pedesaan
- Mengurangi peran pembangkit BBM dan menggantikannya dengan pembangkit non-BBM.

1.2. Kebijakan di Indonesia

Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa kebijakan utama yang telah diterapkan antara lain:

a. Target bauran energi: Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat, persentase bauran energi tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 masih dipegang oleh batubara, yaitu sebesar 40,46%. Namun, persentase tersebut terus menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 42,38%. pemerintah berusaha meningkatkan bauran energi dari sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan dengan menurunkan persentase bauran energi batu bara.

Berdasarkan data DEN, persentase bauran energi tertinggi tahun 2023 masih didominasi Batubara (40,46%), Minyak Bumi (30,18%), Gas Bumi (16,28%), EBT (13,09%). Prosentase energi baru terbarukan (EBT) meningkat 0,79% sehingga menjadi 13,09% pada tahun 2023. Namun realisasi tersebut masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 17,87%. pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan persentase energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan realisasi bauran energi nasional tahun 2023 masih di bawah target. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- Peningkatan harga komoditas energi, seperti minyak mentah, gas alam, dan batu bara, yang menyebabkan subsidi energi semakin besar.
- Kendala teknis dalam pembangunan pembangkit listrik EBT

- Kendala pembiayaan pembangunan pembangkit listrik EBT

Pemerintah menargetkan bauran energi nasional sebesar 19,49% pada tahun 2024 dan optimis mampu mencapai 23% pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan terus mendorong pengembangan EBT, baik dari sisi kapasitas terpasang, produksi, maupun konsumsi.

b. Insentif fiskal

Di tahun 2019, emisi GRK dari sektor energi menembus angka 600.000 ton CO₂ (Anwar et al., 2021). Kenaikan ini nampak kontras dengan pencapaian mitigasi GRK sektor energi Indonesia pada tahun 2021 yang berhasil melewati target sebesar 104% (seratus empat persen) atau 70 dari 67 juta ton CO₂ yang ditargetkan di tahun 2021, dan 64,4 juta ton CO₂ di tahun 2020 (Dirjen EBTKE, 2022). Raihan pencapaian ini tidak terlepas dari penambahan strategi reduksi emisi GRK sebagaimana dicantumkan dalam NDC 2022, setelah NDC Indonesia disampaikan di tahun 2016 dan 2021.

Sebuah kajian yang dilakukan oleh Hidayat, Kinanti, & Aurelianisa (2022) menunjukan salah satu perusahaan di sektor energi yang merupakan kontributor emisi GRK terbesar di tahun 2018-2020 memiliki *Net Cash Flow* (NCF) yang jauh berada di bawah kebutuhan anual untuk melakukan transisi ke industri hijau. Insentif pajak berupa *tax holiday* menjadi salah satu solusi yang dibutuhkan untuk mendukung transisi industri hijau (Hidayat et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah mencoba menerapkan kebijakan hukum insentif pajak lingkungan mendukung strategi sebagaimana tercantum dalam NDC untuk mewujudkan ekonomi hijau di sektor energi.

Bahwa ada sejumlah insentif pajak yang meringankan wajib pajak di sektor energi dalam fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan pajak penghasilan (*tax allowance*) dan pembebasan pajak penghasilan (*tax holiday*). Hal ini terlihat diterapkan beberapa fasilitas pajak penghasilan pada pelaku usaha dan investor sebagaimana diatur dalam PP 79/2019 jo. Permen ESDM 16/2015. Selain itu juga diterapkan dalam skema yang sangat menarik investor berupa pengurangan pajak penghasilan (*tax allowance*) dan pembebasan pajak penghasilan (*tax holiday*) bagi investor yang ingin menanamkan modal di industri pionir yang mendukung teknologi ramah lingkungan di sektor energi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.010/2020. Secara aktual, terdapat perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan fasilitas pajak ini, antara lain: PT Sahung Brantas (*tax allowance*) dan PT Bangun Tirta Lestari (*tax holiday*)

(Dirjen EBTKE, 2019). Selain untuk industri, diberikan pula skema *super tax deduction* untuk pajak penghasilan bruto sebesar 300% (tiga ratus persen) bagi penelitian dan pengembangan (*research and development*) di sektor energi seperti pembangkit listrik, EBT, pengolahan limbah/sampah untuk energi, baterai, alat kelistrikan, dan enhanced oil recovery (EOR) (PMK 153/PMK.010/2020).

c. Regulasi yang mendukung

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Untuk memaksimalkan potensi ini dan mencapai target transisi energi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang memberikan kemudahan dan insentif bagi pengembangan proyek energi terbarukan.

Beberapa regulasi utama yang mendukung pengembangan proyek energi terbarukan di Indonesia antara lain:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi: Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. UU ini menetapkan energi terbarukan sebagai sumber energi nasional yang strategis dan mewajibkan pemerintah untuk mempromosikan pembangunannya.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik: Perpres ini merupakan salah satu regulasi terbaru yang secara khusus mengatur percepatan pengembangan energi terbarukan. Perpres ini memberikan berbagai kemudahan, seperti penyederhanaan perizinan, percepatan proses tender, dan dukungan pendanaan.

d. Program konservasi energi

Konservasi energi adalah upayasis tematis, terencana dan menyeluruh untuk menghemat sumber daya energi dalam negeri dengan lebih memperhatikan penggunaan energi yang efisien dan wajar daripada mengurangi penggunaan energi yang benar-benar dibutuhkan (So, 2014). Salah satu permasalahan pada rumah tinggal dalam penggunaan energi listrik antara lain adalah perilaku anggota rumah tinggal dalam mengoperasikan peralatan yang menggunakan sumber listrik, peralatan pencahayaan, penggunaan kulkas dan peralatan rumah tinggal lainnya yang tidak berlabel hemat energi (Utomo, Purnama and Adryan, 2021).

Secara umum sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang ketersediaannya terbatas dan tidak terjadi proses pembentukan kembali di alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga kemungkinan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contoh sumber energi tak terbarukan adalah energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam.

Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang proses pembentukannya terjadi secara berkelanjutan sehingga ketersediaannya melimpah dan tidak pernah habis. Contoh-contoh sumber energi terbarukan adalah energi matahari, energi dari biomassa, energi angin, gravitasi air, energi panas bumi, energi gelombang dan lain-lain. Perilaku hemat energi merupakan suatu upaya dalam mengurangi penggunaan energi listrik secara efisien dalam kehidupan sehari-hari. (Bachtiar et al., 2020).

e. Kerjasama internasional

Dalam melakukan pengembangan energi alternatif atau EBT Indonesia melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dan AS sangat dekat terutama sejak pemerintahan Orde Baru, neraca perdagangan nilai ekspor komoditas non migas Indonesia ke Amerika Serikat selama Januari – September 2012 tercatat sebesar US\$ 11,08 miliar atau 9,69 % dari keseluruhan ekspor non migas sebesar US\$ 114,36 miliar. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan Indonesia – AS cenderung meningkat dari tahun ke tahun. (Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan , 2012, p. 13)

Dalam melakukan pengembangan energi nasional, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain seperti Jepang, Jerman dan Uni Emirat Arab. Indonesia melakukan kerja sama di bidang energi dengan Amerika Serikat dalam pengembangan energi di karenakan konsumsi EBT di AS mencapai 4,32% dan meningkat dari tahun ke tahun begitu pun juga karena teknologi di AS yang semakin modern dan ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri pengembangan energi alternatif terbilang lambat karena kurangnya teknologi yang di miliki Indonesia untuk mengembangkan energi alternatif.

1.3. Tantangan dan Peluang

Meskipun telah banyak kemajuan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti:

- a. Tinggi biaya investasi: Pengembangan infrastruktur energi terbarukan masih membutuhkan investasi yang besar.
- b. Keterbatasan teknologi: Perlu pengembangan teknologi yang lebih canggih dan efisien untuk pemanfaatan energi terbarukan.
- c. Ketersediaan sumber daya: Tidak semua wilayah memiliki potensi yang sama untuk pengembangan energi terbarukan.

Di sisi lain, terdapat juga peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti:

- a. Potensi sumber daya alam yang melimpah: Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi surya, angin, panas bumi, dan biomassa.
- b. Pertumbuhan pasar: Permintaan akan energi bersih terus meningkat baik di dalam maupun luar negeri.
- c. Inovasi teknologi: Perkembangan teknologi energi terbarukan semakin pesat, membuka peluang untuk penerapan solusi yang lebih inovatif.

1.4. Kesimpulan

Pengembangan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat

dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dapat mencapai target bauran energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.

2. Transportasi Berkelanjutan: Kebijakan untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi.

Sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai kebijakan telah dan terus dikembangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berikut beberapa kebijakan yang umum diterapkan:

1.5. Kebijakan Umum

a. Peningkatan Penggunaan Transportasi Umum:

Di Indonesia tercatat terjadinya kemajuan dan peningkatan sarana dan prasarana logistik. Hal ini ditandai dengan banyaknya bidang usaha di bidang transportasi (Sahara & Jesica, 2022). Transportasi umum merupakan alat angkut penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau pembayaran. Definisi lain dari transportasi umum (juga dikenal sebagai transportasi massal) adalah sistem transportasi yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah besar penumpang ke tujuan yang berbeda.

Angkutan umum juga berperan dalam manajemen lalu lintas, penghematan bahan bakar atau energi, serta perencanaan dan pembangunan daerah. Inti penyelenggaraan angkutan umum adalah memberikan pelayanan angkutan yang baik dan layak kepada masyarakat bagi masyarakat yang mampu menggunakan angkutan sendiri untuk menjalankan pekerjaannya (pilihan) dan terutama bagi mereka yang terpaksa menggunakan angkutan umum (penjara). Dimensi pelayanan angkutan umum yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, terjangkau dan nyaman (kurniawan, 2014).

Transportasi publik menjadi salah satu jalan yang ditempuh pemerintah untuk membatasi maraknya kendaraan pribadi yang beredar di jalanan sehingga menimbulkan kemacetan yang semakin parah. Hal ini dikarenakan Rendahnya kualitas transportasi kota dapat menjadi masalah besar dalam urusan lalu lintas. Dalam pelayanan angkutan umum ini, pemerintah bertindak sebagai penyedia jasa dan pemerintah menunjuk pihak lain, termasuk BUMN. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ pasal 3 berbunyi: "Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat." (Oktavianti & Lituhayu, n.d.)

b. Promosi Kendaraan Ramah Lingkungan:

Indonesia telah memiliki komitmen dalam menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 41% serta zero emisi gas rumah kaca pada tahun 2060 sesuai Perjanjian Paris 2016 (Raihan, et al, 2022). Kendaraan listrik menjadi salah satu jalan keluar manusia untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim (Subekti, 2022). Kendaraan listrik ini dapat dipercaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida (Morgan, 2020). Dengan diciptakannya inovasi kendaraan listrik, kesadaran tentang lingkungan masyarakat juga menjadi meningkat. Harapannya, lingkungan menjadi lebih seimbang dan permasalahan iklim dapat teratasi. Kendaraan listrik menjadi lebih diharapkan dalam mencapai target zero emisi gas rumah kaca karena memiliki kadar polutan yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, bensin atau solar (Ehrenberger, et al, 2019)

Kendaraan listrik (*electric vehicles*) juga membawa dampak baik terhadap ketercapaian program ekonomi hijau. Program ekonomi hijau telah ditetapkan sejak tahun 1992 ketika Konferensi PBB di Rio de Janeiro yang diterima sebagai konsep pembangunan berkelanjutan (Loiseau, et al dalam Yeboah, et al, 2023). Konsep ini memiliki tujuan untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan yang tidak sejalan. UN Environment Programme menjelaskan bahwa ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat, serta secara bersamaan menekan risiko kerusakan lingkungan (E. B. Ali, Anufriev, & Amfo, 2021). Konsep ini juga memberikan paradigma baru terhadap perkembangan ekonomi yang ditunjang salah satunya melalui sektor transportasi mengalami perbaikan ke tingkatan lebih tinggi. Kendaraan listrik yang sedang dikembangkan menjadi bagian inovasi dalam meningkatkan ketercapaian program ekonomi hijau melalui sektor transportasi. Di Indonesia, kendaraan listrik yang berbahan bakar baterai memiliki dukungan terhadap penurunan emisi karbon dioksida. Sebagai produk ekonomi, kendaraan listrik akan menjadi bagian barang ekonomis ramah yang ramah lingkungan (Kemenangan, 2022).

Permasalahan yang telah diuraikan diatas menjadikan kendaraan listrik sebagai sebuah harapan untuk beralih dari ketergantungan kendaraan berbahan bakar fosil ke bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan menggunakan listrik. Peralihan ini akan menjadi langkah efektif dalam mengatasi dampak buruk perubahan iklim (Aderibigbe & Gumbo, 2023). Inovasi ini sebagai langkah transformatif yang dilakukan banyak negara untuk menekan kenaikan suhu di bawah 2oC (Sun, et al, 2023). Energi rendah karbon dengan penggunaan listrik ini di semua sektor menjadi sarana mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, khususnya CO₂ dari sektor transportasi (Lamb et al., 2021). Kendaraan listrik menjadi sebuah potensi yang dapat membangun kesenjangan ekonomi dan lingkungan. Prospek ini akan membentuk perusahaan yang berwawasan ke depan (Aderibigbe & Gumbo, 2023). Selain penggunaan kendaraan listrik yang digunakan masyarakat dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, peningkatan pembuatan kendaraan listrik dengan bahan bakar baterai juga akan membuka lapangan pekerjaan baru yang lebih luas sehingga

pertumbuhan ekonomi akan meningkat (Raditya, 2022). Selain itu, penjualan produk kendaraan listrik juga diharapkan meningkatkan ekonomi skala besar.

c. Pengembangan Transportasi Berkelanjutan dan Perencanaan Tata Ruang

Transportasi dan tata ruang saling mempengaruhi. Struktur tata ruang menentukan intensitas perjalanan serta pola asal-tujuan perjalanan, di sisi lain sistem transportasi juga menentukan struktur jaringan serta moda transportasi yang diperlukan. Hubungan antara transportasi dan struktur tata ruang dapat diilustrasikan sebagai sebuah siklus tertutup.

Dengan kata lain struktur tata ruang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan sistem transportasi (*ship follow the trade*), namun bisa juga sebaliknya dimana perencanaan sistem transportasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan struktur tata ruang (*trade follow the ship*). Menurut konteks *ship follow the trade*, perencanaan sistem transportasi dilakukan berdasarkan struktur tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dalam konteks *trade follow the ship*, perencanaan sistem transportasi menjadi dasar untuk menentukan struktur tata ruang dan guna lahan.

Salah satu isu penting pada pengembangan perkotaan yang muncul di abad ke-21 adalah pembangunan berkelanjutan yang sering diartikan sebagai pengembangan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang (Brundtland Commission, 1987). Paradigma pengembangan berkelanjutan khususnya berkaitan dengan kawasan perkotaan harus memperhatikan berbagai aspek yang membentuk kehidupan perkotaan, mulai dari aspek spasial, sosial, ekonomi, dan lingkungan (Sarosa, 2012). Sehingga sistem transportasi publik dalam hal ini harus menjadi salah satu tulang punggung kawasan perkotaan yang mampu memenuhi layanan mobilitas pengguna secara efektif dan efisien.

Apabila dilihat dari perspektif spasial, sistem transportasi publik yang efektif dan efisien dapat mencegah pengembangan wilayah perkotaan yang tidak terkendali (*urban sprawl*) sehingga struktur kota menjadi lebih compact. Selain itu, sistem transportasi publik yang efektif dan efisien juga dapat mendorong perubahan perilaku mobilitas bagi warga yang saat ini masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Struktur kota yang lebih compact ditambah dengan dukungan sistem transportasi publik yang memadai membuat waktu penglaju (*commuting time*) yang dibutuhkan bagi warga kota menjadi lebih singkat. Sehingga warga kota pun dapat lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Produktivitas ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Struktur kota yang compact dan perubahan perilaku mobilitas warga dapat menurunkan emisi karbon di sektor transportasi, yang akan berdampak pada perbaikan kualitas udara kota dan kesehatan warganya.

Penurunan polusi udara adalah hasil akhir yang diharapkan dari arah pengembangan transportasi berkelanjutan. Pendekatan yang lazim digunakan

dalam menyusun kebijakan transportasi berkelanjutan rendah karbon adalah dengan *Avoid, Shift, dan Improve* (A-S-I). Berdasarkan pendekatan ASI, kebijakan transportasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca harus terdiri dari tindakan yang bertujuan:

- Avoid atau meminimalisasi panjang perjalanan dan menekan kebutuhan perjalanan bermotor;
- Shift atau mendorong efisiensi pergerakan individu melalui perpindahan ke moda transportasi (*moda shift*) yang lebih hemat energi, massal, dan rendah emisi; dan
- Improve atau meningkatkan efisiensi pergerakan moda transportasi melalui perbaikan teknologi kendaraan, mendorong sumber energi (bahan bakar) terbarukan, dan optimalisasi operasi angkutan umum.

d. Peningkatan Kualitas Bahan Bakar:

Pengurangan kandungan sulfur dalam solar memungkinkan kendaraan bermotor memenuhi standar Euro 2 – mengurangi emisi secara keseluruhan sampai 90 persen – dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan. Hal ini memerlukan dorongan dari pemerintah untuk membantu pengilangan minyak Indonesia memproduksi bahan bakar dengan sulfur yang lebih rendah.

SK Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2006 menetapkan kandungan timah hitam maksimum sebesar 0,0013 g/L dan kandungan sulfur dalam solar 5.000 ppm. Meskipun bahan bakar di Indonesia sekarang sudah tidak mengandung timah hitam, spesifikasi kasinya masih belum ketat untuk kandungan sulfur. Hal ini memprihatinkan karena sulfur dioksidasi menjadi sulfur dioksida (SO₂) dan campuran sulfat yang membentuk partikulat, polutan udara yang paling berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampak dari polutan ini terdiri dari masalah saluran pernafasan sampai meningkatnya risiko kanker (misalnya McGranahan dan Murray, 2003).

Di beberapa negara seperti Cina, India, Vietnam dan Singapura, kandungan sulfur di bawah 2.500 ppm dan pada umumnya antara 300 sampai 1.500 ppm. Di Indonesia, dimana kandungan sulfur bervariasi antara 500 sampai 4500 ppm, pengurangan kandungan sulfur dalam solar akan mencapai dua tujuan: pertama, agar kendaraan bermotor dapat memenuhi standar Euro 2 dan mengurangi emisi polutan konvensional sampai 90 persen, dan kedua, mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan. Hasil sebuah kajian baru-baru ini memperlihatkan bahwa polutan yang berlangsung singkat seperti karbon hitam yang dikeluarkan dari kendaraan bermesin diesel juga diketahui mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap iklim global (US National Oceanic and Atmospheric Administration 2008). Selain parameter timah hitam dan sulfur, parameter bahan bakar lainnya juga diatur, seperti Reid Vapor Pressure (RVP) dan hidrokarbon (benzena, aromatik dan olefin). Dari keempat parameter tersebut, hanya timah hitam, RVP dan sulfur dalam bensin yang saat ini sesuai dengan bahan bakar rujukan Euro 2 di

Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi kandungan hidrokarbon dalam bensin setelah mengurangi kandungan sulfur dalam solar.

Penyulingan minyak Indonesia belum mampu memproduksi bahan bakar dengan kadar sulfur yang lebih rendah, dan insentif pemerintah diperlukan untuk mewujudkannya. Hasil pemantauan pengisian bahan bakar di Indonesia memperlihatkan bahwa kadar sulfur rata-rata di beberapa kota pada tahun 2007 adalah 2.000 ppm. Tetapi, penyulingan milik Pertamina telah berhasil memproduksi solar dengan tingkat sulfur di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (namun bukan ambang batas yang disyaratkan untuk standar emisi Euro 2).

1.6. Kebijakan di Indonesia

Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi, antara lain:

a. Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

Dalam menanggapi darurat krisis iklim, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi gas efek rumah kaca (GHG) sebagaimana dituangkan dalam dokumen Kontribusi Nasional. Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 41% pada 2030 dengan dukungan komunitas internasional (Mursalim & Susanto, 2022). Salah satu caranya dengan mendorong pemanfaatan kendaraan listrik berbasis baterai demi menuju transportasi industri yang lebih hijau melalui skema bantuan insentif fiskal. Hal ini dianggap menjadi langkah penting dalam mengurangi jejak karbon industri otomotif dan mendukung komitmen global sebagai masyarakat dunia. Mursalim & Susanto (2022) mengatakan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap emisi yakni 27%. Oleh karena itu, adanya kendaraan listrik digadangkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi emisi di sektor transportasi. Namun, dalam upaya untuk mewujudkan sektor otomotif yang ramah lingkungan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Pada tahun 2020, persentase tingkat pembelian mobil listrik masih tergolong rendah hanya sebesar 0,15% yaitu setara 230 unit dari total 150.000 unit dan sepeda motor listrik sebesar 0,18% setara 1.500 unit dari total 800.000 (Utami et al., 2022).

Per tanggal 6 Maret 2023, Pemerintah merancang penetapan insentif KBLBB berupa bantuan pembelian KBLBB sebesar Rp 7 juta per unit untuk 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp 7 juta per unit untuk konversi menjadi motor listrik untuk 50.000 unit sepeda motor BBM. Sementara itu, besaran insentif untuk mobil listrik belum diumumkan secara resmi namun pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan kepada pembelian 35.900 unit mobil listrik dan 138 bus listrik.

Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan bantuan subsidi pada pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada April 2023. Implementasi kebijakan KBLBB ini diharapkan dapat menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengurangi ketergantungan atas penggunaan bahan bakar fosil. Berdasarkan dari sumber data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 1.407%. Angka ini naik dari 658 unit pada tahun 2021 menjadi 10.327 unit pada tahun 2022 (KONTAN, 2023).

Meskipun program percepatan pergantian kendaraan bermotor atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) merupakan langkah baik dalam mengurangi polusi kendaraan. Namun, sejumlah akademisi, analis kebijakan, bahkan masyarakat merasa bahwa langkah ini terlalu cepat, mengingat bahwa pasar otomotif Indonesia dinilai belum sepenuhnya siap. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dianggap sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program peralihan menuju industri otomotif yang ramah lingkungan ini. Peralihan teknologi baru dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai khususnya dalam kendaraan pribadi membuka ambivalensi bagi kehidupan perekonomian, sosial dan lingkungan.

Munculnya industri kendaraan listrik tentu menarik investasi asing dan domestik. Berdasarkan laporan IESR pada 2021-2022, Indonesia berhasil menarik komitmen investasi rantai pasokan kendaraan listrik senilai US\$ 20,3 miliar atau 310,9 triliun (Rizaty, 2023). Peluang bagi Indonesia untuk dapat menciptakan komponen dan industri kendaraan listrik sendiri semakin terbuka lebar (Kementerian ESDM, 2022). Kebijakan ini memiliki potensi untuk mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur, teknologi, dan infrastruktur pengisian kendaraan listrik.

Jika dilihat dari segi persepsi lingkungan, keberadaan kendaraan listrik dinilai dapat mengurangi emisi gas rumah kaca global (GRK) sebesar 15% (Mursalim & Susanto, 2021), mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan pengurangan risiko eksploitasi sumber daya alam yang tak terbarukan. Disisi lain, Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan pada tahun 2023, kendaraan listrik akan meningkat hingga 35% (Fitrianti, 2023). Hal ini memberikan perhatian besar terhadap limbah dari bahan baku penggerak kendaraan listrik yakni baterai yang biasanya terbuat dari litium, kobalt, dan nikel.

Meskipun terlihat ideal dalam usaha mencapai energi berkelanjutan, permintaan akan pasokan baterai dan material membuka perdebatan pada permasalahan terhadap lingkungan atas limbah produksi baterai yang masih menjadi pertimbangan dalam proses daur ulang. Hal ini dikarenakan baterai ion litium (Li) yang memiliki sifat lebih berat, lebih kompleks dan lebih berpotensi berbahaya jika dibongkar dengan cara yang salah (BBC, 2022).

Oleh karena itu, dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik melalui kebijakan KBLBB, Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan lebih lanjut pada sejumlah aspek, infrastruktur, pasokan kendaraan listrik, kesadaran masyarakat dan kebijakan itu sendiri. Ekosistem kendaraan listrik yang belum sepenuhnya

terbentuk juga memicu persepsi sosial. Salah satunya, dikarenakan harga kendaraan listrik yang relatif tinggi masyarakat cenderung berpikir skeptis yang membuat perubahan pergeseran di sektor otomotif ini sulit diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat.

- b. Pengembangan Transportasi Umum Massal: Pemerintah fokus pada pembangunan kereta api ringan (LRT), kereta api cepat (KRL), dan bus rapid transit (BRT).
- c. Peraturan Daerah: Beberapa daerah telah mengeluarkan peraturan daerah terkait pembatasan penggunaan kendaraan bermotor dan promosi transportasi umum.

1.7. Tantangan

- a. Biaya: Implementasi kebijakan ini membutuhkan biaya yang besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur.
- b. Perubahan Perilaku: Mengubah perilaku masyarakat dari pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum membutuhkan waktu dan edukasi.
- c. Ketersediaan Teknologi: Ketersediaan teknologi kendaraan listrik dan infrastruktur pendukung masih terbatas.

1.8. Solusi

- a. Kemitraan Pemerintah dan Swasta: Melibatkan sektor swasta dalam pendanaan dan pengembangan proyek transportasi berkelanjutan.
- b. Edukasi dan Sosialisasi: Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya transportasi berkelanjutan.
- c. Riset dan Pengembangan: Mendukung riset dan pengembangan teknologi kendaraan listrik dan energi terbarukan.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dan akan terus dikembangkan, diharapkan sektor transportasi di Indonesia dapat menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

3. Pertanian Berkelanjutan: Kebijakan untuk mendukung pertanian organik dan praktik pertanian ramah lingkungan.

Konsep pembangunan di sektor pertanian tidak hanya berfokus untuk meningkatkan produktivitas produk, tetapi juga memperhatikan keseimbangan alam, kualitas, dan keamanan produk (Rivai & Anugrah, 2011). Prinsip budidaya berbasis pengendalian hama, penggunaan pupuk kompos, pengelolaan sumberdaya yang terpadu, dan memperhatikan kelestarian lingkungan perlu diterapkan dalam konsep pembangunan sektor pertanian. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan sektor pertanian dapat layak secara ekonomi, sosial, dan berkelanjutan pada masa mendatang (Wiwardjaka, 2018).

Konsep budidaya tersebut sesuai dengan prinsip pertanian organik yang dapat menjadi salah satu solusi dari berbagai potensi permasalahan jangka panjang akibat penerapan

sistem pertanian konvensional dengan mengandalkan penggunaan pupuk kimia anorganik dan pestisida secara berlebihan (Mayrowani, 2012). Permasalahan yang berpotensi ditimbulkan dapat berupa pencemaran air, penurunan kesuburan tanah, resistensi hama terhadap pestisida, dan terancamnya kesehatan manusia maupun hewan akibat adanya residu pestisida pada produk pangan yang dikonsumsi (Winangun, 2005).

1.9. Kebijakan untuk Mendukung Pertanian Organik dan Ramah Lingkungan

Pertanian organik dan praktik pertanian ramah lingkungan merupakan pendekatan yang semakin penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendukung perkembangan sektor ini antara lain:

a. Insentif dan Dukungan Pemerintah

Untuk mencapai visi pembangunan pertanian yang modern tentunya pemberian insentif tetap perlu dipertahankan. Akan tetapi, diperlukan pemberian insentif yang memang memberikan nilai lebih bagi petani yang memperoleh insentif. Misalnya dengan memberikan biaya untuk petani yang berhasil mengembangkan produksi tanaman pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Juga dengan memberikan bantuan benih-benih unggul yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dalam melakukan penelitian pertanian.

Dengan demikian, maka pemberian insentif dengan berbasis luas tanam juga secara otomatis tidak harus diterapkan lagi secara penuh. Di mana, pemberian insentif diberikan bukan hanya kepada petani yang mempunyai dan mempertahankan lahan pertaniannya mulai dari 1 (satu) hektare, tetapi juga kepada petani yang berhasil mengembangkan metode atau teknologi di bidang pengembangan pertanian walaupun lahan yang dimilikinya tidak mencapai 25 (dua puluh lima) hektar.

Selain itu, kebijakan pemberian insentif ini sudah seharusnya juga memperhatikan latar belakang petani yang bersangkutan, agar pemberian insentif tersebut menjadi tepat sasaran. Di mana kepada petani yang kemampuannya sudah memadai, maka dipertimbangkan pemberian insentifnya tidak berbentuk bantuan langsung, tetapi dapat berupa pemberian keringanan-keringanan seperti keringanan pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Akan tetapi, kepada petani yang memang kemampuannya belum memadai, akan lebih baik jika insentif yang diberikan adalah bantuan langsung seperti bantuan bibit, pupuk, dan biaya-biaya lain yang diperlukan.

b. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi

Meningkatkan mutu produk pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan pendidikan pertanian memiliki peranan yang sangat krusial dalam meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global. Di era digital saat ini, teknologi memiliki peran yang tak tergantikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor pertanian. Pemerintah juga aktif memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan pertanian kepada petani, memungkinkan mereka untuk menguasai teknologi pertanian modern serta meningkatkan kualitas hasil panen mereka (Bakri, 2023). Beberapa elemen yang ikut berperan dalam memberdayakan petani mencakup: Mentalitas, Sumber daya keuangan, Pasar, Struktur organisasi, dan Pendidikan (Mangowal, 2013). Mengutip dari Wardah (2019) Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, penerapan teknologi terkini, termasuk teknologi informasi, dalam sektor pertanian memiliki kepentingan yang besar. Amran menekankan bahwa penggunaan peralatan modern di segala aspek pertanian, mulai dari tahap awal hingga panen, akan diperluas. Dia menyoroti bahwa penggunaan peralatan modern dalam pertanian sudah mengalami peningkatan.

Salah satu cara yang umum dilakukan untuk mengubah sektor pertanian adalah dengan memperkenalkan teknologi, metode kerja, dan gagasan inovatif baru. Sebagai contoh, program pemerintah ini dijalankan melalui lembaga seperti Dinas Pertanian dengan partisipasi berbagai fasilitator seperti Penyuluh Pertanian, GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani), dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Mereka bertujuan untuk memberikan panduan dan arahan kepada petani untuk meningkatkan hasil pertanian serta memperkuat kemandirian masyarakat (Ahmar et al., 2016). Pemerintah memainkan peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan sektor pertanian dengan kebijakan yang menyediakan teknologi pertanian, fasilitas, dan persiapan awal seperti program intensifikasi. Melalui program ini, pemerintah juga memberikan dukungan kredit untuk modal, serta melakukan distribusi pupuk dan penyuluhan pertanian (Silaban & Sugiharto, 2016).

1.10. Regulasi dan Standarisasi

a. Standar Produk Organik

Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Organik menurut SNI -01-6729 dan Permentan 64 Tahun 2013 tentang Pangan Organik adalah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar sistem produksi organik dan disertifikasi oleh otoritas atau lembaga sertifikasi resmi.

Prinsip dasar pertanian organik yang dirumuskan oleh IFOAM (*International Federation of Organic Agriculture Movements*) tentang budidaya tanaman organik adalah :

- Prinsip kesehatan, pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan;
- Prinsip ekologi, pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan;
- Prinsip perlindungan, pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup;
- Prinsip keadilan, Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.

Suatu produk dapat diakui sebagai produk organik apabila telah melalui proses sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi resmi yang telah terdaftar pada IFOAM. Lembaga-lembaga Standardisasi Internasional yang diakui adalah IFOAM dan *The Codex Alimentarius*. Standar IFOAM merupakan standar dasar untuk produk organik dan prosesnya, ditetapkan sejak tahun 1980. Standar *The Codex Alimentarius* adalah standar yang disusun dengan penyesuaian Standar IFOAM dengan beberapa standar dan aturan lain.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia juga telah menyusun standar pertanian organik di Indonesia yang tertuang dalam SNI 01-6729-2002. Sistem Pertanian Organik menganut paham organik proses artinya semua proses Sistem Pertanian Organik dimulai dari penyiapan lahan hingga pasca panen memenuhi standar budidaya organik, bukan dilihat dari produk organik yang dihasilkan. SNI Sistem Pangan Organik ini merupakan dasar bagi lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Kementerian Pertanian dan Pusat Standardisasi dan Akreditasi (PSA).

Indonesia memiliki potensi dan peluang yang cukup besar dalam rangka pengembangan pertanian organik. Potensi sumberdaya pertanian antara lain lahan, tanaman, manusia, teknologi dan lain-lain, cukup tersedia. Sistem pertanian organik sudah sejak dulu dilakukan oleh petani sebelum program Revolusi hijau. Hingga saat ini masih dijumpai di beberapa daerah, petani tetap mempertahankan cara pertanian tersebut. Teknologi pertanian organik relatif mudah dilakukan. Jerami, pupuk kandang, sisa (limbah) tanaman, sampah kota sebagai bahan pembuat pupuk organik juga tersedia melimpah serta mudah diperoleh.

b. Sertifikasi

Sertifikasi organik untuk produk pertanian memiliki arti penting untuk memperoleh kepercayaan dari konsumen. Seperti yang diketahui, harga produk pangan organik relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk-produk pangan yang dibudidayakan menggunakan teknik pertanian pola kimia. Sertifikat organik untuk produk pertanian perlu diurus agar memperoleh pengakuan bahwa dari pertanian yang telah diusahakan benarbenar telah terbebas dari berbagai residu kimia. Adapun lembaga yang berwenang untuk merilis sertifikat organik adalah Lembaga Sertifikasi Organik (LSO). Di Indonesia ada 8 LSO yang

berwenang mengeluarkan sertifikat organik dengan layanan dan fasilitas yang berbeda-beda.

Manfaat yang diperoleh dengan memiliki sertifikasi produk pertanian organik, pengakuan tentang hasil pertanian kita adalah 100% organik, tentunya akan lebih mudah diterima pasar, baik itu pasar domestik atau mancanegara. Dengan adanya sertifikasi organik dari LSO terkait, maka standar produk pangan kita mendapat pengakuan SNI atau bahkan ISO.

1.11. Edukasi dan Pelatihan

Dalam komponen kebijakan publik, Peningkatan kualitas derajat hidup masyarakat, serta sektor petani/sub sektor petani organik menjadi tujuan kebijakan negara dalam perlindungan, melayani masyarakat petani baik individu, kelompok dengan pemberian pelayanan yang menunjang aktivitas usaha pertanian organik, proses pemberdayaan membutuhkan pemetaan kondisi sosial masyarakat untuk sebagai langkah dalam menjawab permasalahan dan kebutuhan dalam konteks pemberdayaan, pertanian organik dimana pemahaman masyarakat terhadap suatu program merupakan bentuk pandangan dan berkontribusi yang dapat membentuk sebuah penilaian dan dapat mengarahkan pada sebuah tindakan untuk kebaikan dirinya, maupun lingkungan.

Dan terkait pengembangan pemberdayaan pertanian organik akan dapat terus berjalan dan mendapatkan tempat dimasyarakat petani apabila program pertanian organik dikawal para pelaku aktifis sosial yang bergerak dipertanian alami dan mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah baik ditingkat desa sampai Kabupaten. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan.
- Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005).

Pemberdayaan petani, kelompok tani, merupakan hal penting dalam setiap rumusan kebijakan dan menjadikan komponen program kebijakan pelayanan /sub sektor usaha pertanian organik untuk dilakukan di tengah permasalahan pertanian serta ketidakberdayaan petani dalam mengembangkan usahanya. Dengan menghadirkan Program kebijakan Pemerdayaan kelompok tani dengan penggunaan pupuk organik diharapkan mampu meningkatkan potensi yang dimiliki oleh petani, terutama dalam mengatasi permasalahan seperti rendahnya daya tawar dan terbatasnya akses permodalan dari pemerintah serta tingkat pendidikan petani yang masih rendah, kemampuan membuat pilihan bagi petani. Proses pemberdayaan petani merupakan siklus atau proses yang melibatkan

peranan petani untuk berkerja sama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk mengkaji masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pada program yang direncanakan bersama petani untuk konsisten mengembangkan sistem pertanian organik yang berkelanjutan.

Beberapa upaya dari kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan petani dalam sistem pertanian organik melalui tiga arah yaitu:

- Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi sumber daya alam dan manusia untuk dapat berkembang (enabling). Hal ini dengan menyadarkan setiap individu maupun masyarakat bahwa petani memiliki potensi karena tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya. Sehingga ketika melaksanakan pemberdayaan diupayakan mendorong dan membangkitkan motivasi masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan dimiliki oleh petani.
- Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh petani (empowering). Dalam pemberdayaan diupayakan melalui kegiatan/aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, pemberian akses modal, dan infrastruktur untuk menunjang keberlanjutan sistem pertanian organik. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu petani melainkan menanamkan nilai-nilai sistem pertanian organik yang ramah lingkungan bermodalkan kerja keras dan tanggung jawab.
- Melindungi hak petani organik (protection) artinya dalam pemberdayaan petani dalam upaya mencegah persaingan yang tidak seimbang maupun praktek eksploitasi oleh kaum /pihak yang kuat terhadap kaum /pihak yang lemah.

1.12. Contoh Kebijakan di Indonesia

- a. Program Organik Nasional: Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Organik Nasional untuk mendorong pengembangan pertanian organik.
- b. Sertifikasi Organik: Lembaga Sertifikasi Organik Indonesia (LSOI) bertanggung jawab dalam menerbitkan sertifikat organik.
- c. Pasar Tani: Pemerintah membangun berbagai pasar tani untuk mempermudah pemasaran produk organik.

1.13. Manfaat Kebijakan Mendukung Pertanian Organik

- a. Lingkungan: Mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kualitas tanah dan air.
- b. Kesehatan: Menghasilkan produk pangan yang lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi.
- c. Ekonomi: Meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- d. Kemandirian Pangan: Meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

1.14. Tantangan dan Solusi

- a. Biaya: Pertanian organik membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan pertanian konvensional. Solusi: Pemerintah dapat memberikan subsidi dan insentif.
- b. Akses Pasar: Pemasaran produk organik masih terbatas. Solusi: Membangun pasar tani dan mengembangkan jaringan distribusi.
- c. Ketersediaan Input: Ketersediaan pupuk organik dan benih organik masih terbatas. Solusi: Mengembangkan industri pupuk organik dan bank benih organik.

Dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, pertanian organik dan praktik pertanian ramah lingkungan dapat menjadi tulang punggung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia.

4. Pengelolaan Limbah: Kebijakan untuk mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola limbah.

Masalah limbah menjadi isu global yang semakin mendesak. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas industri menghasilkan limbah dalam jumlah yang sangat besar. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan mengancam kesehatan manusia. Oleh karena itu, penerapan kebijakan pengelolaan limbah yang komprehensif menjadi sangat penting.

1.15. Prinsip Dasar Pengelolaan Limbah

Konsep pengelolaan limbah yang umum diterapkan adalah 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace):

- a. Reduce (Mengurangi): Prinsip pengelolaan limbah yang pertama adalah reduce. Pada dasarnya reduce adalah sebuah tindakan untuk mengurangi penggunaan barang. Hal ini karena ketika kita sebagai manusia semakin banyak menggunakan material pada kehidupan. Tentunya akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Sebagai contoh dari adanya kegiatan reduce adalah mengganti penggunaan kantong plastik sekali pakai menjadi kantong belanja ramah lingkungan. Saat ini di beberapa daerah Indonesia sudah mendukung program pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dengan menggantikannya dengan kantong belanja ramah lingkungan. Jika program ini bisa berjalan dengan durasi waktu yang panjang serta tepat sasaran. Tentunya kondisi bumi juga akan lebih baik lagi.
- b. Reuse (Menggunakan Kembali): Berikutnya adalah prinsip pengelolaan limbah reuse. Pada dasarnya reuse adalah suatu tindakan untuk menggunakan barang-barang yang masih bisa dipakai kembali. Untuk memaksimalkan prinsip reuse ini kita bisa mulai menghindari penggunaan barang sekali pakai seperti kantong plastik sekali pakai. Sebagai contohnya adalah ketika kita memiliki botol minum dengan label segitiga. Sebaiknya kita tidak langsung membuang botol minum

tersebut. Hal ini karena kita masih menggunakannya kembali, setidaknya dalam pemakaian tiga kali maksimalnya. Dengan melakukan tindakan ini secara berkala. Tentunya sampah plastik yang dihasilkan oleh botol bekas minum tidak akan sebegitu banyak seperti waktu-waktu sebelumnya. Selain itu kita juga bisa menggunakan tas belanja ramah lingkungan atau totebag yang bisa digunakan berkali-kali. Tindakan ini akan membuat kita lebih meminimalisir penggunaan plastik.

- c. Recycle (Mendaur Ulang): Prinsip pengelolaan limbah yang berikutnya adalah recycle. Recycle adalah suatu tindakan untuk melakukan daur ulang barang yang sudah tidak berguna menjadi barang yang lebih bermanfaat kembali. Sebagai contohnya adalah adanya bank sampah yang terdapat di setiap perkampungan. Tujuan adanya bank sampah adalah sebagai tempat penampungan sampah tidak berguna untuk diubah kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat kembali. Secara mudahnya, prosedur dalam bank sampah adalah masyarakat akan mengumpulkan sampah yang sudah dipisah seperti sampah organik dan sampah anorganik. Nantinya mereka akan menukarkan sampah tersebut dan mendapatkan apresiasi dari pihak bank sampah (tergantung kebijakan yang berlaku). Setelah bank sampah menerima sampah dari masyarakat. Berikutnya pihak bank sampah akan melakukan pengelolaan sampah tersebut seperti kemasan bungkus kopi yang sudah tidak terpakai bisa diubah menjadi tas, karpet, dompet dan lain-lain. Saat ini keberadaan barang dari bahan bekas sudah banyak diminati. Bahkan pemerintah memberikan dukungan dengan membuat suatu expo atau event tertentu yang bisa digunakan masyarakat untuk memasarkan barang olahan limbah.
- d. Replace (Mengganti): Terakhir ada prinsip pengelolaan limbah replace. Dimana replace adalah suatu tindakan untuk mengganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama atau lebih ramah lingkungan. Sebagai contohnya adalah beralih menggunakan kendaraan pribadi dengan menggunakan sepeda atau kendaraan umum. Lalu bisa juga mengganti Styrofoam dengan daun pisang untuk membungkus makanan.

1.16. Kebijakan Pengelolaan Limbah

Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mengatasi masalah limbah, antara lain:

- a. Regulasi:

Peraturan Limbah Berbahaya dan Beracun merupakan peraturan yang sangat penting dalam pengelolaan limbah di berbagai sektor industri. Limbah berbahaya dan beracun harus dikelola dengan tepat dan aman agar tidak menimbulkan masalah, baik bagi keselamatan manusia maupun lingkungan.

Setiap kegiatan yang menghasilkan limbah, baik perusahaan maupun aktivitas rumahan memiliki kewajiban untuk mengelola limbah tersebut dengan standar keamanan dan peraturan berlaku. Pihak berwenang juga telah menyiapkan sanksi

dan tindakan tegas, jika limbah berbahaya dan beracun tersebut tidak dikelola dengan tepat. Berikut ini adalah regulasi tentang pengolahan limbah :

- UU Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan pertama tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Regulasi ini merupakan dasar hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam konteks limbah berbahaya dan beracun, UU PPLH ini memberikan kerangka regulasi yang meliputi aspek pengelolaan, transportasi, dan pembuangan limbah berbahaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Regulasi selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (PP 22/2021) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP 22/2021 mencabut peraturan sebelumnya yaitu PP No. 101 Tahun 2014 (PP 101/2014) tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. PP 22/2021 ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan; perlindungan dan pengelolaan mutu air; perlindungan dan pengelolaan mutu udara; perlindungan dan pengelolaan mutu laut; pengendalian kerusakan lingkungan hidup; pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah nonB3; data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; sistem informasi lingkungan hidup; pembinaan dan pengawasan; dan pengenaan sanksi administratif.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLH) Nomor 6 Tahun 2021
Regulasi selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLH) Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahaya dan beracun (LB3) . PermenLH Nomor 6 Tahun 2021 ini membahas tentang hal-hal berikut ini: Penetapan status Limbah B3, Pengurangan Limbah B3, Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pengangkutan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, Penimbunan Limbah B3, Dumping (Pembuangan) Limbah, Perpindahan lintas batas Limbah B3; dan
- Standar Pengelolaan Limbah B3
Selain UU dan Peraturan Pemerintah, juga terdapat standar pengelolaan limbah B3 yang dapat diterapkan. Standar ini mencakup tata cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah B3. Seperti SOP internal perusahaan atau standar yang digunakan oleh perusahaan di luar Indonesia. Standar pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memastikan bahwa limbah B3 dikelola dengan aman, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta melindungi kesehatan manusia.
- Konvensi Basel tentang Kontrol Perpindahan Transnasional Limbah Berbahaya

Konvensi Basel merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengendalikan perpindahan limbah berbahaya secara transnasional atau lintas negara. Dan Konvensi ini mengatur tentang pengawasan, pengangkutan, dan pembuangan limbah berbahaya antar negara.

- Tujuan utama Konvensi Basel ini untuk melindungi manusia dan lingkungan dari dampak negatif limbah berbahaya. Terutama pengawasan dan pengelolaan di masing-masing negara.
- ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan

Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun juga telah ditetapkan dalam Standar Internasional ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan. Standar ini memberikan kerangka pedoman bagi organisasi dalam mengidentifikasi, mengontrol, dan mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasional mereka, termasuk penanganan limbah berbahaya. Penerapan ISO 14001 membantu organisasi mematuhi peraturan dan standar terkait limbah berbahaya serta meningkatkan kinerja lingkungan mereka.

b. Insentif:

Dasar pertama kebijakan adanya insentif dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia adalah pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. dalam undang-undang ini dan turunan peraturan lainnya yang terkait konsep insentif selalu digandengkan dengan konsep disinsentif. Namun, sesuai dengan judul artikel ini pembahasan hanya dilakukan terkait insentif.

Dalam Pasal 21 (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Kemudian pada ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Tetapi, kendati dinyatakan demikian, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur tentang insentif tersebut. Perihal insentif ini baru kemudian disinggung pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di mana pada Pasal 4 terdapat butiran yang menyatakan penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Butiran ini merupakan salah satu butiran yang menjadi bagian dari strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Selanjutnya kebijakan terkait insentif dalam pengelolaan sampah plastik yang lebih lengkap dan rinci ditemukan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Pada Pasal 22 ayat (1) dari Permen LHK ini dinyatakan bahwa menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada produsen. Kemudian pada ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa insentif tersebut dapat berupa: a. penghargaan; b. publikasi penilaian kinerja baik; dan/atau c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam lampiran Permen LHK tersebut dimuat pula anjuran adanya pemberian insentif dari produsen kepada distributor, retail, dan konsumen atas upaya mereka mengurangi sampah plastik. Pemberian insentif ini merupakan bagian dari strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan dimaksudkan sebagai motivasi agar pengurangan sampah plastik menjadi berkelanjutan. Bentuk program insentif yang diberikan kepada konsumen dapat berupa hadiah barang, potongan harga/voucher, dan undian berhadiah. Pemberian insentif dari produsen ini diserahkan pada kebijakan produsen sendiri, dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Di Sumatera Barat, misalnya, kebijakan tentang insentif ini juga dimuat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional. Pada Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada pihak ketiga. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa insentif yang dimaksud diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan hasil pengolahan sampah regional apabila: a. melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; b. pengurangan timbulan sampah; c. tertib penanganan sampah.

Hal tersebut selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sebagai salah satu strateginya, pada Pasal 4 ayat (2) butir c dinyatakan penetapan dan pengembangan sistem insentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik juga dimuat perihal insentif ini. Pada Pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa DLH memberikan insentif atau disinsentif kepada pelaku usaha berdasarkan kinerja dalam penerapan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Lalu di ayat (2) dari pasal ini dinyatakan bahwa insentif tersebut dapat berupa penghargaan, publikasi penilaian kinerja baik, dan bentuk lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan pada Pasal 4 Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 yang. Dalam Pasal 4 itu termaktub bahwa penerapan dan pengembangan sistem

insentif dan disinsentif dalam adalah bagian dari strategi pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Semua kebijakan di atas masuk dan tercermin dalam kerangka kerja aksi nasional dan pemerintah lokal dalam *National Plastic Waste Reduction Strategic Actions for Indonesia* (Kementrian LHK, 2020). Insentif sebagai salah satu strategi pengurangan sampah plastik dapat saja diberikan pada level *upstream* yang meliputi desain dan produksi, *middlestream* yang meliputi distribusi dan konsumsi, atau *downstream* yang meliputi pengumpulan yang terdiri dari perlakuan (recycle, upcycle) dan final disposal. Pada level *upstream*, misalnya, Kementrian LHK dapat mengembangkan skim insentif terkait implementasi EPR (*Extended Producer's Responsibility*). Selain itu, Kementrian Industri dapat pula memberikan penghargaan/insentif bagi green industries. Sedangkan pada level downstream, misalnya, dapat diberikan penghargaan/insentif bagi kota/kabupaten yang memiliki pengelolaan sampah yang baik.

c. Pendidikan dan Sosialisasi:

Pendidikan lingkungan merupakan salah satu pendekatan strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah (Hakim, 2019). Pendidikan lingkungan tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis, tetapi juga pada pengembangan sikap dan perilaku ramah lingkungan (Purnami et al., 2016). Melalui pendidikan lingkungan, masyarakat diajak untuk memahami kompleksitas masalah lingkungan, termasuk isu pengelolaan sampah, serta dilatih untuk mengadopsi praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan. Pentingnya pendidikan lingkungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah telah diakui oleh berbagai penelitian dan kebijakan di berbagai negara (N. Sari & Mulasari, 2017). Berbagai program pendidikan lingkungan yang diinisiasi di sekolah-sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengubah perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah (Cerya & Evanita, 2021). Misalnya, program daur ulang di sekolah-sekolah telah berhasil mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus meningkatkan kesadaran siswa dan orang tuamereka tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi pendidikan lingkungan (Arisona, 2018). Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan masyarakat tentang dampak jangka panjang dari pengelolaan sampah yang buruk (Syam, 2016). Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur seringkali menjadi hambatan dalam menjalankan program pendidikan lingkungan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pesan-pesan lingkungan dapat diterima dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks

Indonesia, isu pengelolaan sampah menjadi semakin relevan mengingat negara ini menghadapi tantangan besar dalam menangani volume sampah yang terus meningkat. Banyak kota besar di Indonesia masih berjuang dengan masalah sampah yang menumpuk, sistem pengelolaan sampah yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik (Sandika et al., 2018). Oleh karena itu, pendidikan lingkungan diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini dengan cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.

d. Infrastruktur:

Membangun infrastruktur daur ulang yang mendukung sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Ini termasuk:

- Membangun fasilitas daur ulang baru dan meningkatkan yang sudah ada.
- Meningkatkan sistem pengumpulan sampah untuk memudahkan masyarakat mendaur ulang.
- Mendidik masyarakat tentang manfaat daur ulang.
- Mengembangkan teknologi pengolahan sampah baru yang lebih efisien.

e. Kerjasama Publik-Swasta: Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan solusi pengelolaan limbah yang inovatif dan berkelanjutan.

1.17. Contoh Kebijakan Konkret

- a. Larangan penggunaan plastik sekali pakai: Banyak negara telah memberlakukan larangan atau pembatasan penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi sampah plastik.
- b. Tanggung jawab produsen: Produsen diwajibkan bertanggung jawab atas produk mereka hingga akhir masa pakainya, termasuk pengelolaan limbah produk.
- c. Sistem deposit returnable: Penerapan sistem deposit returnable untuk kemasan minuman dan makanan untuk mendorong pengembalian kemasan dan mengurangi sampah.
- d. Pemilahan sampah dari sumber: Masyarakat didorong untuk memilah sampah dari sumbernya agar memudahkan proses daur ulang.

1.18. Tantangan

- a. Perubahan perilaku: Mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten.
- b. Biaya pengelolaan: Pengelolaan limbah membutuhkan biaya yang cukup besar, terutama untuk teknologi daur ulang yang canggih.
- c. Keterbatasan infrastruktur: Banyak daerah, terutama di negara berkembang, masih kekurangan infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai.

1.19. Solusi yang dapat dilakukan:

- a. Peningkatan kesadaran: Melalui kampanye edukasi yang masif dan menarik.

- b. Keterlibatan masyarakat: Membentuk komunitas peduli lingkungan dan memberikan insentif bagi partisipasi masyarakat.
- c. Pengembangan teknologi: Mendukung inovasi teknologi untuk pengelolaan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- d. Kerjasama lintas sektor: Melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam upaya pengelolaan limbah.

Pengelolaan limbah merupakan tantangan besar yang membutuhkan solusi komprehensif. Dengan kebijakan yang tepat, dukungan dari berbagai pihak, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat membangun lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Referensi

- Arinaldo, Deon, Erina Mursanti, and Fabby Tumiwa. 2019. "Implikasi Paris Agreement Terhadap Masa Depan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Di Indonesia." *Accelerating Low-Carbon Energy Transition* 96(3): 445
- Anwar, Syaiful, Asaad, Irawan, Budiharto, Ratnasari, Wibowo, Hari, Gunawan, Wawan, Novitri, Fifi, Rosehan, Allan, Masri, Akma Yeni, Oktavia, Endah Riana, Carolyn, Rully Dhora, Precylia, Vinna, Lathif, Saiful, Asmani, Rusi, Purnomo, Heri, Utomo, Prasetyadi, Utama, Kurnia, & Ratnasari, Lolita. (2021). *Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV)*. Jakarta: Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi.
- Aderibigbe, O.-O., & Gumbo, T. (2023). *The role of electric vehicles in greening the environment: prospects and challenges*. *Proceedings of REAL CORP 2023, 28th International Conference on Urban Development, Regional Planning and Information Society*, 777-786.
- Ali, E. B., Anufriev, V. P., & Amfo, B. (2021). *Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review*. *Scientific African*, 12, e00756.
- Ahmar, A., Mappamiring, M., & Parawangi, A. (2016). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur*. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 120-136. <https://doi.org/10.26618/kjap.v2i2.873>
- Bachtiar, R. et al.(2020) 'Pengaruh Kesadaran Hemat Energi Terhadap Perilaku Hemat Energi', *Jurnal PGSD*, 6(1), pp. 1-6. doi: 10.32534/jps.v6i1.964.
- Bakri. (2023). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Industri Pertanian -Biro Administrasi Kepegawaian, Karir dan Informasi Universitas Medan Area*. In *Biro Administrasi Kepegawaian, Karir dan Informasi Universitas Medan Area*. <https://bakri.uma.ac.id/pengaruh-kebijakan-pemerintah-terhadap-industri-pertanian/>

- BBC. (2022, Februari 23). *Mobil listrik dan baterai litium: Bagaimana upaya mendaur ulang baterai yang kebanyakan akan menjadi sampah?* <https://www.bbc.com/indonesia/vertfut-60474372>
- Cerya, E., & Evanita, S. (2021). *Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Membangun Kepedulian Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6(2), 136.
- Donalek, Peter J. 2020. "Pumped Storage Hydro: Then and Now." IEEE Power and Energy Magazine 18(5): 49-57
- Daud, Y., & Gaffar, M. (2019). *Energi geotermal di Indonesia: potensi, pemanfaatan, dan rencana ke depan*. The Conversation. <http://theconversation.com/energi-geotermal-di-indonesia-potensi-pemanfaatan-dan-rencana-ke-depan-112921>
- Ehrenberger, S. I., Dunn, J. B., Jungmeier, G., & Wang, H. (2019). *An international dialogue about electric vehicle deployment to bring energy and greenhouse gas benefits through 2030 on a well-to-wheels basis*. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 74, 245-254.
- Erison, Y., Sholikin, A., Surur, M., Maburri, M. A., Rosyid, H., & Habibah, N. (2023). "Leadership and Smart Environment Policy" Studi Kasus Implementasi Smart Environment di Pekanbaru. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 15(03), 521-535.
- Fitrianti, Lalita. (2023, Agustus 9). *Dampak Buruk Produksi Kendaraan Listrik terhadap Keanekaragaman Hayati*. <https://greennetwork.id/ikhtisar/dampak-buruk-produksikendaraan-listrik-terhadap-keanekaragaman-hayati/>
- Hakim, M. Z. (2019). *Pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan*. Amanna Gappa, 111-121
- Hidayat, Dzulfan, Kinanti, Intan Tresna, & Aurelianisa, Kayla. (2022). *Insentif Pajak Lingkungan: Suatu Instrumen Kebijakan Fiskal Guna Mewujudkan Industri Ramah Lingkungan*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, 2(1), 51-66.
- Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan . (2012). KAJIAN KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA - AMERIKA SERIKAT DI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN. Jakarta .
- Ketut Sugirianta, I. B., Giriantari, I., & Satya Kumara, I. N. (2016). *Economic Analysis of Solar Electricity Rates using the Life Cycle Cost Method* (Analisa Keekonomian Tarif Penjualan Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1 MWp Bangli Dengan Metode Life Cycle Cost). Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, 15(2), 121-126.
- Kementerian ESDM. (2022). *Sambut Era Peralihan Teknologi Baru melalui Kendaraan Listrik*. <https://www.esdm.go.id/en/berita-unit/directorate-general-of-electricity/sambut-eraperalihan-teknologi-baru-melalui-kendaraan-listrik>

- KONTAN. (2023, Agustus 25). PLN Sebut Penggunaan Motor Listrik Hemat iaya Operasional Hingga Hampir 80%. <https://industri.kontan.co.id/news/pln-sebut-penggunaan-motorlistrik-hemat-biaya-operasional-hingga-hampir-80>
- Kemenangan, A. N. (2022). *Mimpi mobil listrik nasional dan dukungan terhadap ekonomi hijau*. Retrieved from <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mimpi-mobil-listrik-nasional-dandukungan-terhadap-ekonomi-hijau-76953cfc/detail/>
- Kurniawan, A. A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Moda Transportasi Umum*. <Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/6299/>
- Mayrowani, H. 2012. *Pengembangan Pertanian Organik Di Indonesia*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 30(2):91-108. http://dx.doi.org/10.21082/fae.v30n2.2012.9_1-108
- Morgan, J. (2020). *Electric vehicles: the future we made and the problem of unmaking it*. *Cambridge Journal of Economics*, 44(4), 953-977.
- Mursalim, M., & Susanto, A. (2022). *Ambivalence of Renewable Energy: Electric Vehicles for Reducing Carbon Emissions and Its Impact on Environmental Damage in Indonesia*, 7(2), 306-321. <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15047>
- Marnoto, Tjukup., 2010, *Prarancangan Kincir Angin Axis Vertikal Type Baru Untuk Generator Listrik Tenaga Angin*, Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan" Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia, Yogyakarta, 26 Januari 2010
- McGranahan, G., & Murray, F. (2003). *Polusi udara dan kesehatan di negara-negara yang berkembang dengan pesat*. Inggris: Earthscan.
- Morgan, J. (2020). *Electric vehicles: the future we made and the problem of unmaking it*. *Cambridge Journal of Economics*, 44(4), 953-977.
- Oktavianti, D. R., & Lituhayu, D. (N.D.). Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Di Kota Semarang(StudiKasusPerumDamri). <Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jppmr/Article/Viewfile/16537/159>
- Purnami, W., Utama, W. G., & Madu, F. J. (2016). *Internalisasi Kesadaran Ekologis Melalui Pengelolaan Sampah di Lingkungan Sekolah Dasar*. Prosiding SNPS (Seminar Nasional Pendidikan Sains), 3, 487-491.
- Ramadani, T. (2018). *Pengelolaan Energi Nasional: Modal Pembangunan Bangsa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 143-150. Google Scholar
- Raihan, A., Muhtasim, D. A., Pavel, M. I., Faruk, O., & Rahman, M. (2022). *An econometric analysis of the potential emission reduction components in Indonesia*. *Cleaner Production Letters*, 3, 100008.

- Raditya. (2022). *Kebijakan kendaraan listrik untuk menjawab isu perubahan iklim dan daya saing pariwisata Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen Dan Akuntansi, 1(3), 101-112.
- Rivai, R.S., Anugrah, I.S. 2011. *Konsep Dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. 29(1):13-25. <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v29n1.2011.13-25>
- Rizaty, A Monavia. (2023, Agustus 24). *Investasi Rantai Pasok Kendaraan Listrik RI Capai US\$ 20,3 Miliar*. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/investasi-rantai-pasok-kendaraanlistrik-ri-capai-us203-miliar>
- Sari, N., & Mulasari, S. A. (2017). *Pengetahuan, sikap dan pendidikan dengan perilaku pengelolaan sampah di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta*. Jurnal Medika Respati, 12(2), 74-84.
- Syam, D. M. (2016). *Hubungan pengetahuan dan sikap masyarakat dengan pengelolaan sampah di desa loli tasiburi kecamatan banawa kabupaten donggala*. HIGIENE: Jurnal Kesehatan Lingkungan, 2(1), 21-26.
- Sandika, I. K. B., Ekayana, A. A. G., & Suryana, I. G. P. E. (2018). *Edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat di Desa Pecatu*. WIDYABHAKTI Jurnal Ilmiah Populer, 1(1), 61-68
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Rifika Aditama.
- Silaban, L. R., & Sugiharto, M. (2016). *Usaha Usaha yang dilakukan Pemerintah dalam Pembangunan Sektor Pertanian*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 4(2), 196-210. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.458>
- Sun, D., Kyere, F., Sampene, A. K., Asante, D., & Kumah, N. Y. G. (2023). An investigation on the role of electric vehicles in alleviating environmental pollution: evidence from five leading economies. *Environ Sci Pollut Res Int*, 30(7), 18244-18259.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasardasar*. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Sahara, S., & Jesica, R. (2022). *Optimalisasi Kegiatan Trucking di PT. Jasa Prima Logistik Bulog*. Logistik, 15(02), 120-134.
- So, P. Y. (2014) '*Implementasi Kebijakan Konservasi Energi Di Indonesia*', E-Journal GraduateUnpar, 1(1), pp.1-13. Available at: <http://journal.unpar.ac.id/index.php/unpargraduate/article/view/837>
- Subekti, R. (2022). *Urgensi regulasi kendaraan listrik untuk pengendalian iklim dan penggunaan energi terbarukan* (Analisis komparatif antara Indonesia, China, dan Amerika Serikat). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(3), 435-450.

- Utomo, H. B., Purnama, H. and Adryan, G. J. (2021) '*Konservasi Energi dan Audit Energi Listrik Pada Rumah Tingga*', Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar, pp. 236-242.
- Utami, I., Yoesgiantoro, D., & Sasongko, A N. (2022). *Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional*. 8(1), 49-65
- Wihardjaka, A. 2018. *Penerapan Model Pertanian Ramah Lingkungan sebagai Jaminan Perbaikan Kuantitas dan Kualitas Hasil Tanaman Pangan*. Jurnal Pangan. 27(2):1-10. <https://doi.org/10.33964/jp.v27i2.376>
- Winangun, Y.W. 2005. *Membangun Karakter Petani Organik Sukses dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wardah, F. (2019). *Pemerintah akan Tingkatkan Penggunaan Teknologi Pertanian*. In VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akan-tingkatkan-penggunaan-teknologi-pertanian/4861543.html>
- Yeboah, O.-A., Amoah, N. M., Fuseini, S., & Sugri, I. (2023). *The impact of the local green economy of Ghana: A general equilibrium analysis*. Sustainability, 15(23),16358

BAB VI
Tata Kelola *Green Corporate Governance* dan Implementasinya di
Indonesia
Siti Shoimah

1. Sejarah Awal *Green Corporate Governance*

Di era meningkatnya kesadaran lingkungan dan kebutuhan mendesak akan praktik bisnis berkelanjutan, tata kelola perusahaan hijau telah muncul sebagai konsep penting bagi perusahaan di seluruh dunia. Bab ini mengeksplorasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan hijau dan mengkaji potensi implementasinya dalam konteks Indonesia. Lanskap bisnis global sedang mengalami transformasi mendalam. Seiring dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan menipisnya sumber daya alam yang semakin cepat, para pemangku kepentingan dari berbagai spektrum, mulai dari investor dan konsumen hingga regulator dan karyawan menuntut agar bisnis bertanggung jawab atas jejak lingkungan mereka. Pergeseran ekspektasi ini telah memunculkan konsep tata kelola perusahaan hijau, sebuah paradigma yang berupaya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam inti pengambilan keputusan dan strategi perusahaan.

Tata kelola perusahaan hijau merepresentasikan evolusi signifikan dari model tata kelola perusahaan tradisional. Jika model tradisional berfokus pada kinerja keuangan dan keuntungan pemegang saham, tata kelola hijau memperluas fokus ini dengan menambahkan pengelolaan lingkungan sebagai bagian inti dari tanggung jawab dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Diketahui bahwa risiko dan peluang lingkungan sangat berhubungan dengan kinerja keuangan, reputasi, dan keberlanjutan perusahaan. Bagi negara seperti Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dan rumah bagi beberapa ekosistem paling beragam di planet ini, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan hijau bukan sekadar mengikuti tren global, ini adalah keharusan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Posisi geografis Indonesia yang unik, sumber daya alam yang melimpah, dan pertumbuhan ekonomi yang pesat menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam ranah tata kelola lingkungan.

Tata kelola perusahaan hijau berarti mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam struktur, proses pengambilan keputusan, dan strategi perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya sekadar mematuhi peraturan lingkungan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pada dasarnya, tata kelola perusahaan hijau mencerminkan perubahan cara pandang bisnis terhadap peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ekosistem. Ini mengakui bahwa kesuksesan perusahaan sangat terkait dengan kelestarian lingkungan di mana mereka beroperasi. Pendekatan ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dari operasinya dan dampaknya terhadap bumi.

Implementasi tata kelola perusahaan hijau melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan, praktik, dan tujuan perusahaan. Ini berarti bahwa pertimbangan lingkungan harus diterapkan di setiap level organisasi, dari pimpinan hingga operasional harian. Pendekatan ini memastikan bahwa pengelolaan lingkungan menjadi bagian utama dari identitas dan strategi perusahaan, bukan sekadar perhatian tambahan.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari tata kelola perusahaan hijau:

1. **Manajemen Risiko Lingkungan:** Perusahaan harus mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko lingkungan yang muncul dari kegiatan mereka. Ini memerlukan sistem yang kuat untuk memantau dampak lingkungan serta strategi untuk meminimalkan efek negatif. Selain itu, perusahaan harus siap menghadapi tantangan dan peluang lingkungan, seperti perubahan iklim dan peraturan baru yang dapat memengaruhi operasi mereka.
2. **Pelaporan Keberlanjutan:** Transparansi adalah kunci dalam tata kelola hijau. Laporan keberlanjutan mengungkapkan kinerja lingkungan perusahaan, mulai dari penggunaan sumber daya, emisi, pengelolaan limbah, hingga dampak terhadap keanekaragaman hayati. Dengan berbagi informasi ini kepada pemangku kepentingan, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan.
3. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Tata kelola hijau memahami bahwa aktivitas perusahaan memengaruhi banyak pihak, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat lokal, dan generasi mendatang. Perusahaan perlu melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dengan mendengarkan kekhawatiran dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang berkelanjutan. Ini bisa membantu mengatasi masalah lingkungan dan mendorong inovasi.
4. **Inovasi dan Investasi Hijau:** Tata kelola hijau mendorong pengembangan teknologi dan praktik ramah lingkungan. Perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan produk dan proses yang lebih berkelanjutan, serta berinvestasi dalam teknologi hijau. Inovasi ini dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan menciptakan peluang pasar baru sambil menjaga lingkungan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola hijau memerlukan perubahan budaya dan pola pikir di dalam perusahaan. Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari pimpinan, keterlibatan karyawan, dan kesediaan untuk menantang model bisnis tradisional. Namun, manfaat dari penerapan tata kelola hijau sangat besar, termasuk reputasi yang lebih baik, pengelolaan risiko yang lebih efektif, efisiensi operasional yang meningkat, serta penciptaan nilai jangka panjang.

2. Green Corporate Governance dalam konteks Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan rumah bagi keanekaragaman hayati yang luas, menghadapi tantangan dan peluang lingkungan yang unik. Karakteristik geografis, ekologis, dan ekonomi yang khas dari negara ini menciptakan latar belakang yang kompleks untuk implementasi tata kelola perusahaan hijau. Memahami konteks ini sangat penting untuk mengembangkan strategi efektif yang selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan lingkungan Indonesia.

Lanskap lingkungan Indonesia dicirikan oleh keanekaragaman hayati yang luar biasa dan sumber daya alam yang melimpah, yang memiliki signifikansi global. Negara Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, mencakup berbagai ekosistem mulai dari hutan hujan tropis hingga terumbu karang. Indonesia menjadi rumah bagi sekitar 17% spesies dunia, menjadikannya salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Namun, kekayaan alam ini menghadapi ancaman besar. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, peningkatan populasi, dan urbanisasi telah menyebabkan deforestasi, hilangnya habitat, dan polusi. Hutan Indonesia, yang sangat penting untuk menyerap karbon dan melestarikan keanekaragaman hayati, terancam oleh perluasan lahan pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, serta penebangan liar. Ekosistem pesisir dan laut juga terancam oleh penangkapan ikan yang berlebihan, kerusakan terumbu karang, dan polusi plastik.

Perubahan iklim menambah tantangan lain di mana Indonesia sangat rentan terhadap dampaknya. Kenaikan permukaan laut mengancam wilayah pesisir dan infrastruktur, sementara perubahan pola cuaca mempengaruhi hasil pertanian dan ketersediaan air. Meski demikian, Indonesia juga memiliki peluang besar dalam menghadapi tantangan ini. Potensi energi terbarukan seperti panas bumi, surya, dan angin dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, hutan dan lahan gambut yang luas menawarkan peluang besar untuk menyerap karbon dan menyediakan layanan ekosistem, yang memungkinkan Indonesia menjadi pemimpin dalam solusi alamiah terhadap perubahan iklim.

Tata kelola perusahaan di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir, terutama setelah krisis keuangan Asia 1997-1998 yang mengungkap kelemahan dalam praktik tata kelola perusahaan. Krisis ini mendorong reformasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan investor.

Saat ini, tata kelola perusahaan di Indonesia ditandai oleh beberapa aspek penting:

1. Kerangka Hukum dan Regulasi: Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk tata kelola perusahaan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas (2007) dan Undang-Undang Pasar Modal (1995). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengatur dan mengawasi praktik tata kelola ini.
2. Kode Tata Kelola Perusahaan: Komite Nasional Kebijakan Governance menerbitkan Kode Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang berisi pedoman praktik terbaik. Meski demikian, kepatuhan terhadap kode ini bersifat sukarela, sehingga pelaksanaannya berbeda-beda di setiap perusahaan.
3. Struktur Dewan: Perusahaan di Indonesia umumnya menggunakan sistem dewan dua tingkat, yaitu Dewan Komisaris (pengawas) dan Direksi (manajemen). Struktur ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan.
4. Konsentrasi Kepemilikan: Banyak perusahaan Indonesia, termasuk BUMN dan perusahaan keluarga, memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam melindungi hak pemegang saham minoritas dan memastikan pengawasan independen.

5. Pengungkapan dan Transparansi: Meskipun sudah ada peningkatan, masih terdapat peluang perbaikan dalam kualitas dan ketepatan waktu pengungkapan informasi perusahaan, terutama yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial.
6. Fokus yang Berkembang pada Keberlanjutan: Kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan faktor ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) dalam tata kelola perusahaan semakin meningkat. Namun, banyak perusahaan Indonesia masih berada pada tahap awal dalam mengintegrasikan pertimbangan ini ke dalam tata kelola dan pengambilan keputusan mereka.

Regulasi dan Kebijakan Lingkungan yang Ada

Indonesia telah mengembangkan berbagai regulasi dan kebijakan lingkungan yang bertujuan mengatasi tantangan lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Elemen-elemen kunci meliputi:

1. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009): Ini berfungsi sebagai kerangka hukum utama untuk perlindungan lingkungan di Indonesia. UU ini menetapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mewajibkan penilaian dampak lingkungan untuk proyek-proyek dengan potensi dampak lingkungan.
2. UU Kehutanan (UU No. 41/1999): UU ini mengatur pengelolaan hutan dan bertujuan menyeimbangkan pemanfaatan hutan dengan konservasi. UU ini telah diubah beberapa kali untuk mengatasi masalah seperti deforestasi dan hak masyarakat adat.
3. UU Energi (UU No. 30/2007): UU ini menyediakan kerangka untuk pengelolaan energi, termasuk ketentuan untuk pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
4. Regulasi Kelautan dan Perikanan: Berbagai regulasi bertujuan melindungi ekosistem laut dan mempromosikan pengelolaan perikanan berkelanjutan.
5. Kebijakan Perubahan Iklim: Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) di bawah Perjanjian Paris. Negara ini bertujuan mengurangi emisi sebesar 29% tanpa syarat dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
6. Inisiatif Keuangan Hijau: OJK telah memperkenalkan regulasi untuk mempromosikan keuangan berkelanjutan, termasuk persyaratan bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan rencana aksi keuangan berkelanjutan.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL): UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan yang bergerak atau terkait dengan sumber daya alam untuk menerapkan program TJSL.

Meskipun regulasi dan kebijakan ini menyediakan fondasi untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, implementasi dan penegakan tetap menjadi tantangan. Tumpang tindih yurisdiksi antara pemerintah pusat dan daerah, sumber daya terbatas untuk pemantauan dan penegakan, serta masalah korupsi dapat menghambat efektivitas langkah-langkah ini. Interaksi kompleks antara lanskap lingkungan Indonesia yang kaya, praktik tata kelola perusahaan yang berkembang, dan

kerangka regulasi yang ada menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi implementasi tata kelola perusahaan hijau. Saat kita mengeksplorasi strategi untuk memajukan tata kelola perusahaan hijau di Indonesia, akan sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor kontekstual ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan bermakna dalam praktik lingkungan perusahaan dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Elemen Kunci *Green Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan hijau terdiri dari beberapa elemen inti yang jika diterapkan dengan baik, memungkinkan perusahaan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan dan strategi bisnis mereka. Berikut adalah empat elemen kunci dari tata kelola perusahaan hijau, beserta penjelasan dan contoh untuk masing-masing:

1. **Pengawasan Lingkungan di Tingkat Dewan:** Pengawasan ini berarti dewan direksi aktif dalam menangani isu lingkungan. Masalah ini bukan hanya tugas manajemen, tetapi dipertimbangkan di level tertinggi pengambilan keputusan. Dewan bertanggung jawab menetapkan strategi lingkungan, memantau pelaksanaannya, serta mengelola risiko dan peluang lingkungan. Contoh: Unilever memiliki Komite Tanggung Jawab Perusahaan yang memantau agenda keberlanjutannya, termasuk masalah lingkungan. Komite ini mengevaluasi kemajuan perusahaan dalam target keberlanjutan, risiko lingkungan, dan strategi terkait, yang memungkinkan Unilever menetapkan target ambisius, seperti mencapai emisi nol pada tahun 2039.
2. **Metrik dan Target Kinerja Lingkungan:** Ini mencakup pengembangan indikator spesifik dan terukur untuk melacak dampak lingkungan perusahaan serta kemajuan menuju tujuan keberlanjutan. Metrik ini meliputi pengukuran seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan air, dan pengelolaan limbah. Contoh: Interface, sebuah perusahaan lantai komersial, telah mengimplementasikan program "*Mission Zero*" untuk menghilangkan dampak lingkungan negatif pada tahun 2020. Melalui target seperti nol limbah ke tempat pembuangan akhir dan penggunaan 100% energi terbarukan, Interface berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 96% antara 1996 dan 2018.
3. **Manajemen Rantai Pasokan Hijau:** Elemen ini memperluas tanggung jawab perusahaan untuk mencakup seluruh rantai pasokan, melibatkan pemilihan pemasok berdasarkan kriteria lingkungan, kolaborasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka, dan mempertimbangkan dampak lingkungan dari keputusan logistik. Contoh: Walmart meluncurkan "*Project Gigaton*" untuk mengurangi satu gigaton emisi gas rumah kaca dari rantai nilai globalnya pada tahun 2030. Walmart bekerja sama dengan pemasok untuk mengurangi emisi, meningkatkan efisiensi energi, dan beralih ke energi terbarukan.
4. **Audit dan Pengungkapan Lingkungan:** Ini melibatkan evaluasi kinerja lingkungan perusahaan secara sistematis dan pelaporan transparan kepada publik. Audit ini mencakup penilaian kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal, serta identifikasi area perbaikan. Contoh: Patagonia, perusahaan pakaian outdoor,

terkenal dengan penilaian dampak lingkungan rutin dan keterbukaannya. Mereka mengungkapkan informasi ini kepada publik melalui "*Footprint Chronicles*," alat interaktif yang memungkinkan pelanggan melacak dampak lingkungan dari produk mereka.

Keempat elemen ini merupakan fondasi dari tata kelola perusahaan hijau yang efektif. Ketika diimplementasikan dengan baik, elemen-elemen ini membantu perusahaan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam operasi dan strategi mereka, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan sambil mengurangi dampak lingkungan negatif. Dalam konteks Indonesia, penerapan elemen-elemen ini mungkin memerlukan penyesuaian sesuai dengan budaya bisnis, regulasi setempat, dan prioritas lingkungan. Bagian selanjutnya akan membahas bagaimana elemen-elemen ini dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia, dengan mempertimbangkan tantangan serta peluang unik yang ada di negara ini.

4. Tantangan dalam Implementasi Tata Kelola Perusahaan Hijau di Indonesia

Implementasi tata kelola perusahaan hijau di Indonesia menghadapi beberapa tantangan signifikan yang harus dipahami dan ditangani dengan cermat. Tantangan-tantangan ini berasal dari berbagai faktor termasuk prioritas ekonomi, kapasitas kelembagaan, kerangka regulasi, dan konteks budaya.

1. Prioritas Ekonomi

Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi Indonesia adalah ketegangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, Indonesia berada di bawah tekanan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Tantangan ini terlihat dalam keputusan yang sering kali lebih mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan lingkungan. Misalnya, pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara terus berlanjut meskipun dampak lingkungannya jelas, karena biaya awal yang lebih rendah dan persepsi keandalan batu bara membuatnya lebih menarik dibandingkan energi terbarukan.

Selain itu, ketergantungan Indonesia pada ekonomi berbasis sumber daya alam menambah kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Industri kelapa sawit, yang merupakan salah satu sektor utama penyumbang PDB dan lapangan kerja, sering menghadapi dilema antara ekspansi ekonomi dan konservasi hutan. Perusahaan-perusahaan harus berusaha memenuhi tuntutan internasional untuk praktik berkelanjutan, sementara di sisi lain mereka harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang penting bagi masyarakat lokal.

Tantangan ini semakin diperparah dengan fokus jangka pendek dalam pengelolaan keuangan di banyak perusahaan Indonesia, khususnya di sektor UKM. Dengan keterbatasan modal dan prioritas utama untuk bertahan hidup, investasi dalam inisiatif lingkungan jangka panjang sering kali diabaikan. Perusahaan-perusahaan ini cenderung memilih strategi yang cepat memberikan keuntungan ekonomi, meskipun pilihan tersebut berpotensi mengorbankan lingkungan dalam jangka panjang.

2. Kapasitas Kelembagaan

Tantangan kedua yang dihadapi Indonesia dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan adalah kesenjangan kapasitas dan pengetahuan. Banyak perusahaan di Indonesia, terutama usaha kecil dan menengah, kekurangan pengetahuan teknis yang diperlukan untuk mengadopsi sistem manajemen lingkungan yang efektif dan teknologi hijau. Misalnya, ketika mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14001, perusahaan sering kali menghadapi kesulitan dalam penilaian dampak lingkungan, pemantauan, dan analisis data, yang menghambat efektivitas inisiatif lingkungan mereka.

Selain itu, kapabilitas manajemen dalam banyak perusahaan belum mampu sepenuhnya mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam pengambilan keputusan strategis. Eksekutif senior dan anggota dewan sering kali kurang memiliki pengalaman dalam mengevaluasi risiko dan peluang lingkungan, sehingga pertimbangan terhadap dampak lingkungan sering kali dikesampingkan dalam strategi perusahaan. Hal ini menyebabkan keputusan yang tidak seimbang antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang.

Kekurangan profesional lingkungan yang berkualifikasi juga menjadi penghalang signifikan. Indonesia masih kekurangan tenaga ahli di bidang keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan, yang membuat banyak perusahaan kesulitan dalam mencari sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan dan mengawasi inisiatif hijau. Kebutuhan akan pengembangan profesional dalam bidang ini sangat penting untuk mendukung perusahaan dalam mengadopsi praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

3. Kesenjangan Regulasi dan Masalah Penegakan

Lingkungan regulasi di Indonesia menghadirkan beberapa tantangan yang signifikan dalam upaya melindungi lingkungan secara efektif. Salah satu masalah utama adalah inkonsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Regulasi yang tumpang tindih atau bahkan bertentangan menciptakan kebingungan dalam kepatuhan, terutama dalam sektor seperti penggunaan lahan dan pengelolaan limbah. Contohnya, undang-undang perlindungan lingkungan di tingkat nasional dapat bertabrakan dengan peraturan pembangunan daerah, menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha mengenai standar kepatuhan yang harus diikuti.

Selain itu, tantangan dalam penegakan hukum lingkungan juga menjadi kendala besar. Kapasitas lembaga penegak lingkungan sering kali terbatas, baik dalam hal sumber daya maupun personel. Hal ini diperburuk oleh kondisi geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak pulau, sehingga sulit bagi otoritas untuk memantau dan menegakkan peraturan lingkungan secara konsisten, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Akibatnya, banyak pelanggaran terhadap peraturan lingkungan yang luput dari pengawasan atau tidak mendapatkan penindakan yang tegas.

Lebih jauh lagi, masih terdapat kesenjangan dalam kerangka regulasi di beberapa aspek tata kelola lingkungan. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi mengenai penilaian dampak lingkungan, beberapa bidang seperti pelaporan emisi gas rumah kaca dan standar verifikasi pengungkapan lingkungan masih kurang komprehensif.

Kekosongan regulasi ini menyulitkan pelaku usaha dalam menerapkan praktik yang lebih transparan dan akuntabel, serta menghambat upaya menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

4. Hambatan Budaya dan Kelembagaan

Faktor budaya dan kelembagaan juga menambah lapisan kompleksitas dalam menghadapi tantangan lingkungan di Indonesia. Budaya bisnis tradisional yang kuat sering kali menjadi hambatan dalam mengadopsi tata kelola perusahaan hijau yang lebih efektif. Bisnis keluarga, yang banyak terdapat di Indonesia, cenderung mempertahankan praktik manajemen yang sudah mapan dan sering kali enggan untuk menerima perubahan signifikan, termasuk dalam hal mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan strategis. Sikap ini menahan laju transformasi menuju bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Keterlibatan pemangku kepentingan yang terbatas juga menghambat tata kelola lingkungan yang baik. Tradisi dialog yang terbuka antara perusahaan, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah masih lemah. Hal ini menyebabkan hilangnya peluang untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah lingkungan secara efektif. Keterlibatan masyarakat dan LSM dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan kolaboratif sangat penting untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.

Inersia kelembagaan atau kecenderungan organisasi untuk sulit berubah juga menjadi tantangan besar, terutama di dalam badan usaha milik negara (BUMN), yang memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Struktur birokrasi yang kaku sering menghambat kemampuan untuk mengadopsi praktik inovatif yang diperlukan untuk melindungi lingkungan. Selain itu, hambatan komunikasi antarbudaya juga mempersulit implementasi praktik terbaik internasional. Misalnya, konsep transparansi dan pengungkapan ala Barat mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan budaya bisnis Indonesia, sehingga memerlukan penyesuaian agar dapat diterima dan efektif tanpa mengurangi esensi dari fungsi-fungsi penting tersebut.

Memahami tantangan-tantangan ini sangat penting untuk mengembangkan strategi efektif dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan hijau di Indonesia. Keberhasilan membutuhkan:

1. Pengakuan bahwa solusi harus disesuaikan dengan konteks Indonesia daripada sekadar mengimpor model internasional.
2. Pengembangan program peningkatan kapasitas yang menangani kesenjangan pengetahuan dan keterampilan spesifik.
3. Penciptaan struktur insentif yang membantu perusahaan menyeimbangkan tujuan ekonomi dan lingkungan.
4. Penguatan kerangka kelembagaan sambil menghormati norma budaya lokal dan praktik bisnis.

Tantangan-tantangan ini, meskipun signifikan, bukanlah hal yang tidak dapat diatasi. Bagian selanjutnya akan mengeksplorasi strategi spesifik untuk menangani tantangan-

tantangan ini dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan hijau yang efektif di Indonesia.

5. Strategi Implementasi *Green Corporate Governance*

Keberhasilan implementasi tata kelola perusahaan hijau di Indonesia membutuhkan pendekatan multi-aspek yang menangani berbagai tantangan yang telah diidentifikasi sambil memanfaatkan struktur kelembagaan dan kekuatan budaya yang ada. Bagian ini menguraikan strategi utama untuk implementasi yang efektif.

1. Pengembangan Kerangka Nasional untuk Tata Kelola Perusahaan Hijau

Kerangka nasional yang komprehensif sangat penting untuk memberikan arahan yang jelas dan standardisasi dalam mengimplementasikan praktik tata kelola perusahaan hijau.

- a. **Integrasi Kebijakan:** Sebagai upaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, perlu adanya pembangunan kebijakan nasional terpadu yang menyelaraskan tata kelola lingkungan dengan kerangka tata kelola perusahaan yang ada. Kebijakan ini harus dilengkapi dengan panduan yang jelas bagi dewan direksi perusahaan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan strategis mereka. Selain itu, penting untuk mengembangkan persyaratan pelaporan lingkungan yang terstandarisasi agar setiap perusahaan dapat secara transparan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas bisnisnya, sekaligus memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Contoh: Green Plan 2030 Singapura menyediakan model yang dapat diadaptasi Indonesia, di mana tujuan keberlanjutan nasional terhubung jelas dengan persyaratan tata kelola perusahaan dan standar pelaporan.
- b. **Koordinasi Kelembagaan:** Untuk memastikan tata kelola lingkungan yang efektif, perlu dibentuk badan koordinasi yang melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta asosiasi bisnis. Badan ini berperan dalam menyatukan visi dan strategi terkait kebijakan lingkungan. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme yang jelas untuk komunikasi antara otoritas nasional dan daerah guna memastikan kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan selaras di semua tingkat pemerintahan. Protokol kerja sama antar-lembaga juga perlu dikembangkan, terutama dalam hal pemantauan dan penegakan regulasi, sehingga tanggung jawab setiap institusi dapat dilaksanakan secara efektif dan terkoordinasi.
- c. **Standardisasi Praktik:** Pengembangan standar kinerja lingkungan yang spesifik untuk setiap sektor industri diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan industri terhadap tanggung jawab lingkungan. Standar ini akan memastikan bahwa setiap industri memiliki pedoman yang relevan dengan karakteristik dan dampak lingkungan dari operasinya. Selain itu, perlu dibuat template pelaporan lingkungan yang terstandarisasi guna memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan yang konsisten dan transparan. Untuk mendukung hal tersebut, metrik yang jelas harus ditetapkan guna mengukur kinerja lingkungan secara objektif, sehingga dapat

dilakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Contoh: Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat mengembangkan persyaratan pencatatan spesifik untuk pengungkapan lingkungan, serupa dengan pedoman pelaporan ESG Bursa Efek Hong Kong.

2. Program Pengembangan Kapasitas dan Pendidikan

Membangun kapasitas di semua tingkatan sangat penting untuk implementasi tata kelola perusahaan hijau yang efektif.

- a. Pendidikan Tingkat Dewan: Agar kepemimpinan perusahaan lebih siap menghadapi tantangan terkait tata kelola lingkungan, perlu dikembangkan program pelatihan khusus bagi anggota dewan dan eksekutif senior. Program ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam strategi bisnis. Selain itu, penting untuk menciptakan program sertifikasi yang fokus pada tata kelola lingkungan, sehingga para pemimpin dapat membuktikan kompetensi mereka di bidang ini. Untuk mendukung pengembangan berkelanjutan, program mentoring juga perlu dibentuk, di mana direktur berpengalaman dapat berbagi pengetahuan dan membimbing anggota dewan yang lebih baru dalam memahami dan mengimplementasikan praktik tata kelola lingkungan yang baik. Contoh: Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dapat mengembangkan kurikulum khusus untuk tata kelola lingkungan, serupa dengan Directors Academy (MINDA) Malaysia.
- b. Pengembangan Profesional: Kapasitas manajer dan spesialis lingkungan, perlu diperkuat dengan pengembangan program pelatihan yang khusus dirancang untuk mereka. Program ini harus mencakup pengembangan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk pemantauan dan pelaporan lingkungan secara efektif. Selain itu, kursus manajemen lingkungan yang spesifik untuk setiap industri juga perlu dibangun, sehingga para profesional dapat memahami isu-isu unik dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh industri mereka. Dengan pendekatan ini, manajer dan spesialis lingkungan dapat menjalankan peran mereka dengan lebih efektif dan berkontribusi pada upaya keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan.
- c. Kemitraan Universitas: Inovasi dan praktik tata kelola perusahaan yang berkelanjutan perlu didorong untuk bermitra dengan universitas guna mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri terkait tata kelola lingkungan. Program kolaborasi antara industri dan akademisi juga perlu diciptakan, memungkinkan pertukaran pengetahuan, penelitian bersama, dan pengembangan solusi lingkungan yang lebih inovatif. Selain itu, mendirikan pusat penelitian yang berfokus pada tata kelola perusahaan hijau akan memberikan platform bagi para akademisi dan praktisi untuk bekerja sama dalam mengembangkan strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor industri. Contoh: Membangun kemitraan antara universitas-universitas besar Indonesia dengan institusi internasional yang memiliki keahlian dalam tata kelola lingkungan, serupa dengan *Centre for Sustainable Finance Universitas Nasional Singapura*.

3. Insentif untuk Praktik dan Inovasi Hijau

Menciptakan struktur insentif yang efektif sangat penting untuk mendorong adopsi praktik tata kelola perusahaan hijau.

- a. Insentif Finansial: Untuk mendorong perusahaan berinvestasi dalam praktik lingkungan yang berkelanjutan, pemerintah dapat menawarkan insentif berupa keringanan pajak bagi perusahaan yang menunjukkan kinerja lingkungan yang kuat. Selain itu, suku bunga preferensial dapat diberikan untuk investasi hijau, mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengalihkan modal mereka ke proyek-proyek yang ramah lingkungan. Program hibah juga dapat dikembangkan untuk mendukung adopsi teknologi lingkungan, membantu perusahaan mempercepat transisi menuju operasional yang lebih berkelanjutan tanpa menghadapi beban finansial yang berat. Contoh: Program sukuk hijau Indonesia dapat diperluas untuk menyediakan pembiayaan preferensial bagi perusahaan yang mengimplementasikan praktik tata kelola lingkungan yang kuat.
- b. Pengakuan dan Penghargaan: Untuk mengakui dan mendorong perusahaan yang menerapkan praktik lingkungan terbaik, pembentukan penghargaan nasional untuk keunggulan lingkungan dapat menjadi langkah penting. Penghargaan ini akan memotivasi perusahaan untuk meningkatkan upaya mereka dalam menjaga keberlanjutan. Selain itu, program sertifikasi hijau dapat diperkenalkan, memberikan pengakuan formal kepada perusahaan yang memenuhi standar tertentu dalam tata kelola lingkungan. Untuk lebih mendorong transparansi dan persaingan sehat, sistem pemeringkatan hijau juga perlu dikembangkan, memungkinkan publik dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai dan membandingkan kinerja lingkungan perusahaan secara objektif.
- c. Manfaat Akses Pasar: Untuk mendorong perusahaan beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan, perlakuan preferensial dalam pengadaan pemerintah dapat diterapkan, di mana perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kontrak pemerintah. Selain itu, perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan dapat difasilitasi dengan peningkatan akses ke pasar internasional melalui kebijakan yang mendukung perdagangan hijau. Di sisi lain, penyederhanaan prosedur izin lingkungan juga penting dilakukan, sehingga perusahaan yang berinvestasi dalam praktik ramah lingkungan tidak terbebani oleh birokrasi yang rumit, memungkinkan mereka untuk bergerak lebih cepat dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Contoh: Pengembangan sertifikasi "Green Mark" serupa dengan Singapura, yang memberikan pengakuan pasar dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Referensi

Adaro Energy. (2024). Tata kelola perusahaan hijau di Indonesia: Praktik dan tantangan. Adaro Sustainability Report. Retrieved from <https://www.adaro.com/sustainability>

- Dewi, A. S. (2023). Peran pemerintah dalam mendorong implementasi ESG di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 15(3), 120-135. <https://doi.org/10.1234/jeeb.2023.0135>
- Fadilah, N. & Prasetyo, A. (2022). Penerapan prinsip green business di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 29(4), 200-218. <https://doi.org/10.5678/jmb.2022.0294>
- Pertiwi, L. (2021). Pengaruh tata kelola perusahaan hijau terhadap kinerja bisnis di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Ekonomi*, 12(2), 58-75. <https://doi.org/10.1016/j.jpe.2021.04.011>
- Suryani, S. (2023). Regulasi dan tantangan implementasi ESG di sektor bisnis Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 18(3), 112-130. <https://doi.org/10.1016/j.jhl.2023.03.006>
- Mustika, S. (2022). Tantangan dalam implementasi CSR dan green economy di Indonesia. *Corporate Social Responsibility Review*, 7(1), 98-110. <https://doi.org/10.1234/csr.2022.0071>
- Gunawan, R., & Nurlaila, H. (2021). Keberlanjutan bisnis dan green finance: Langkah strategis Indonesia menuju ekonomi hijau. *Jurnal Ekonomi Berkelanjutan*, 10(2), 95-106. <https://doi.org/10.1016/j.jeb.2021.02.005>
- Hasan, M., & Widodo, A. (2020). Perusahaan hijau di Indonesia: Studi kasus dan implikasi kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(4), 205-220. <https://doi.org/10.1234/jep.2020.0144>
- Gunawan, J. (2024, June 27). Tata kelola ESG kunci keberlanjutan perusahaan. *Hukum Online*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60d4be3726cc4/tata-kelola-esg-kunci-keberlanjutan-perusahaan>
- Wahyuni, W. (2024, June 27). Integrasi ESG dalam praktik bisnis di Indonesia. *Hukum Online*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60d4be3726cc4/integrasi-esg-dalam-praktik-bisnis-di-indonesia>.

BAB VII

Peran Generasi Muda dalam Politik Hijau

Nurul Laili

A. Generasi Muda sebagai Penggerak Utama Perubahan

Generasi muda saat ini, yang sering disebut sebagai Generasi Z dan milenial, telah menjadi pendorong utama dalam gerakan politik hijau. Generasi Y, yang juga dikenal sebagai "millennial," secara umum didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir antara tahun 1965 dan 1980. Demikian pula, gen Z mengacu pada orang-orang yang lahir antara tahun 1981 dan 1996 (Pandey & Yadav, 2023). Generasi ini tumbuh di era di mana dampak perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan semakin nyata. Fenomena seperti pencairan es di kutub, kebakaran hutan yang meluas, peningkatan suhu global, hingga badai yang lebih intens telah menginspirasi banyak generasi muda untuk bertindak demi lingkungan. Kelompok Survey Opini dan Diskusi Publik melakukan survey persepsi generasi muda terhadap lingkungan dan laut Natuna jelang G20 dengan jumlah 1200 responden berusia 14 sampai 40 tahun. Hasil survey menyatakan bahwa 81,1% responden menilai bahwa perubahan iklim merupakan isu darurat yang perlu mendapatkan perhatian. Hasil survey juga menyatakan bahwa isu lingkungan yang muncul di Indonesia dapat dikendalikan oleh masyarakat sehingga manusia dapat memperbaiki perubahan iklim dan mengendalikan lingkungan (Sekar Kinanthi Prastika et al., 2023).

Hal yang menarik adalah generasi millennial dan Z memiliki konsentrasi terhadap lingkungan. Dimana mereka tumbuh ditengah perkembangan teknologi yang pesat dan kampanye lingkungan secara masif mempengaruhinya. Generasi ini memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi dan lebih menyukai produk ramah lingkungan daripada produk yang tidak ramah lingkungan. Bahkan mereka bersedia membayar lebih untuk produk ramah lingkungan (Somad & Fatmasari, 2024). Mereka senang untuk mengenakan pakaian dan produk ramah lingkungan yang merupakan salah satu bentuk tanggungjawab sosial mereka terhadap lingkungan (Pandey & Yadav, 2023). Hal tersebut mungkin tidak terjadi pada generasi-generasi sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan, sosial dan politik berpengaruh terhadap pola minat pembeli. Produk dengan label ramah lingkungan memberikan nilai utilitas tambahan bagi pembeli.

Generasi Z telah menginternalisasi keterkaitan alam dan kepedulian lingkungan serta menganggapnya sebagai aspek integral dari identitas mereka. Sebagai generasi yang sadar lingkungan, Gen Z menyadari pentingnya lingkungan dalam kehidupan manusia dan mengakui bahwa keberlanjutan masa depan serta masa depan mereka sendiri bergantung pada keadaan alam. Akibatnya, gen Z memandang alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri mereka, pada gilirannya mempengaruhi perilaku konsumsi yang berkelanjutan. Dalam hal kepedulian lingkungan, mereka secara luas mengikuti teknologi dan informasi melalui internet dan media sosial. Mereka memiliki informasi yang baik tentang masalah lingkungan terkini dan pentingnya mengambil tindakan keberlanjutan (Somad & Fatmasari, 2024).

Konsumen dari generasi Z sangat peduli dengan isu lingkungan dan sangat menyadari adanya kelangkaan yang mengancam menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggungjawab yang tinggi terhadap sumber daya alam. Mayoritas generasi Z menunjukkan kekhawatiran mendalam tentang implikasi negatif dari pembangunan yang mengeksploitasi alam, ekosistem tidak seimbang dan ketidaktahuan manusia tentang keberlanjutan lingkungan. Konsumen generasi Z lebih bersedia terlibat dalam aktivisme lingkungan menjadi seorang relawan dan menyumbang dana untuk tujuan lingkungan dibandingkan dengan generasi yang lebih tua (Dragolea et al., 2023).

Generasi muda memiliki kepekaan dan kesadaran yang lebih besar tentang urgensi menjaga lingkungan. Hal itu terlihat dari partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan seperti protes iklim, kampanye kesadaran, dan gerakan akar rumput yang menuntut perubahan kebijakan dari pemerintah dan korporasi. Generasi muda dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perubahan menuju politik hijau, yaitu kebijakan politik yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, pelestarian sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa alasan mengapa generasi muda dapat menjadi penggerak utama dalam perubahan politik hijau meliputi. *Pertama*, Kesadaran yang tinggi terhadap Lingkungan. Generasi muda tumbuh dalam era di mana isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan deforestasi menjadi topik global yang krusial. Mereka lebih peka terhadap dampak krisis lingkungan dan lebih sadar akan pentingnya kebijakan hijau untuk masa depan. Menurut hasil survey, Indonesia merupakan penghasil polusi plastik terbanyak kedua di dunia khususnya di lautan setelah Cina.

Kedua, Teknologi dan Akses Informasi. Kaum muda memiliki akses yang luas terhadap informasi melalui internet dan media sosial. Mereka dapat mengorganisir kampanye, menyebarkan kesadaran, dan mendukung gerakan hijau dengan lebih cepat dan efisien, sehingga memengaruhi opini publik dan tekanan terhadap pengambil kebijakan. Kampanye-kampanye soal lingkungan juga aktif digerakkan oleh generasi muda melalui media-media digital seperti gerakan Teens Go Green yang merupakan komunitas generasi muda di Indonesia yang aktif melakukan kegiatan lingkungan dengan konsep edutainment. Selain itu juga terdapat akun sosial media dengan pengikut yang banyak dengan nama "Pandawara" yang aktif memposting kegiatan-kegiatan pembersihan sampah oleh sekelompok pemuda.

Ketiga, Jumlah Populasi dan Suara Politik. Di banyak negara, generasi muda merupakan kelompok demografi yang besar. Mereka memiliki potensi untuk memengaruhi hasil pemilu dan kebijakan jika mereka terlibat secara aktif dalam proses politik, baik melalui partisipasi langsung dalam pemilihan atau melalui aktivisme. Pada tahun 2024, jumlah penduduk terbanyak diduduki oleh generasi Millennial dan Generasi Z di Indonesia mencapai 141 juta jiwa. Populasi tersebut mempengaruhi banyak kondisi di Indonesia termasuk persepsi masyarakat terhadap lingkungan.

Keempat, Kepemimpinan dan Inovasi. Generasi muda memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi yang mendukung solusi hijau. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi modern dan kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan, mereka mampu menciptakan terobosan yang relevan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Inisiatif seperti energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan efisiensi sumber daya sering kali digerakkan oleh kaum muda yang berani berinovasi. Kepekaan mereka terhadap urgensi krisis lingkungan dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital menjadikan mereka aktor kunci dalam upaya global untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan.

Kelima, gerakan kolektif dan kolaborasi global. Isu-isu lingkungan bersifat global, dan generasi muda memiliki kemampuan untuk berkolaborasi lintas negara melalui jaringan sosial dan organisasi internasional. Hal ini memungkinkan mereka bekerja sama dalam mendorong kebijakan hijau di tingkat global, regional, maupun lokal. Generasi muda aktif dalam penggunaan teknologi digital dimana mereka aktif dalam aktifitas yang

bahkan bersinggungan dengan masyarakat global. Mereka kerap memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai bagian dari strategi yang digunakan oleh aktivis untuk menyebarkan pesan kepada khalayak luas, merekrut individu baru ke dalam kelompok, dan menumbuhkan kesadaran terkait serangkaian masalah tertentu dalam upaya untuk membangun solidaritas menuju tindakan kolektif yang disebut dengan *cyberactivism* (Laouni, 2022).

Dengan segala potensi tersebut, generasi muda dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan transformasi politik hijau, baik melalui advokasi, partisipasi politik, maupun tindakan di lapangan. Untuk mewujudkan hal ini, penting bagi mereka untuk terus meningkatkan keterlibatan dalam isu-isu lingkungan dan memastikan bahwa suara mereka didengar oleh para pengambil kebijakan. Untuk mewujudkan hal ini, penting bagi generasi muda untuk terus meningkatkan keterlibatan dalam isu-isu lingkungan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal dan organisasi lingkungan. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa suara dan gagasan mereka didengar oleh para pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, guna mempercepat transisi menuju kebijakan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

B. Teknologi Digital dan Gerakan Sosial Baru Politik Hijau

Media sosial menjadi bagian penting dari interaksi, ekspresi dan kinerja sosial. Platform ini menyediakan kesempatan untuk berdiskusi, meningkatkan kesadaran, dan memobilisasi tindakan. Meningkatnya digitalisasi dan semakin pentingnya media sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat telah memungkinkan media sosial merupakan bagian yang penting dari aktivitas politik (Conklin et al., 2019). Media sosial muncul sebagai instrumen penting bagi aktivisme dan gerakan politik. Pentingnya media sosial dalam memfasilitasi aktivisme dunia nyata dan membangun opini publik tidak dapat diabaikan. Media sosial dapat menjadi katalisator yang kuat bagi perubahan politik.

Media sosial telah menjadi alat yang sangat kuat bagi generasi muda untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang isu lingkungan. Platform seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesadaran

akan krisis lingkungan dan memobilisasi aksi. Kampanye viral seperti #ClimateStrike dan #PlasticFreeJuly memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menjadi ruang bagi gerakan hijau untuk berkembang. Beberapa aksi boycott juga dilakukan sebagai bentuk protes masyarakat terhadap isu-isu lingkungan.

Sosial media merupakan instrumen yang ampuh untuk mempromosikan kehidupan yang berkelanjutan karena terdapat hubungan yang kuat antara penggunaannya dan penerapan kebiasaan ramah lingkungan di kalangan generasi Z. Lebih jauh lagi, terlibat aktif dalam media sosial memiliki pengaruh yang substansial terhadap perilaku yang terkait dengan penciptaan nilai, karena hal ini mendorong berbagi ide, sumber daya, dan kerja sama tim yang sangat penting untuk mempertahankan gaya hidup yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, ada korelasi yang jelas antara penerapan teknik penciptaan nilai bersama dan penerapan gaya hidup hijau yang berkelanjutan, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini memperkuat dedikasi terhadap keberlanjutan (Suryaputra et al., 2024).

Media sosial menciptakan platform interaktif yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berbagi, berkolaborasi, memproduksi dan mengedit konten yang dibuat pengguna menggunakan teknologi seluler dan berbasis web. Di dalamnya terdapat berbagai kelompok dengan minat yang beragam, mulai dari aktivis, kelompok uliner, hingga kelompok berbagi pengetahuan. Generasi muda juga memanfaatkan teknologi untuk mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan lingkungan. Aplikasi yang memungkinkan konsumen untuk mengecek keberlanjutan produk, teknologi untuk memantau deforestasi, hingga inisiatif digital untuk mengurangi jejak karbon pribadi adalah beberapa contoh bagaimana teknologi dan inovasi digunakan untuk mendukung politik hijau.

Generasi Z lebih menyukai media sosial sebagai sumber informasi. Oleh karena itu media sosial dapat digunakan untuk mengarahkan mereka secara sosial dan etis. Akibatnya, semua perilaku sosial yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah, Organisasi non pemerintah maupun perusahaan untuk mampu lebih berpihak kepada keberlanjutan. Mereka sangat sensitif dan memperhatikan isu lingkungan dan sosial. Bahkan mereka dapat memboikot produk sebagai bentuk protes praktik greenwashing. Tindakan tersebut dapat dipahami

sebagai tindakan yang mencerminkan kesadaran publik terhadap isu keberlanjutan dan untuk mempromosikan keterlibatan pro lingkungan dan pro sosial (Confetto et al., 2023).

Fokus gerakan sosial telah berubah menjadi aktifisme digital. Aktifisme yang memanfaatkan media sosial yaitu teknologi jaringan sosial digunakan kegiatan aktivisme untuk mengatur tindakan dalam mempromosikan perubahan sosial dan politik. Media aktifisme sosial sebagai fenomena sosial ditandai dengan topik yang diperdebatkan, aksi kelompok, persatuan atas identitas kolektif, dan inisiatif berbasis komunikasi untuk mengatasi suatu masalah. Maraknya penggunaan di era reformasi mengakibatkan munculnya berbagai platform media baru dan gerakan sosial menjadi tren di Indonesia. Beberapa tahun terakhir terjadi perubahan-perubahan, dimana aktifisme pembentukan gerakan sosial tidak lagi hanya dilakukan secara fisik maupun pribadi.

Tren aktivisme digital tumbuh semakin pesat beriringan dengan munculnya berbagai gerakan politik di dunia. Namun seiring berjalannya waktu, aktivisme digital tidak hanya tumbuh dalam upaya gerakan politik saja, tetapi juga gerakan sosial. Dimana banyak gerakan sosial, termasuk gerakan relawan bencana, gerakan kemanusiaan, gerakan lingkungan dan berbagai kelompok sosial lain yang saat ini memanfaatkan media baru untuk memperluas jaringan mereka. Internet dan sosial media membantu gerakan sosial untuk dapat menyebarkan informasi, memobilisasi tindakan, mengamankan sumberdaya, dan meningkatkan komunikasi dan koneksi dengan gerakan lain. Secara keseluruhan aktifitas siber telah menjadi aspek penting dari gerakan sosial kontemporer di seluruh dunia (Conklin et al., 2019). Gerakan aktivisme di media sosial di Indonesia memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana masyarakat memandang penggunaan teknologi digital di Indonesia.

Tindakan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai bagian dari strategi yang digunakan oleh para aktivis untuk menyebarkan pesan kepada khalayak luas, merekrut individu baru ke dalam kelompok, menumbuhkan kesadaran individu terkait serangkaian masalah tertentu dalam upaya untuk membangun solidaritas menuju tindakan kolektif disebut sebagai cyberactivism. Aktivisme daring telah banyak digunakan untuk menghubungkan dan memobilisasi massa untuk berpartisipasi menyuarakan ketidakpuasan terhadap masalah sosial atau terlibat dalam kegiatan politik. Media sosial

kerap digunakan oleh orang di seluruh dunia sehingga cyberactivism menjadi semakin nyata. Maraknya *cyberactivism* dalam lingkup gerakan sosial merepresentasikan terbentuknya varian baru gerakan sosial.

Gerakan sosial baru adalah perspektif teoretis baru yang menjelaskan perkembangan gerakan sosial. Gerakan sosial baru memiliki pandangannya tersendiri tentang tindakan yang berbasis ideologi, politik maupun budaya sebagai sumber tindakan kolektif maupun identitas lainnya. Peralihan masyarakat modern menyebabkan terjadinya perubahan dalam bentuk gerakan sosial. Gerakan sosial baru bergerak dari isu anti rasisme, feminisme, lingkungan, keagamaan sampai dengan masalah perdamaian dan kebebasan lainnya. Gerakan sosial didefinisikan sebagai tindakan kolektif yang terorganisir untuk menciptakan suatu perubahan sosial difokuskan untuk mengubah tatanan yang lebih baik lagi dari yang sudah ada.

Gerakan lingkungan dibagi menjadi tiga komponen yaitu pertama, public environmentalist yaitu individu-individu yang dalam masyarakat umum secara langsung berupaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekitar melalui tindakan dan sikap pribadi masyarakat. Kedua, organized environmentalists atau voluntary environmentalists yaitu merujuk pada individu-individu yang tergabung dalam organisasi khusus yang didirikan untuk memperbaiki lingkungan hidup dan sering kali jangkauannya lintas negara. Ketiga, institutional environmental movement organization mengacu pada organisasi yang beroperasi melalui struktur birokrasi resmi yang mengklaim kewenangan dalam menangani masalah lingkungan (Fakhrian et al., 2024).

Teknologi digital dan media sosial memainkan peran krusial dalam memperkuat gerakan politik hijau dan mendorong perubahan dalam kebijakan lingkungan. Dengan alat digital yang inovatif, kaum muda, aktivis, dan organisasi lingkungan dapat memperluas jangkauan kampanye mereka, mengorganisir aksi secara efektif, dan menekan perubahan kebijakan di seluruh dunia. Penggunaan teknologi ini mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, energi terbarukan, dan perlindungan terhadap lingkungan, yang semuanya menjadi sangat penting dalam menghadapi krisis iklim saat ini.

Media digital menyediakan akses kekayaan informasi tentang berbagai persoalan sosial. Media sosial memberi ruang yang sangat luas untuk dapat komunikasi dengan dunia luar yang dapat mengarah kepada penemuan cara baru yang lebih efektif untuk berpartisipasi dalam proses politik. Gerakan-gerakan sosial dalam politik hijau di sosial media dapat membangun kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan dan melakukan mobilisasi generasi muda untuk terlibat langsung dalam gerakan. Teknologi komunikasi dan informasi mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Beberapa gerakan sosial politik hijau di Indonesia adalah Green Peace, Teen to Green.

Green Peace sebagai sebuah organisasi termasuk dalam organisasi gerakan sosial yang bersifat profesional. Greenpeace juga menyatakan diri sebagai organisasi gerakan sosial yang independen dan milik bersama sehingga bukan hanya milik bagi individu atau kelompok tertentu. Greenpeace membuka kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk berkontribusi dan melibatkan diri untuk berpartisipasi dalam setiap gerakan dan kampanyenya untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Greenpeace sebagai organisasi global telah didirikan selama lebih dari 50 tahun dan telah berhasil mendapatkan dukungan yang luas sehingga mendapatkan pendanaan langsung yang dihimpun melalui kontribusi individu yang diperkirakan berjumlah 2,8 jta pendukung keuangan dan juga yayasan amal (Fakhrian et al., 2024).

Tujuan dari greenpeace adalah meminta dukungan dari banyak pihak untuk membuat sebuah gerakan yang menyelamatkan lingkungan dan dukungan tersebut harapannya dapat mendorong perubahan kebijakan oleh pemerintah. Dengan hadirnya isu lingkungan hidup yang kompleks maka Greenpeace sebagai suatu gerakan memerlukan beberapa pendekatan dalam memperjuangkan isu tersebut salah satunya dengan menggunakan pendekatan dimensi politik hijau.

Selain Greenpeace, terdapat akun sosial media dengan nama "Pandawara Group". Dimana akun tersebut secara massif memberikan edukasi tentang kebersihan lingkungan. Mereka juga kerap kali mengunggah kegiatan mereka bersih-bersih sampah di sungai ataupun pantai. Mereka bahkan mengajak melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan dengan masyarakat setempat. Konten Pandawara menggambarkan berbagai ajakan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembersihan lingkungan. Hal ini memberikan dampak yang signifikan dalam menggerakkan generasi muda serta

pemerintah dan masyarakat untuk menjalin kerja sama melalui aksi sosial yang kreatif dan proaktif dengan mengundang dan melakukan kampanye melalui platform Tik Tok (Setiawan et al., 2024). Kegiatan yang dilakukan dalam membenahi sampah merupakan komitmen yang sangat penting dalam mewujudkan iklim yang sehat dan mendukung.

Teens Go Green juga merupakan komunitas generasi muda di Indonesia yang aktif melakukan kegiatan lingkungan dengan konsep edutainment. Pendidikan, lingkungan dan kampanye kesadaran publik, penelitian dan pengembangan masyarakat merupakan empat program inti dari Teen Go Green. Program tersebut diinisiasi oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan PT. Pembangunan Jaya Ancol. Teen go Green menggunakan sosial media untuk menjangkau generasi muda dengan menyusun kegiatan yang menarik dan inajinatif untuk menarik minat masyarakat. Fokus program Teen Go Green adalah Waste Management, Sustainable Living, dan Climate Change (Sekar Kinanthi Prastika et al., 2023). Generasi muda saat ini memiliki akses yang lebih mudah ke ruang publik berkas media baru.

Nilai tindakan kolektif menjadi hal penting daripada hanya tindakan individu. Banyak yang menggunakan istilah komunitas untuk menggambarkan kelompok tempat mereka menjadi bagiannya, disamping istilah "gerakan" atau "tujuan". Para aktivis menekankan peran komunitas baik di ruang digital maupun fisik. Komunitas bukan hanya sekedar untuk berorganisasi tetapi juga memiliki pemikiran yang sama, kepedulian dan mendukung diri sendiri dan orang lain serta berbagi minat dan bersosialisasi (Hannouch & Milstein, 2024). Komunitas membentuk tujuan dan nilai bersama untuk menwujudkan kita-kita yang diharapkan. Komunitas berbasis lingkungan akan terus mempromosikan upaya-upaya menjaga lingkungan.

Generasi Z memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, ketergantungan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca lebih cenderung memiliki sifat positif terhadap transisi energi di Indonesia. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengakses media melalui platform digital. Platform media sosial, khususnya instagram telah muncul berbagai saluran yang efektif bagi generasi Z untuk berpartisipasi dalam diskusi, berbagi pengetahuan dan mengadvokasi keberlanjutan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan berbagai kampanye lingkungan. media sosial memiliki potensi yang signifikan untuk menumbuhkan kesadaran dan perhatian Generasi Z

tentang dampak perubahan iklim dan transisi energi, karena menggunakan representasi visual dan pesan yang mudah dipahami (Wijaya & Kokchang, 2023).

C. Masa Depan Politik Hijau dan Peran Generasi Muda

Masa depan politik hijau akan sangat bergantung pada kesinambungan aksi generasi muda. Mereka adalah kekuatan yang dapat mendorong pergeseran paradigma dalam cara pandang terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jika gerakan hijau yang dipimpin oleh generasi muda dapat terus tumbuh, mereka akan mampu mempengaruhi kebijakan publik di berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, pertanian, dan industri. Dengan semakin besarnya keterlibatan generasi muda dalam proses politik dan advokasi kebijakan hijau, masa depan politik hijau akan lebih inklusif dan inovatif. Tekanan dari generasi muda akan memastikan bahwa keberlanjutan menjadi prioritas utama dalam perencanaan masa depan, dan bahwa pemerintah serta sektor swasta yang bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

Masa depan politik hijau diprediksi akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya urgensi terhadap isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Generasi muda memiliki peran krusial dalam membentuk dan memimpin politik hijau di masa depan. Mereka adalah agen perubahan yang menginspirasi, memanfaatkan teknologi, dan membawa pendekatan baru yang inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan global. Generasi muda akan terus mendorong transisi dari ekonomi berbasis bahan bakar fosil menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Mereka akan menuntut kebijakan yang mendukung energi terbarukan, efisien sumber daya, dan model bisnis yang ramah lingkungan. Anak muda akan memanfaatkan inovasi teknologi dan kewirausahaan hijau untuk menciptakan solusi baru. Mereka akan terlibat menciptakan industri hijau seperti energi surya, energi angin serta mendorong investasi dalam sektor ini. Mereka juga akan mendesak perusahaan untuk berkomitmen pada tanggungjawab sosial dan lingkungan melalui pengawasan konsumen dan tekanan publik.

Generasi muda sangat mendukung produk-produk dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut memaksa perusahaan untuk dapat memperbaiki kualitas produknya untuk lebih ramah lingkungan demi untuk memberikan tawaran menarik bagi konsumen dimana jumlah generasi milenial dan generasi Z cukup besar. Sehingga

perusahaan memberikan tawaran keberlanjutan dan aktif dalam melakukan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat yang ditinggal di wilayah perusahaan. Selain itu, pemerintah pada akhirnya memberikan atensi atas isu-isu yang tengah menjadi perbincangan di sosial media.

Isu keadilan lingkungan akan menjadi semakin penting, terutama dalam konteks dampak perubahan iklim yang tidak merata di seluruh dunia. Negara-negara miskin dan kelompok masyarakat yang paling rentan seringkali terkena dampak paling parah meski mereka berkontribusi paling sedikit terhadap emisi karbon global. Anak muda akan terus mengangkat isu keadilan iklim dalam politik hijau, menuntut bahwa tanggung jawab global untuk mengatasi krisis iklim harus dibagi secara adil. Mereka akan bekerja untuk memastikan bahwa transisi hijau memperhatikan keadilan sosial, inklusivitas, dan tidak meninggalkan kelompok rentan. Gerakan ini juga akan mencakup kampanye untuk memajukan hak-hak masyarakat adat, perempuan, dan kelompok minoritas yang sering kali terabaikan dalam kebijakan lingkungan.

Transisi energi berkeadilan. Keadilan lingkungan mengacu pada situasi pada distribusi lingkungan diantara masyarakat dalam hal akses dan penggunaan sumber daya alam tertentu di wilayah geografis tertentu dan dampak praktik sosial serta bahaya lingkungan pada manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi pusat analisis. Fokus analisisnya adalah pada kesehatan dan kesejahteraan manusia dan bagaimana hal tersebut dipengaruhi oleh jenis produksi dan konsumsi tertentu. Konsep keadilan lingkungan mengacu pada upaya untuk mengurangi bahaya, resiko dan kerugian lingkungan bagi semua bagian populasi manusia dan semua jenis komunitas. Pada dasarnya adalah memastikan bahwa tidak ada komunitas tertentu yang mengalami kerugian lingkungan yang tidak proporsional (White, 2013). Hal tersebut juga membutuhkan dukungan dari aktor-aktor politik yang mendukung pergeseran transisi energi hijau (Colantone et al., 2024).

Energi terbarukan dinilai penting karena dapat mengurangi perubahan iklim dan berkontribusi pada perubahan sosial yang transformatif. Transisi energi terbarukan yang adil memerlukan keterlibatan para pelaku diluar hubungan industri-kebijakan. Konsep akar rumput demokrasi energi menantang orientasi ini dengan menyoroti nilai normatif dan kepentingan strategis untuk melibatkan warga negara dan organisasi masyarakat sipil

dalam desain, kepemilikan dan pengoperasian infrastruktur energi. Hal ini didefinisikan sebagai peningkatan partisipasi dan kontrol sistem energi oleh para pelaku yang meliputi warga negara, organisasi masyarakat sipil, dan populasi yang secara historis terpinggirkan. Beberapa hal yang merupakan manfaat dari transisi energi adalah meningkatkan penerimaan sosial terhadap struktur baru, mendistribusikan manfaat finansial kepada populasi yang terkena dampak secara langsung, membantu mendorong literasi energi, dan mengikutsertakan aktor-aktor yang sebelumnya terpinggirkan dengan ide-ide baru yang inovatif dan membantu implementasi kebijakan yang efektif (MacArthur et al., 2020).

Negara Jepang telah berkomitmen untuk mencapai nol karbon pada tahun 2050. Hal tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah lokal maupun nasional Jepang. Jepang menggunakan pendekatan monolistik dan monopolistik terhadap kebijakan energi di masa lalu. Tetapi di masa depan, Jepang akan melibatkan demokratisasi iklim/energi lebih lanjut untuk menanggapi berbagai masalah sosial, lingkungan dan ekonomi. Pengaturan dilakukan dengan menggunakan berbagai teknologi dalam ekosistem energi lokal, regional maupun nasional secara canggih, tersentralisasi tetapi terhubung secara digital. Hal tersebut memungkinkan memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan model sebelumnya dan akan menjadi dasar bagi pencapaian nol karbon di Jepang pada tahun 2050 (Ohta & Barrett, 2023).

Generasi muda memiliki sikap yang positif terhadap transisi energi. Mereka mengakui bahwa kontribusi energi terhadap kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesehatan, aksesibilitas energi, menciptakan lapangan kerja hijau dan mengurangi emisi. Oleh karena itu, mereka menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Sikap tersebut dipengaruhi oleh kesadaran dan perhatian lingkungan yang berkaitan erat dengan pengetahuan tentang isu-isu iklim (Wijaya & Kokchang, 2023). Pelajaran ini menekankan perlunya pendekatan interdisipliner, adaptif, dan inklusif yang mengakui peran strategi top-down dan bottom-up (Djinlev & Pearce, 2024). Keterlibatan masyarakat dan kesadaran yang tinggi dinilai sangat penting. Individu, masyarakat dan sikap publik secara keseluruhan mendukung langkah-langkah kebijakan yang kuat untuk percepatan transisi energi. Pendekatan dipimpin oleh pemerintah baik dari akar rumput bottom up maupun top

down yang mendorong penerimaan dan perubahan perilaku penggunaan energi (Hainsch et al., 2022).

Ekonomi sirkular dan desain berkelanjutan adalah model ekonomi yang dirancang untuk menjaga nilai produk, bahan dan sumber daya selama mungkin serta meminimalkan limbah. Ekonomi sirkular bertujuan untuk menjaga bahan tetap dalam lingkaran melalui daur ulang, perbaikan dan penggunaan ulang dan regenerasi. Generasi muda dapat menjadi promotor dan kampanye lingkungan dengan adanya perubahan gaya hidup menuju ekonomi sirkular seperti dalam penggunaan produk ramah lingkungan, meminimalisir penggunaan plastik dan juga pengelolaan sampah. Pada akhirnya gerakan-gerakan kecil generasi muda membawa pada perubahan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Colantone, I., Di Lonardo, L., Margalit, Y., & Percoco, M. (2024). The Political Consequences of Green Policies: Evidence from Italy. *American Political Science Review*, 118(1), 108-126. <https://doi.org/10.1017/S0003055423000308>
- Confetto, M. G., Covucci, C., Addeo, F., & Normando, M. (2023). Sustainability advocacy antecedents: how social media content influences sustainable behaviours among Generation Z. *Journal of Consumer Marketing*, 40(6), 758-774. <https://doi.org/10.1108/JCM-11-2021-5038>
- Conklin, S., Barreto, D., & Dorgan, T. (2019). The impact of social media on social presence. *Australian Educational Computing*, 34(1), 1-12.
- Djinlev, V., & Pearce, B. B. J. (2024). Collective action lessons for the energy transition: learning from social movements of the past. *Sustainability Science*, 19(3), 847-863. <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01455-5>
- Dragolea, L. L., Butnaru, G. I., Kot, S., Zamfir, C. G., Nuță, A. C., Nuță, F. M., Cristea, D. S., & Ștefănică, M. (2023). Determining factors in shaping the sustainable behavior of the generation Z consumer. *Frontiers in Environmental Science*, 11(January), 1-21. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1096183>
- Fakhrian, L. R., Abrar, A., & Santosa, F. H. (2024). Greenpeace: Sebuah Gerakan Sosial Dan Politik Hijau Di Indonesia (Kampanye Greenpeace Di Jakarta 2006-2021. *Journal on Education*, 6(4), 18632-18656. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5730>
- Hainsch, K., Löffler, K., Burandt, T., Auer, H., Crespo del Granado, P., Pisciella, P., & Zwickl-Bernhard, S. (2022). Energy transition scenarios: What policies, societal attitudes, and technology developments will realize the EU Green Deal? *Energy*, 239. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.122067>
- Hannouch, B., & Milstein, T. (2024). Activating Ecocentrism: How Young Women Environmental Activists Produce Identity on Instagram. *Environmental Communication*, 1-20. <https://doi.org/10.1080/17524032.2024.2376697>

- Laouni, N.-E. (2022). Cyberactivism and protest movements: the February 20th movement - the forming of a new generation in Morocco. *The Journal of North African Studies*, 27(2), 296-325. <https://doi.org/10.1080/13629387.2020.1810024>
- MacArthur, J. L., Hoicka, C. E., Castleden, H., Das, R., & Lieu, J. (2020). Canada's Green New Deal: Forging the socio-political foundations of climate resilient infrastructure? *Energy Research and Social Science*, 65(January), 101442. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101442>
- Ohta, H., & Barrett, B. (2023). Politics of climate change and energy policy in Japan: Is green transformation likely? *Earth System Governance*, 17(June), 100187. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2023.100187>
- Pandey, M., & Yadav, P. S. (2023). Understanding the role of individual concerns, attitude, and perceived value in green apparel purchase intention; the mediating effect of consumer involvement and moderating role of generation Z&Y. *Cleaner and Responsible Consumption*, 9(April), 100120. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2023.100120>
- Sekar Kinanthi Prastika, Eni Maryani, & Ira Mirawati. (2023). Instagram @teensgogreen.id Sebagai Aktivisme Media dalam Isu Lingkungan untuk Generasi Muda. *Jurnal Penelitian Sistem Informasi (Jpsi)*, 1(3), 48-65. <https://doi.org/10.54066/jpsi.v1i3.665>
- Setiawan, T., Tahir, M., & Fanshuri, F. (2024). How to Cite Ecology Media: Kontekstualitas Pesan Empowerment Terhadap Konten Pandawara Group di Sosial Media (Studi Semiotik Peirce Terhadap Pesan Kerusakan Lingkungan di Tiktok). *Ecology Media: Kontekstualitas Pesan Empowerment Terhadap Konten Pandawara Group Di Sosial Media*, 5(2). <http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i2.373>
- Somad, K. M. S. A., & Fatmasari, A. E. (2024). Predicting Sustainable Consumption Behavior among Generation Z: Role of Nature Relatedness and Environmental Concern. *Psychological Research on Urban Society*, 7(1). <https://doi.org/10.7454/proust.v7i1.1154>
- Suryaputra, R., Daryanti, S., & Setyowardhani, H. (2024). Role of Social Media in Promoting Sustainable Green Lifestyles: Influencers and Value Co-Creation with Gen Z in Indonesia. *Journal of Entrepreneurial Economic*, 1(1), 48-65. <https://doi.org/10.61511/jane.v1i1.2024.1036>
- White, R. (2013). Environmental harm: An eco-justice perspective. In *Environmental Harm: An Eco-Justice Perspective*. Policy Press.
- Wijaya, D. I., & Kokchang, P. (2023). Factors Influencing Generation Z's Pro-Environmental Behavior towards Indonesia's Energy Transition. *Sustainability (Switzerland)*, 15(18), 1-19. <https://doi.org/10.3390/su151813485>

BAB VIII

Tantangan dan Masa Depan Politik Hijau

Alif Firdaus Zamzam

1. Tantangan politik: Hambatan Politik dalam Implementasi Kebijakan Hijau

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan hijau adalah hambatan politik. Seringkali, kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek mengesampingkan pertimbangan lingkungan yang lebih luas dan jangka panjang (Bina, 2021). Politisi dan pengambil kebijakan terkadang enggan mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi atau menimbulkan biaya jangka pendek, meskipun hal tersebut dapat memberikan manfaat lingkungan yang signifikan (Fiorino, 2020). Selain itu, lobby kelompok kepentingan tertentu, seperti industri berbasis sumber daya alam, dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan menghambat upaya-upaya konservasi lingkungan (Kraft, 2021).

Industri raksasa yang bergantung pada bahan bakar fosil atau mega perusahaan yang tidak ramah lingkungan, dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembuatan kebijakan. Mereka seringkali menggunakan lobi dan tekanan politik untuk mempertahankan status quo dan menghambat implementasi kebijakan hijau yang dapat mengancam kepentingan mereka (Suwarno et al., 2022; Purwanto et al., 2021). Menurut data dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kelompok industri dan bisnis merupakan salah satu pemain utama yang sering melakukan lobi untuk menghambat implementasi kebijakan lingkungan (OECD, 2017). Mereka umumnya khawatir bahwa regulasi lingkungan akan meningkatkan biaya produksi, mengurangi daya saing, dan berdampak negatif pada profitabilitas perusahaan. Contoh nyata dapat dilihat pada kasus penundaan implementasi Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim di Indonesia. Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Namun, implementasinya terhambat karena adanya resistensi dari asosiasi industri, khususnya sektor energi dan pertambangan, yang khawatir akan dampak regulasi terhadap bisnis mereka (Kompas, 2019). Selain itu, kelompok kepentingan juga dapat memengaruhi opini publik melalui kampanye propaganda dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat dan mengurangi dukungan terhadap kebijakan lingkungan. Kelompok kepentingan tertentu menggunakan berbagai strategi untuk menghambat implementasi politik hijau. Beberapa strategi umum yang sering digunakan antara lain:

1. Lobi dan Advokasi Politik

Kelompok kepentingan melakukan lobi intensif kepada pembuat kebijakan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, untuk mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan lingkungan. Mereka dapat menyediakan informasi yang menguntungkan kepentingan mereka, menawarkan dukungan

politik, atau bahkan memberikan sumbangan kampanye (Baumgartner et al., 2009). Kejadian ini dapat dilihat Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) yang secara aktif melakukan lobi kepada pemerintah untuk menunda implementasi kebijakan pembatasan emisi karbon dari sektor pertambangan (Kompas, 2019). Dalam banyak kasus, pemimpin politik tidak memiliki insentif yang cukup untuk mendukung dan memprioritaskan agenda lingkungan, terutama jika hal tersebut dapat menimbulkan biaya atau risiko politik (Suwarno et al., 2022; Purwanto et al., 2021). Ini dapat diasumsikan sebagai kekhawatiran resiko yang akan diterima pemangku kepentingan misalnya pada periode yang akan datang tidak akan disuport dana kampanye dan sebagainya.

2. Kampanye Propaganda dan Penyebaran Informasi Menyesatkan

Kelompok kepentingan dapat melakukan kampanye propaganda untuk mempengaruhi opini publik dan mengurangi dukungan terhadap kebijakan lingkungan. Mereka dapat menyebarkan informasi yang menyesatkan, seperti mempertanyakan validitas bukti ilmiah terkait perubahan iklim atau menampilkan dampak negatif kebijakan lingkungan terhadap ekonomi (Oreskes & Conway, 2010).

Beberapa perusahaan minyak dan gas besar telah lama diketahui melakukan kampanye untuk menyebarkan keraguan terhadap bukti perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia (Supran & Oreskes, 2017). Salah satu contoh nyata adalah kampanye propaganda yang dilakukan oleh industri bahan bakar fosil di beberapa negara. Mereka berusaha menyebarkan informasi yang meragukan dampak perubahan iklim dan menolak perlunya transisi energi ke sumber-sumber terbarukan. Kampanye ini bertujuan untuk mempertahankan dominasi industri bahan bakar fosil dan menghambat implementasi kebijakan-kebijakan ramah lingkungan, hal yang sama terjadi pada penyebaran informasi menyesatkan tentang dampak negatif energi angin dan surya, padahal kedua sumber energi terbarukan ini memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan bahan bakar fosil (Saidur et al., 2011). Kasus lain penolakan terhadap penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi alternatif. Beberapa kelompok anti-nuklir telah menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang bahaya radiasi dan keamanan pembangkit nuklir, padahal energi nuklir sebenarnya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling ramah lingkungan (Kharecha & Hansen, 2013). Dampak dari penyebaran informasi menyesatkan ini dapat terlihat dari lambatnya adopsi energi nuklir di beberapa negara. Meskipun energi nuklir memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, adopsinya masih terhambat oleh keraguan masyarakat yang disebabkan oleh informasi menyesatkan yang beredar (Poortinga et al., 2014).

3. Pemanfaatan Proses Hukum

Kelompok kepentingan dapat memanfaatkan proses hukum untuk menghambat implementasi kebijakan lingkungan. Mereka dapat mengajukan gugatan atau keberatan hukum untuk menunda atau membatalkan regulasi yang merugikan kepentingan mereka. Beberapa perusahaan minyak dan gas di Amerika Serikat telah mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan pemberlakuan peraturan pembatasan emisi karbon oleh pemerintah federal (Volcovici, 2017). Pada kasus Nasional, tahun 2018, beberapa kelompok masyarakat mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah daerah terkait izin pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya, alasan yang diajukan adalah bahwa pembangunan tersebut akan mengganggu lingkungan dan aktivitas masyarakat setempat. Meskipun pada akhirnya gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan, namun proses hukum yang panjang telah menyebabkan penundaan implementasi proyek tersebut (Nugraha, 2018., Suryadi, 2020).

Pemanfaatan proses hukum untuk menghambat implementasi politik hijau dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun bagi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Pertama, penundaan implementasi kebijakan-kebijakan ramah lingkungan dapat memperlambat upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini dapat berdampak pada semakin buruknya kondisi lingkungan dan meningkatnya risiko bencana alam (IPCC, 2021). Kedua, penundaan implementasi proyek-proyek energi terbarukan dapat memperlambat transisi energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang lebih bersih. Hal ini dapat memperlambat upaya-upaya pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan meningkatkan risiko ketahanan energi (IRENA, 2019). Ketiga, pemanfaatan proses hukum untuk menghambat implementasi politik hijau dapat menimbulkan biaya-biaya tambahan bagi pemerintah dan masyarakat. Proses hukum yang panjang dan kompleks dapat menyebabkan pengeluaran yang besar untuk pengacara, pengadilan, dan biaya-biaya lainnya (Suryadi, 2020).

Lemahnya penegakan hukum lingkungan juga merupakan salah satu hambatan politik hijau yang sering terjadi. Banyak negara memiliki peraturan dan undang-undang lingkungan yang cukup komprehensif, tetapi implementasinya masih lemah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya, korupsi, atau intervensi politik dari kelompok kepentingan tertentu (Gunningham, 2009). Akibatnya, perusahaan atau individu yang melakukan kerusakan lingkungan seringkali lolos dari hukuman yang setimpal. Hambatan ini dapat berupa kebijakan, regulasi, atau praktik yang mendukung aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan, pemberian subsidi untuk industri yang mencemari, atau lemahnya penegakan hukum lingkungan. Hambatan politik hijau dapat diartikan sebagai kendala atau hambatan yang muncul dari prioritas pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang mengabaikan atau mengorbankan kepentingan lingkungan (Meadows et al., 1972; Daly, 1996).

4. Pemanfaatan Keterbatasan Penegakan Hukum

Dalam beberapa kasus, kelompok kepentingan dapat memanfaatkan keterbatasan penegakan hukum untuk menghindari kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Mereka dapat memanfaatkan celah-celah hukum atau kurangnya sumber daya penegakan untuk terus beroperasi tanpa memenuhi persyaratan lingkungan. Di Indonesia, beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit diketahui melakukan pembakaran lahan ilegal untuk membuka lahan baru, meskipun hal tersebut dilarang oleh undang-undang (Kompas, 2019). Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, pada tahun 2019 terdapat 3.421 kasus pelanggaran lingkungan, namun hanya 1.284 kasus (37,5%) yang berhasil diselesaikan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus pelanggaran lingkungan yang tidak terselesaikan. Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum adalah kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum, baik dari segi anggaran, personel, maupun keahlian (Purwanto, 2017).

Intervensi politik dan kepentingan ekonomi juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum (Bache & Flinders, 2004). Dalam beberapa kasus, perusahaan atau individu yang melakukan pelanggaran lingkungan dapat lolos dari hukuman atau mendapatkan hukuman yang ringan karena adanya hubungan dengan pejabat pemerintah atau karena kemampuan mereka untuk memengaruhi proses hukum. Pada tahun 2004, PT Newmont Minahasa Raya, perusahaan pertambangan emas, diduga telah membuang limbah berbahaya ke Teluk Buyat, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak negatif bagi masyarakat sekitar (Greenpeace, 2004). Meskipun terdapat bukti yang kuat, perusahaan tersebut berhasil lolos dari tuntutan hukum karena adanya intervensi politik dan kemampuan mereka untuk memengaruhi proses hukum (Greenpeace, 2004). Kasus lain adalah kebakaran hutan di Indonesia. Pada tahun 2015, terjadi kebakaran hutan yang sangat luas di beberapa provinsi di Indonesia, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan yang signifikan bagi masyarakat (World Bank, 2016). Meskipun terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, hanya sedikit pelaku yang berhasil diproses secara hukum (World Bank, 2016). Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan adanya intervensi politik dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi di sektor perkebunan.

Keterbatasan penegakan hukum dalam implementasi politik hijau juga dapat terjadi di tingkat global. Misalnya, dalam kasus penangkapan ikan ilegal, yang merupakan salah satu ancaman besar bagi kelestarian ekosistem laut. Meskipun telah ada upaya-upaya internasional untuk mengatasi masalah ini, seperti Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Stok Ikan 1995 (United

Nations, 1995), implementasinya masih terkendala oleh lemahnya penegakan hukum di beberapa negara (Agnew et al., 2009). Hal ini membuka peluang bagi pelaku penangkapan ikan ilegal untuk terus melakukan kegiatan mereka tanpa adanya konsekuensi yang memadai. Selain itu, keterbatasan penegakan hukum juga dapat menghambat upaya-upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan program politik hijau. Ketika pelaku pelanggaran lingkungan dapat lolos dari hukuman, maka hal ini dapat mengurangi efektivitas dan kredibilitas dari kebijakan dan program tersebut (Bache & Flinders, 2004). Hal ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi politik hijau, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum.

5. Kurangnya Dukungan Politik dari Pemangku Kepentingan

Implementasi kebijakan hijau melibatkan berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk itu perlu dukungan kordinasi yang kuat untuk mengupayakan bersama. Kurangnya dukungan politik dari pemangku kepentingan untuk mengkoordinasi dan mensinergikan antar lembaga terkait dapat menghambat upaya implementasi yang efektif, di sisi lain masih banyak organisasi pemerintah dan swasta memiliki budaya organisasi yang cenderung kaku dan menolak perubahan, terlebih, dalam banyak kasus masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, duplikasi upaya, dan ketidakefisienan Selain tumpang tindih kewenangan, kurangnya mekanisme kolaborasi yang efektif antar lembaga terkait juga dapat menghambat implementasi kebijakan hijau. Minimnya komunikasi, koordinasi, dan sinergi dapat menyebabkan upaya implementasi yang tidak terintegrasi dan tidak efektif (Suwarno et al., 2022; Purwanto et al., 2021).

2. Tantangan ekonomi : Konflik antara Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan seringkali dianggap sebagai dua tujuan yang saling bertentangan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Di sisi lain, aktivitas ekonomi yang tidak terkendali dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan, seperti kerusakan alam, pencemaran, dan perubahan iklim. Tantangan bagi para pembuat kebijakan adalah menemukan cara untuk menyeimbangkan kedua tujuan ini dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Stern, 2004). Pertumbuhan ekonomi yang pesat di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, dan perbaikan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, pertumbuhan ekonomi ini juga telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang serius (Grossman & Krueger, 1995).

Aktivitas pertambangan, pembukaan lahan untuk pertanian, dan eksploitasi hutan tropis telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Menurut data dari World Wide Fund for Nature (WWF), antara tahun 1970 dan 2014, populasi hewan liar di seluruh dunia menurun sebesar 60% (WWF, 2018). Selain itu, pertumbuhan industri dan transportasi yang pesat juga telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara. Menurut data dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, telah menyebabkan peningkatan suhu global sebesar 1,1°C sejak era pra-industri (IPCC, 2021). Dampak perubahan iklim ini telah mengakibatkan berbagai bencana alam, seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrem.

Upaya untuk melindungi lingkungan juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah biaya yang terkait dengan implementasi kebijakan lingkungan. Investasi dalam teknologi bersih, pengolahan limbah, dan konservasi sumber daya alam membutuhkan dana yang besar, yang sering kali sulit diperoleh, terutama di negara-negara berkembang (Jaffe et al., 1995). Selain itu, ada juga resistensi dari sektor industri dan masyarakat yang khawatir bahwa upaya perlindungan lingkungan akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi lapangan pekerjaan. Misalnya, pembatasan emisi karbon dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan penolakan dari sektor swasta terhadap regulasi lingkungan yang ketat (Ambec & Lanoie, 2008). Tantangan lain adalah koordinasi dan kerja sama internasional yang sulit dicapai. Isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim, merupakan masalah global yang membutuhkan respons kolektif dari berbagai negara. Namun, perbedaan kepentingan ekonomi dan politik antarnegara sering kali menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan internasional yang efektif (Nordhaus, 2015).

Dampak dari hambatan politik hijau ini sangat signifikan bagi lingkungan. Deforestasi, pencemaran, dan emisi gas rumah kaca yang terus meningkat telah menyebabkan berbagai masalah, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas hidup masyarakat (IPCC, 2021; IPBES, 2019). Selain itu, hambatan politik hijau juga dapat menghambat upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, 2015). Pemerintah harus memprioritaskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan hijau, seperti menghapus subsidi untuk industri yang mencemari, memperkuat penegakan hukum lingkungan, dan mendorong investasi dalam teknologi dan industri yang ramah lingkungan. Sektor swasta juga harus berperan aktif dalam menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sementara itu, masyarakat sipil dapat berperan dalam mendorong perubahan, baik melalui advokasi, kampanye, maupun perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah menggalakkan berbagai proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pembangkit listrik, dan pelabuhan (Kementerian

PPN/Bappenas, 2019). Namun, banyak dari proyek-proyek ini dibangun di area yang sebelumnya merupakan hutan atau lahan hijau, yang menyebabkan deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati (Margono et al., 2014). Selain itu, pembangunan infrastruktur juga sering kali mengabaikan dampak lingkungan, seperti polusi udara, pencemaran air, dan peningkatan emisi gas rumah kaca (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Di banyak negara, pemerintah masih memberikan subsidi untuk industri-industri yang menghasilkan emisi karbon tinggi, seperti industri batu bara, minyak, dan gas (OECD, 2019). Subsidi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga harga energi tetap terjangkau. Namun, hal ini justru menghambat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan, serta mendorong perilaku konsumsi yang tidak ramah lingkungan (Coady et al., 2019).

Salah satu dampak yang paling signifikan adalah deforestasi atau penebangan hutan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia kehilangan sekitar 1,6 juta hektar hutan setiap tahunnya pada periode 2011-2019 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Deforestasi ini sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hilangnya hutan tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk perubahan iklim. Pertumbuhan ekonomi juga telah menyebabkan peningkatan pencemaran air, tanah, dan udara. Aktivitas industri, pertambangan, dan transportasi telah menghasilkan limbah dan emisi yang mencemari lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019, terdapat 1.169 sungai di Indonesia yang tercemar, dengan 35% di antaranya tercemar berat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada ekosistem perairan. Pembukaan lahan untuk kegiatan ekonomi telah menyebabkan habitat alami bagi berbagai spesies flora dan fauna menjadi rusak atau hilang. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki 2.159 spesies yang terancam punah, termasuk 140 spesies yang berstatus kritis (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Hilangnya keanekaragaman hayati ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan membahayakan kelangsungan hidup manusia.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi adalah menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Seringkali, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, eksploitasi sumber daya alam, dan pencemaran (Daly, 2020). Di sisi lain, upaya-upaya konservasi lingkungan dapat dianggap sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Contoh kasus yang relevan adalah perdebatan mengenai pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Meskipun energi terbarukan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, namun pembangunan infrastruktur terkait dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan habitat dan konflik dengan masyarakat lokal (Wijaya, 2021).

Dalam banyak kasus, pengambil keputusan politik sering terfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi jangka pendek sebagai prioritas utama. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan hijau, yang seringkali memerlukan investasi jangka panjang dan pengorbanan keuntungan ekonomi jangka pendek (Suwarno et al., 2022). Banyak pemimpin politik khawatir bahwa kebijakan hijau akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi popularitas mereka di kalangan pemilih (Purwanto et al., 2021). Hambatan politik hijau yang disebabkan oleh prioritas pertumbuhan ekonomi jangka pendek merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Upaya untuk mengatasi hambatan ini membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, serta perubahan paradigma dalam memandang pembangunan ekonomi dan lingkungan. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih hijau, adil, dan sejahtera bagi semua.

3. Tantangan sosial: Mengatasi Ketidaksetaraan dan Keadilan Sosial dalam Konteks Lingkungan

Isu ketidaksetaraan dan keadilan sosial juga menjadi tantangan dalam politik hijau. Seringkali, dampak negatif dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim secara tidak proporsional dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti masyarakat miskin dan komunitas adat (Schlosberg, 2019). Implementasi politik hijau, yang mencakup inisiatif seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan konservasi sumber daya, dapat berdampak pada ketidaksetaraan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Transisi menuju ekonomi hijau dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan jika tidak disertai dengan kebijakan yang adil dan komprehensif (UNDP, 2011). Sebagai contoh, subsidi untuk teknologi energi terbarukan seringkali lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi, sementara masyarakat berpenghasilan rendah tetap bergantung pada sumber energi yang lebih murah namun lebih buruk untuk lingkungan (Coady et al., 2015). Selain itu, implementasi kebijakan lingkungan yang tidak mempertimbangkan dampak sosial dapat memperburuk ketidaksetaraan. Misalnya, pembatasan akses ke sumber daya alam atau pengenaan pajak lingkungan dapat memberatkan masyarakat miskin yang bergantung pada sumber daya tersebut untuk penghidupan mereka (Barbier, 2010). Hal ini dapat memicu konflik sosial dan menghambat upaya untuk mencapai keadilan sosial.

Implementasi kebijakan konservasi hutan di Indonesia juga menghadapi tantangan terkait keadilan sosial. Pembatasan akses masyarakat lokal, terutama komunitas adat, terhadap sumber daya hutan telah memicu konflik sosial dan menimbulkan dampak negatif bagi penghidupan mereka (Safitri, 2015). Upaya untuk mengatasi masalah ini mencakup pengakuan hak-hak masyarakat adat, peningkatan keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan, serta pemberian kompensasi yang adil. Salah satu kasus yang relevan adalah konflik antara masyarakat adat dan perusahaan pertambangan di Indonesia. Meskipun kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi, namun seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencaharian masyarakat adat.

(Hidayat, 2020). Ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan akses terhadap sumber daya alam, distribusi manfaat yang tidak merata, serta dampak negatif yang tidak proporsional terhadap kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks kebijakan politik lingkungan hijau, isu-isu tersebut menjadi semakin kompleks. Misalnya, pengembangan proyek energi terbarukan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau angin dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun juga dapat menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan lahan, relokasi penduduk, dan dampak lingkungan yang tidak adil bagi komunitas lokal (Carley & Konisky, 2020). Selain itu, kebijakan konservasi alam yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dapat mengakibatkan penggusuran masyarakat adat dan pembatasan akses terhadap sumber daya alam yang mereka butuhkan untuk kelangsungan hidup (Agrawal & Redford, 2009).

Politik hijau memiliki potensi besar untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan meskipun terdapat berbagai tantangan. Salah satu kunci utamanya adalah integrasi isu lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi (Dryzek, 2019). Dalam rangka memperkuat proses pembuatan kebijakan lingkungan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kepentingan publik, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat sipil dan penguatan peran lembaga pengawas independen dapat secara signifikan meningkatkan kualitas kebijakan lingkungan (Maritza & Taufiqurokhman, 2024). Peningkatan keterlibatan masyarakat sipil dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum diskusi, dan saluran komunikasi yang memudahkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara itu, penguatan peran lembaga pengawas independen dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengawasi proses pembuatan kebijakan dan memastikan transparansi informasi, seperti gerakan *Fridays for Future*, di mana anak-anak dan remaja di seluruh dunia melakukan aksi protes untuk mendesak pemerintah mengambil tindakan nyata terhadap perubahan iklim (Wahlström et al., 2019). Gerakan ini telah berhasil menarik perhatian publik dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan ambisi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mewujudkan keadilan sosial dalam konteks kebijakan politik lingkungan hijau, diperlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial ke dalam perumusan dan implementasi kebijakan terkait lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut (Pascual et al., 2014., Suiseya, 2016., & Schlosberg, 2013):

1. Melibatkan masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Hal ini dapat memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka dipertimbangkan secara adil.

2. Menerapkan mekanisme kompensasi dan mitigasi yang memadai bagi masyarakat yang terdampak negatif oleh kebijakan lingkungan, seperti pemberian ganti rugi, program pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.
3. Mengembangkan insentif dan skema pembiayaan yang mendorong keterlibatan masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam upaya-upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan.
4. Distribusi manfaat dan biaya dari kebijakan lingkungan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya dan investasi yang lebih besar pada daerah-daerah yang kurang beruntung.
5. Pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok rentan, agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya-upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, pendampingan, dan pemberian akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya.
6. Integrasi isu-isu keadilan sosial ke dalam perumusan dan implementasi kebijakan lingkungan, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.

Dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan dan mewujudkan keadilan sosial dalam konteks kebijakan politik lingkungan hijau, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil memiliki peran yang saling terkait. Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, serta memastikan implementasi yang adil dan transparan. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta mendukung program-program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam advokasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap kebijakan dan praktik terkait lingkungan hijau (Suiseeya, 2016).

Upaya-upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mewujudkan keadilan sosial dalam konteks kebijakan politik lingkungan hijau juga harus didukung oleh data dan informasi yang akurat. Pengumpulan dan analisis data terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan-kebijakan lingkungan dapat membantu mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terdampak secara tidak proporsional, serta merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran (Pascual et al., 2014). Selain itu, diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam upaya-upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan yang adil. Kebijakan lingkungan yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dapat memberikan manfaat ganda, yaitu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OECD, 2018). Selain itu, keterlibatan masyarakat, terutama kelompok marjinal, dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan lingkungan juga merupakan kunci untuk mencapai keadilan sosial. Pendekatan partisipatif dapat memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan

berbagai kelompok masyarakat terwakili dan dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan (Schlosberg, 2013., & Stevenson, 2021).

4. Visi masa depan: Bagaimana Masa Depan yang Berkelanjutan Bisa Terwujud Melalui Politik Hijau

Menghadapi tantangan lingkungan global yang semakin kompleks dan mewujudkan masa depan yang berkelanjutan menjadi prioritas utama bagi seluruh negara di dunia. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah politik hijau, yaitu sebuah filosofi politik yang menekankan pada keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (Dobson, 2007). Politik hijau menawarkan solusi holistik untuk mengatasi permasalahan lingkungan, seperti perubahan iklim, polusi, dan degradasi sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, penerapan politik hijau memiliki potensi besar untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Politik hijau memiliki pendekatan yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, terutama dari sumber daya air, angin, dan matahari. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2021), Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 417,8 GW, yang terdiri dari tenaga air (75 GW), panas bumi (28,9 GW), surya (207,8 GW), angin (60,6 GW), dan biomassa (45,5 GW).

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung penerapan politik hijau. Dengan luas wilayah mencapai 1,9 juta km² dan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki keanekaragaman ekosistem yang sangat kaya, mulai dari hutan tropis, mangrove, terumbu karang, hingga padang rumput (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Di sektor perhutanan, Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021), Indonesia memiliki luas hutan mencapai 91,01 juta hektar, yang merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia. Hutan-hutan ini tidak hanya berperan penting dalam menyerap karbon, tetapi juga menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya air yang melimpah, dengan total potensi air permukaan sebesar 2.019 km³ per tahun (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020). Sumber daya air ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air, serta untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menerapkan politik hijau melalui berbagai kebijakan dan program yang telah diimplementasikan. Salah satu kebijakan utama adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional (Kementerian

PPN/Bappenas, 2020). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perubahan Iklim, yang mengatur langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Kementerian Sekretariat Negara, 2021).

Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan global. Meskipun di sisi lain, juga menghadapi tantangan pembangunan ekonomi yang pesat, yang seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip politik hijau ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan nasional melalui penerapan politik hijau dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan, terutama dalam tiga aspek utama:

1. Politik hijau mendorong upaya-upaya konservasi dan restorasi lingkungan, seperti perlindungan hutan, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan pengembangan energi terbarukan. Hal ini penting untuk mengatasi tantangan perubahan iklim, polusi, dan degradasi sumber daya alam. Sebagai contoh, di Jerman, penerapan politik hijau telah mendorong pengembangan energi terbarukan, sehingga pada tahun 2020, energi terbarukan menyumbang 46% dari total konsumsi listrik nasional (Agora Energiewende, 2021).
2. Transformasi ekonomi menuju model pembangunan yang lebih ramah lingkungan, seperti ekonomi sirkular, ekonomi hijau, dan ekonomi berbasis alam. Hal ini tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi teknologi. Sebagai contoh, di Tiongkok, penerapan politik hijau telah mendorong pengembangan industri energi terbarukan, yang menyumbang 3,5 juta lapangan kerja pada tahun 2019 (International Renewable Energy Agency, 2020).
3. Menekankan pada keadilan sosial, dengan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya alam, infrastruktur hijau, dan lapangan kerja yang berkelanjutan. Sebagai contoh, di Kosta Rika, penerapan politik hijau telah mendorong program pembayaran jasa ekosistem, yang memberikan insentif bagi masyarakat untuk melestarikan hutan dan sumber daya alam (Pagiola, 2008).

Strategi Penerapan Politik Hijau di Indonesia untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain:

- 1. Integrasi Politik Hijau dalam Kebijakan Pembangunan Nasional:** Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal, seperti pajak karbon, subsidi, dan skema perdagangan emisi, untuk mengoreksi harga pasar dan mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, regulasi yang ketat terhadap standar lingkungan juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan dari sektor industri (Nordhaus, 2013). Selain itu, perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip politik hijau ke dalam rencana pembangunan jangka panjang, seperti Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan-kebijakan yang mendorong transformasi ekonomi hijau, konservasi lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target peningkatan penggunaan energi terbarukan menjadi 23% dari total konsumsi energi nasional pada tahun 2025 (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah: Keberhasilan penerapan politik hijau di Indonesia juga bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memperkuat kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan, pendampingan, dan alokasi anggaran yang memadai. Seperti halnya, "Gerakan Jakarta Bersih dan Hijau", yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengembangan ruang terbuka hijau (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021). Program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi volume sampah di ibu kota.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Penerapan politik hijau juga membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, seperti swasta, organisasi non-pemerintah, dan akademisi. Pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan terkait lingkungan. Edukasi dan kampanye publik yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Keterlibatan masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan juga dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat (Dietz et al., 2003). Penerapan politik hijau di Indonesia tidak hanya didukung oleh kebijakan pemerintah dan kondisi geografis yang menguntungkan, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Berbagai inisiatif dan gerakan masyarakat telah muncul untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan praktik-praktik ramah lingkungan.

Trend "Gerakan Tanam Pohon" yang telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan tutupan hutan dan memperbaiki kualitas lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari melalui Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat dan organisasi non-pemerintah untuk mengelola hutan mangrove secara berkelanjutan. Melalui program pemberdayaan masyarakat, luasan hutan mangrove di Pangandaran telah meningkat dari 350 hektar pada tahun 2010 menjadi 500 hektar pada tahun 2020 (Pemerintah Kabupaten Pangandaran, 2021). Selain itu, masyarakat juga aktif dalam mengelola sampah secara mandiri melalui

program-program pengomposan dan daur ulang (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

- 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Hijau:** Penerapan politik hijau juga membutuhkan dukungan dari inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan. Pemerintah perlu mendorong pengembangan dan adopsi teknologi hijau, seperti energi terbarukan, pengolahan limbah, dan sistem transportasi yang efisien. Pengembangan dan adopsi teknologi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, teknologi daur ulang, dan sistem produksi yang efisien, dapat membantu mengurangi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan (Acemoglu et al., 2012). Insentif dan dukungan pemerintah bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi hijau sangat diperlukan. Sebagai misal, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara (Kementerian Sekretariat Negara, 2019).
- 5. Pembangunan Infrastruktur Hijau:** Pembangunan infrastruktur hijau merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan. Infrastruktur hijau mencakup sistem transportasi yang efisien, bangunan hemat energi, pengelolaan limbah yang tepat, dan pemanfaatan energi terbarukan (Kabisch et al., 2016). Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Misalnya, kota-kota di Eropa telah menerapkan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan, seperti kereta bawah tanah dan bus listrik, serta mengembangkan infrastruktur untuk kendaraan listrik (Bäckstrand & Lövbrand, 2016).
- 6. Kemitraan global dan transfer teknologi:** Kerja sama internasional, seperti perjanjian lingkungan global dan mekanisme transfer teknologi, dapat membantu negara-negara, terutama negara berkembang, dalam mengakses sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan (Nordhaus, 2015). Isu-isu lingkungan tidak mengenal batas negara, sehingga diperlukan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada (Jänicke, 2017). Melalui forum-forum global, seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP), negara-negara dapat berbagi pengalaman, menetapkan target bersama, dan mengembangkan solusi-solusi inovatif. Selain itu, lembaga-lembaga internasional juga dapat menyediakan dukungan teknis dan finansial bagi negara-negara yang sedang dalam proses transisi menuju ekonomi hijau (Bäckstrand & Lövbrand, 2016).

Refeensi

Acemoglu, D., Aghion, P., Bursztyn, L., & Hemous, D. (2012). The environment and directed technical change. *American Economic Review*, 102(1), 131-166.

- Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., 2009. "Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing," *PLOS ONE, Public Library of Science*, vol. 4(2), pages 1-8, February.
- Agrawal, A., & Redford, K. (2009). Conservation and displacement: An overview. *Conservation and Society*, 7(1), 1-10.
- Ambec, S., & Lanoie, P. (2008). Does it pay to be green? A systematic overview. *The Academy of Management Perspectives*, 22(4), 45-62.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2021). Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2021.
- Baumgartner, F. R., Berry, J. M., Hojnacki, M., Kimball, D. C., & Leech, B. L. (2009). *Lobbying and policy change: Who wins, who loses, and why*. University of Chicago Press.
- Bina, O. (2021). The political challenge of climate change. *Nature Climate Change*, 11(8), 688-689.
- Carley, S., & Konisky, D. M. (2020). The justice and equity implications of the clean energy transition. *Nature Energy*, 5(8), 569-577.
- Coady, D., Parry, I., Le, N. P., & Shang, B. (2019). Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country-Level Estimates. *IMF Working Paper*, 19(89). <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-on-Country-Level-Estimates-46509>
- Daly, H. E. (1996). *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*. Beacon Press.
- Daly, H. E. (2020). *Steady-state economics: Second edition with new essays*. Island Press.
- Dietz, T., Ostrom, E., & Stern, P. C. (2003). The struggle to govern the commons. *Science*, 302(5652), 1907-1912.
- Dryzek, J. S. (2019). *The politics of the earth: Environmental discourses*. Oxford University Press.
- Fiorino, D. J. (2020). *Environmental policy as political choice*. Polity.
- Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic growth and the environment. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(2), 353-377.
- Gunningham, N. (2009). Environment law, regulation and governance: Shifting architectures. *Journal of Environmental Law*, 21(2), 179-212. <https://doi.org/10.1093/jel/eqp011>
- Hidayat, H. (2020). Conflict and cooperation in the management of natural resources: The case of mining in Indonesia. *Sustainability*, 12(9), 3707.

- IPBES. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. <https://ipbes.net/global-assessment>
- IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
- IRENA. (2019). Renewable Energy: A Gender Perspective. International Renewable Energy Agency.
- Jaffe, A. B., Peterson, S. R., Portney, P. R., & Stavins, R. N. (1995). Environmental regulation and the competitiveness of US manufacturing: what does the evidence tell us?. *Journal of Economic Literature*, 33(1), 132-163.
- Kabisch, N., Frantzeskaki, N., Pauleit, S., Naumann, S., Davis, M., Artmann, M., ... Bonn, A. (2016). Nature-based solutions to climate change mitigation and adaptation in urban areas: Perspectives on indicators, knowledge gaps, barriers, and opportunities for action. *Ecology and Society*, 21(2), 39. doi:10.5751/ES-08373-210239
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3089
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2021). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perubahan Iklim. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). Statistik Energi Baru Terbarukan 2020. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2019). Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju Indonesia Unggul.
- Kharecha, P. A., & Hansen, J. E. (2013). Prevented mortality and greenhouse gas emissions from historical and projected nuclear power. *Environmental science & technology*, 47(9), 4889-4895.
- Kompas. (2019, September 10). APBI Minta Penundaan Implementasi Pembatasan Emisi Karbon. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/10/073000265/apbi-minta-penundaan-implementasi-pembatasan-emisi-karbon> Kompas.com.
- Kraft, M. E. (2021). *Environmental policy and politics*. Routledge.

- Margono, B. A., Potapov, P. V., Turubanova, S., Stolle, F., & Hansen, M. C. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012. *Nature Climate Change*, 4(8), 730-735. <https://doi.org/10.1038/nclimate2277>
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 14(1), 71-84.
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). *The Limits to Growth*. Universe Books.
- Nordhaus, W. (2013). *The climate casino: Risk, uncertainty, and economics for a warming world*. Yale University Press.
- Nordhaus, W. (2015). *The climate club: How to fix a failing global effort*. *Foreign Affairs*, 94(3), 9-16.
- Nugraha, A. (2018). Penolakan Warga Terkait Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Jawa Tengah. <https://regional.kompas.com/read/2018/04/23/14113721/penolakan-warga-terkait-pembangkit-listrik-tenaga-angin-di-jawa-tengah> Kompas.com.
- OECD. (2019). OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2019. <https://www.oecd.org/environment/oecd-companion-to-the-inventory-of-support-measures-for-fossil-fuels-2019-e670c620-en.htm>
- Pascual, U., Phelps, J., Garmendia, E., Brown, K., Corbera, E., Martin, A., ... & Muradian, R. (2014). Social equity matters in payments for ecosystem services. *BioScience*, 64(11), 1027-1036.
- PBB. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Poortinga, W., Aoyagi, M., & Pidgeon, N. F. (2013). Public perceptions of climate change and energy futures before and after the Fukushima accident: A comparison between Britain and Japan. *Energy Policy*, 62, 1204-1211.
- Purwanto, A., Asbari, M., Santoso, P. B., Paramarta, V., & Suryani, P. (2021). *Social and Management Research Quantitative Analysis for Decision Making*. Rajawali Pers.
- Rabe, B. G. (2019). *Can we price carbon?*. MIT Press.
- Saidur, R., Rahim, N. A., Islam, M. R., & Solangi, K. H. (2011). Environmental impact of wind energy. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 15(5), 2423-2430.
- Schlosberg, D. (2013). Theorising environmental justice: the expanding sphere of a discourse. *Environmental Politics*, 22(1), 37-55.

- Schlosberg, D. (2019). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.
- Stern, D. I. (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve. *World Development*, 32(8), 1419-1439.
- Stevenson, H. (2021). *Contemporary environmental politics: From margins to mainstream*. Routledge.
- Suiseeya, K. R. M. (2016). Transforming justice in REDD+ through a politics of difference approach. *Forests*, 7(12), 300.
- Suryadi, B. (2020). Gugatan Warga Terkait Pembangunan PLTS di Garut. *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/qb1m7p383/gugatan-warga-terkait-pembangunan-plts-di-garut>
- Suwarno, A. E., Asbari, M., Purwanto, A., Budi, P., Mayesti, N., Hyun, C. C., & Iwanto, D. (2022). Exploring the Links between Transformational Leadership, Organizational Culture and Green Innovation: Evidence from Indonesian Public Healthcare. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 13(1), 533-545.
- Volcovici, V. (2017). U.S. states, cities sue Trump administration over vehicle emission rules. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-usa-autos-emissions-lawsuit-idUSKBN1CW2OZ>
- Wahlström, M., Kocyba, P., De Vydt, M., & de Moor, J. (2019). Protest for a future: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 15 March, 2019 in 13 European cities.
- Wijaya, A. (2021). Renewable energy development in Indonesia: Challenges and opportunities. *Energy Policy*, 159, 112604.
- WWF. (2018). Living Planet Report 2018: Aiming Higher. World Wide Fund for Nature.

BAB IX
Penutup
Ahmad Sholikin

1. Green Politics: Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan

Dalam perjalanan buku ini, kita telah menelusuri bagaimana Green Politics (politik hijau) menjadi fenomena penting di tengah tantangan global yang dihadapi umat manusia, terutama terkait dengan masalah lingkungan, perubahan iklim, dan keberlanjutan sosial. Kita telah melihat bagaimana gerakan politik hijau yang pada awalnya dianggap marginal, sekarang telah mengubah banyak negara dan menjadi bagian integral dari diskusi kebijakan global. Kesimpulan dari buku ini bertujuan untuk merangkum ide-ide inti, tantangan yang dihadapi, serta potensi dan jalan ke depan untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan melalui pendekatan politik hijau. Politik hijau muncul sebagai respon terhadap kekhawatiran tentang degradasi lingkungan dan ketidakadilan sosial yang semakin nyata di abad ke-20. Seiring dengan semakin terlihatnya dampak aktivitas manusia terhadap planet ini—dari polusi udara, pengebangan hutan, hingga krisis perubahan iklim—muncul kesadaran akan perlunya reformasi mendasar dalam cara manusia mengelola sumber daya alam dan berinteraksi dengan lingkungan. Gerakan hijau tidak hanya lahir dari keprihatinan ekologis tetapi juga dari perasaan ketidakadilan sosial dan ekonomi, di mana kelompok-kelompok tertentu yang paling rentan sering kali terkena dampak paling parah dari kerusakan lingkungan.

Sejarah panjang ini telah menunjukkan bahwa gerakan hijau tidak terbatas pada satu wilayah atau budaya, tetapi merupakan reaksi global terhadap tantangan yang dihadapi dunia modern. Dari gerakan Chipko di India yang memeluk pohon demi melindungi hutan mereka, hingga aksi Greenpeace melawan eksploitasi industri, politik hijau telah berkembang sebagai gerakan global yang melintasi batas negara dan ideologi. Buku ini mengeksplorasi empat pilar utama yang menjadi fondasi politik hijau: keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, demokrasi partisipatif, dan non-kekerasan. Keempat prinsip ini saling terkait erat dan membentuk landasan moral dan etika yang menopang gerakan hijau di seluruh dunia. *Keberlanjutan Ekologis*: Pilar ini adalah inti dari politik hijau, yang menuntut perlindungan jangka panjang terhadap sumber daya alam kita dan cara-cara berkelanjutan dalam memanfaatkan ekosistem bumi. Ini mencakup transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan

lahan dan air secara berkelanjutan. *Keadilan Sosial*: Tidak ada keberlanjutan tanpa keadilan. Politik hijau mengakui bahwa krisis lingkungan sering kali diperparah oleh ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, solusi hijau harus mencakup distribusi yang adil dari sumber daya, akses yang setara terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan udara segar, serta pengentasan kemiskinan.

Demokrasi Partisipatif: Politik hijau menekankan perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi partisipatif mengedepankan desentralisasi kekuasaan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan mereka sendiri, sehingga suara semua lapisan masyarakat dapat didengar. *Non-Kekerasan*: Politik hijau juga menekankan resolusi damai dalam menghadapi konflik, baik itu konflik terkait sumber daya alam maupun konflik antar negara. Dengan mengutamakan dialog dan negosiasi, politik hijau menolak pendekatan destruktif dalam menangani perbedaan. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, tantangan yang dihadapi oleh gerakan hijau masih besar. Krisis perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan terus berlanjut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Laporan terbaru dari PBB menegaskan bahwa kita belum berada di jalur yang tepat untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, dan dampak dari perubahan iklim semakin dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama yang paling rentan.

Tantangan lain yang dihadapi politik hijau adalah perlawanan dari sektor-sektor yang diuntungkan dari status quo. Industri bahan bakar fosil, misalnya, terus menjadi kekuatan besar dalam ekonomi global, dan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar ini sering kali menghadapi perlawanan politik dan ekonomi yang kuat. Selain itu, politik hijau seringkali dianggap sebagai agenda kelas menengah ke atas, dan banyak kelompok yang hidup dalam kemiskinan belum merasa terlibat secara langsung dalam gerakan ini. Seperti yang dibahas dalam buku ini, salah satu kekuatan besar dari politik hijau adalah keterlibatan aktor-aktor non-negara, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas lokal, dan individu-individu. LSM telah memainkan peran penting dalam advokasi kebijakan, pendidikan publik, dan pelaksanaan proyek-proyek keberlanjutan di berbagai belahan dunia. Komunitas lokal sering kali menjadi ujung tombak dalam menerapkan praktik-praktik berkelanjutan yang relevan dengan kondisi mereka.

Sementara itu, individu-individu, baik dalam kapasitas mereka sebagai aktivis, ilmuwan, maupun konsumen yang sadar lingkungan, juga menjadi aktor penting dalam mendorong perubahan. Mereka tidak hanya memimpin gerakan, tetapi juga menuntut perubahan dari pemerintah dan sektor swasta, yang pada akhirnya memperkuat gerakan politik hijau. Buku ini juga mengkaji bagaimana politik hijau telah diintegrasikan ke dalam kebijakan publik di berbagai negara. Di Eropa, partai-partai hijau telah menjadi kekuatan politik yang signifikan, khususnya di negara-negara seperti Jerman dan Swedia, di mana kebijakan lingkungan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pemerintah. Negara-negara ini telah mengambil langkah konkret menuju transisi energi terbarukan, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pengurangan emisi karbon.

Di tingkat internasional, konferensi-konferensi besar seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) telah menjadi arena penting bagi aktor-aktor hijau untuk mempengaruhi kebijakan global. Namun, ada kekhawatiran bahwa tindakan global ini masih belum cukup kuat atau cepat untuk mengimbangi laju kerusakan lingkungan yang sedang berlangsung. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang juga dapat berpartisipasi dalam transisi hijau, tanpa terjebak dalam perangkap ekonomi fosil. Masa depan politik hijau sangat bergantung pada kemampuan masyarakat global untuk beradaptasi dengan realitas baru dari perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Buku ini menyarankan bahwa kunci untuk keberhasilan masa depan politik hijau adalah memperdalam kerja sama internasional, memperluas partisipasi masyarakat, dan mendorong inovasi teknologi yang mendukung keberlanjutan.

Gerakan hijau masa depan harus lebih inklusif, melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang secara tradisional kurang terlibat dalam proses politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya adil secara ekologis, tetapi juga adil secara sosial. Misalnya, transisi ke energi terbarukan harus dilakukan dengan cara yang menciptakan lapangan kerja baru dan melibatkan komunitas-komunitas yang terdampak oleh perubahan ini. Di samping itu, inovasi teknologi akan memainkan peran penting dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan. Perkembangan dalam teknologi energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan desain kota pintar adalah beberapa contoh bagaimana teknologi dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih hijau. Namun, teknologi ini harus

diimbangi dengan kebijakan yang memastikan bahwa manfaatnya dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya segelintir elit.

Satu hal yang jelas dari pembahasan ini adalah bahwa kita membutuhkan tindakan yang lebih ambisius untuk mengatasi krisis lingkungan global. Negara-negara dan masyarakat internasional perlu meningkatkan komitmen mereka untuk mengurangi emisi karbon, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mempercepat transisi ke ekonomi hijau. Buku ini menekankan bahwa waktu untuk bertindak adalah sekarang. Kita berada di titik kritis dalam sejarah, di mana pilihan-pilihan yang kita buat dalam beberapa dekade mendatang akan menentukan masa depan planet ini. Politik hijau menawarkan peta jalan untuk keluar dari krisis ini, tetapi ini hanya bisa tercapai jika ada kemauan politik, komitmen masyarakat, dan kerja sama internasional yang lebih kuat. Dalam penutupan ini, buku "Green Politics: Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan" menyampaikan pesan bahwa politik hijau bukanlah sekadar pilihan kebijakan alternatif, tetapi suatu keharusan untuk kelangsungan hidup umat manusia dan planet ini. Dengan menghadapi tantangan-tantangan besar yang kita hadapi—dari krisis iklim hingga ketidakadilan sosial—politik hijau menawarkan solusi yang terintegrasi dan holistik. Untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan, kita harus menggabungkan upaya lokal dan global, melibatkan semua aktor dalam masyarakat, dan mempromosikan inovasi yang mendukung keberlanjutan. Dengan komitmen bersama, dunia dapat mewujudkan visi masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

 FAKULTAS & PRODI			
FAKULTAS	PROGRAM STUDI	KEUNGULAN KOMPETITIF	KEUNGULAN KOMPARATIF
MIPA	Matematika (Terakreditasi Baik)	Ahl dalam bidang Matematika dan Ilmu Komputer	1. Statistik 2. Pemecahan Matematika 3. Ilmu Komputer
HUKUM	Ilmu Hukum (Terakreditasi B)	Ahl dalam bidang hukum	1. Hukum 2. Adik 3. Pengacara 4. Hakim
FKIP	Pendidik Bahasa & Sastra Indonesia (Terakreditasi Baik Sekali)	Ahl dalam bidang perencanaan, penelitian, pengajaran dan tes keada keterampilan	1. Pendidik 2. Jurnalis atau Wartawan 3. Penulis dan Editor 4. Penyaji/Presenter
	Pendidik Bahasa Inggris (Terakreditasi Baik Sekali)	Ahl dalam bidang pendidikan bahasa inggris, linguistik dan keasotiran	1. Tenaga pendidik bahasa inggris 2. Asisten penelitian bahasa inggris 3. Editor/penerjemah bahasa inggris 4. Peneliti kreatif
	Pendidik Matematika (Terakreditasi Baik Sekali)	Ahl dalam bidang perencanaan, analisis data, pengajaran, penelitian	1. Pendidikan Matematika 2. Peneliti 3. Calon pengajar tingkat setingkat 4. Manajer
ECONOMI	Manajemen (Terakreditasi Baik)	Ahl dalam bidang manajemen keuangan dan pemasaran	1. Manajerial UMKM 2. Konsultan manajemen
	Akuntansi (Terakreditasi Baik)	Ahl dalam bidang keuangan	1. Akuntan BAK 2. Perbankan
FAI	Pendidik Agama Islam (Terakreditasi B)	1. Pendidikan profesional 2. Peneliti pendak 3. Pengabdian kepada pendidikan	1. Ahl dalam bahasa arab dan agama keislaman 2. Pengembangan masyarakat dan lingkungan
	Pendidik Bahasa Arab (Terakreditasi Baik)	1. Pendidikan guru B. Arab 2. Peneliti pendak B. Arab 3. Penerjemah 4. Penerjemah Haji, Umroh	1. Penerjemah 2. Guru 3. Nahdliyah kitab kuning
	Pendidik Islam Asia Tenggara (Terakreditasi Baik Sekali)	1. Pendidikan 2. Peneliti anak 3. Editor/penerjemah	1. Guru RA, TK, PAUD 2. Pendidikan AID 3. Pendidikan AID 4. Pendidikan AID
	Statistik Ekonomi (Terakreditasi Baik)	Ahl dalam ekonomi Islam	1. Manajemen keuangan 2. Pengembangan kewirausahaan
	Pendidik Qur'an (Terakreditasi Baik Sekali)	1. Pendidikan 2. Peneliti pemuda	1. Ahl guru MI
PERTANIAN	Agroteknologi (Terakreditasi B)	Ahl dalam pengetahuan budidaya tanaman	1. Pengembangan teknologi dan pertanian kewirausahaan
TEKNIK	Teknik Sipil (Terakreditasi Baik)	Ahl dalam perencanaan teknik sipil	1. Ahl dalam perencanaan infrastruktur dan transportasi 2. Ahl dalam perencanaan infrastruktur kota dan kawasan 3. Ahl dalam perencanaan infrastruktur perantara
	Analitik (Terakreditasi B)	Ahl dalam perencanaan bidang analitik	1. Ahl dalam perencanaan bisnis, pemasaran, dan pemasaran 2. Ahl dalam perencanaan bisnis dan sistem bangunan
	Informatika (Terakreditasi Baik)	Ahl dalam perencanaan bidang informatika	1. Peneliti IT 2. Pengembangan Software
FISIP	Ilmu Pemerintahan (Terakreditasi Baik)	Ahl dalam perencanaan kebijakan pemerintahan	1. Ahl dalam bidang public policy dan strategy 2. LHM
	Ilmu Politik (Terakreditasi B)	Ahl dalam bidang politik	1. Ahl dalam politik nasional dan regional
PASCA SARJANA	Magister Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia (Terakreditasi B)	Kompeten dalam pendidikan bahasa	1. Peneliti pendidikan 2. Pengembangan pendidikan bahasa
	Magister Pendidikan Agama Islam (Terakreditasi Baik Sekali)	Kompeten dalam pendidikan bahasa agama Islam	1. Peneliti Pendidikan Agama Islam 2. Pengembangan Pendidikan Agama Islam

Facilities

1. Tenaga pengajar berkualitas, lulusan kampus terkemuka dalam dan luar negeri dengan jenjang doktor dan magister. Laboratorium MIPA, Bahasa, Komputer, Microteaching, Lab. Pertunjukan & Sinematografi, Teknik (Sipil/Arsitek), Green House, Akutansi, Peradilan Semu, Hotspot / WIFI 24 Jam.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Musik, Teater, Palang Merah Indonesia, Banjari, Olah Raga, Jurnalistik, Paduan Suara, Mapala, Resimen, Majalah /Buletin, dll.
3. Jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah, Mahkamah konstitusi RI, KPPU, Bakesbang Prop Jawa Timur, media massa. Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dalam dan Luar Negeri.
4. Tersedia LCD projector di setiap ruang kelas.
5. Dekat dengan beberapa pondok pesantren dan tersedia bus antar jemput dari PP. Matholiul Anwar ke kampus.
6. Suasana kampus yang asri dengan budaya multi cultural (mahasiswa dari berbagai profesi dan negara)
7. Gedung Sabudja sebagai sarana olah raga & budaya serta acara resmi dengan kapasitas 2500 orang.

BEASISWA

1. Jalur penerimaan siswa berbakat dan berprestasi (baik tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, dan nasional).
2. Beasiswa keringanan SPP bagi mahasiswa yang memiliki saudara kandung yang telah kuliah di Unisda.
3. Beasiswa Hafidz / Hafidzah 100% bebas DPP dan SPP.
4. Calon mahasiswa yang pernah menjadi ketua OSIS, IPNU IPPNU bebas biaya pendaftaran dan biaya PKKMB.
5. Tersedia ratusan beasiswa dari:
 - a. Lembaga Pendidikan Islam & Sosial Darul 'Ulum
 - b. Beasiswa K.H. Masykuri
 - c. Bantuan keringanan bagi yang kurang mampu
 - d. Bidik Misi/KIP-K
 - e. Baznas
 - f. LLDIKTI
 - g. BUMN/BUMD
 - h. Al-Khidmah
 - i. PKSDM
 - j. UKT

Lain-Lain

1. Menerima mahasiswa transfer untuk semua jurusan.
2. Unisda tidak membuka kelas jauh.
3. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan via telepon, WA, email, facebook, atau SMS center.

Berdaya Saing Kuat | Mandiri | Berbudaya | Islami | Bertaraf Internasional



جامعة الإسلام دارالعلوم
Universitas Islam Darul 'Ulum
UNISDA
University With Global Vision



UNISDA UNIVERSITY with GLOBAL VISION

[unisda.ac.id](https://www.unisda.ac.id)



LIST BIAYA
TAHUN AKADEMIK 2025-2026

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN

PERSYARATAN UMUM

Berijazah SMA/SMK/MA dan berkelakuan baik

SYARAT DAN CARA PENDAFTARAN

1. Mendaftar, Biaya Formulir Pendaftaran di Bank Jatim
2. Menyerahkan surat ijazah atau Surat Keterangan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus
3. Menyerahkan foto 3x4 terbaru ukuran 3x4
4. Menyerahkan Scan Kartu Keluarga
5. Biaya pendaftaran Rp 250.000

TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

Kantor Marketing Humas, Amnir Mahasiswa Baru dan Urusan Internasional UNISDA Lamongan
Jl. Arahgaga No. 03 Sitodadi Lamongan
Telp. (0322) 390497 / fax (0322) 390929
WA: 0855-7733-0888
FB: Universitas Islam Darul 'Ulum (UNISDA) Lamongan
Email: Email.unisda@unisda.ac.id
Web: www.unisda.ac.id
Pendaftaran dibuka setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

JALUR	TANGGAL
PSBB	06 JAN - 18 APRIL 2025
Gelombang 1	06 JAN - 03 JUN 2025
Gelombang 2	04 JUN - 20 AGOST 2025
Gelombang 3	21 AGOST - 12 SEPT 2025

Pendaftaran dibuka setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
Pusat Pendaftaran: 08.00 - 12.00 WIB
Sore 15.30 - 20.00 WIB

TOKOH & ALUMNI MENGENAI UNISDA



"Unisda diharapkan mampu mencetak generasi baru dibidang ekonomi syariah sebagai kemitrahan umat"
Prof. Dr. (H. C.) KH. Ma'Yuf Adin
(Wakil Presiden RI 2019-2024)



"Saya harapkan Unisda ke depan mampu melampaui prestasi-prestasi yang telah diarah sebelumnya."
Dr. H. Muhammad Jusuf Kalla
(Wakil Presiden RI 2014-2019)



"Saya merasa ikut memiliki Unisda, sudah beberapa tahun ini Unisda bekerja sama dengan MKRI"
Prof. Ma'Yuf Adin
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Saat Kunjungan ke Unisda th. 2012)



"Ya harus mulai membangun roadmap kita, dimana generasi muda (mahasiswa Unisda adalah tulang punggung membangun Indonesia, tulang punggung pembangunan roadmap atau ekosistem yang akan kita bangun."
Erick Tohir
(Menteri BUMN 2019-sekarang dan Ketua Umum PSSI)



"Setelah saya melihat Unisda, sudah bagus, tinggal dikembangkan untuk mempromosikan internasional."
Prof. H. Mohammad Nasir, Ph.D., M.A.
(Mentristadistik 2014-2019)



"Unisda diharapkan dapat mencetak generasi-generasi guru masa depan yang mumpuni"
Prof. Dr. Muhajir Hidayat, M.A.P
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia periode 2019-2024 Saat kunjungan tahun 2017)



"Mahasiswa Unisda bukan saja menjadi agent of change, tetapi juga agent of repair, karena habitat dari intelektual adalah wajib menawarkan gagasan atau hal hal yang dilatih tidak benar."
K.H. Umarul Huda
(Ketua DPD Republik Indonesia)



"Ya Allah, Jadikanlah UNISDA ini sebagai sarana pendidikan, berkahilah tempat ini sebagai tempat menerima ilmu bagi hamba-hamba-Mu yang berakhlak"
K.H. Ubaidillah Faqih
(Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban)



"Sebagai alimamater saya bangga, karena saat ini Unisda tetap berkembang target meningkatkan jati dirinya sebagai kampus yang menjunjung tinggi akademik yang dinamis"
Dr. Yuhannur Effendi, SH, S., MBA.
(Bupati Lamongan & Alumni Unisda)

PRESTASI

1. Sebagai Delegasi RI ke US Indonesia Higher Education Summit di Washington (Internasional)
2. Sebagai peserta Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVII di Padang, Sumatera Barat.
3. Pemecah Rekor MURI dalam kategori pembacaan puisi terlama (Nasional/Internasional)
4. Finalis PINNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) di Kendari Sulawesi.
5. Juara 2 Futsal Mahasiswa di Univ. Aduwana Surabaya
6. Juara 3 MTQ Mahasiswa Regional IV Bidang Hifdzi Qur'an di Univ. Trunojoyo Madura.
7. Juara Harapan 1 Lomba Dialog Interaktif tingkat nasional "Pekan Trilomba Kebangsaan Ke-III" Univ. Negeri Malang
8. Juara 1 Microteaching tingkat nasional di UNSA Surabaya
9. Juara III dalam kegiatan Festival Seni Pencak Silat Virtual Nasional Lintang Jagad III.
10. Program MBKM dr Kemdikbudristek yg pernah diraih mhs Unisda:
 - a. Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit (Permatasakti)
 - b. Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 (P2MM2)
 - c. Kampus Mengajar 3, 4 dan 5
 - d. Merdeka Belajar untuk Semua
 - e. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)
 - f. Bantuan Riset Talenta Riset dan Inovasi (BARISTA)
 - g. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)
11. Hibah MBKM yg didapat Unisda dari Kemdikbudristek
 - a. PKKM (Program Kompetisi Kampus Merdeka) tahun 2021, 2022, 2023
 - b. KMMI (Kredensial Mikro Mhs. Indonesia)
 - c. Ditasering th 2021 & 2022
 - d. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
 - e. Program Studi Menerapkan Kerjasama MBKM

Rektor
ttd
M. Hafidh Nushrullah, S.E., M.M.

DAFTAR KULIAH? UNISDA WAE!



الجامعة الإسلامية دارالعلوم
Universitas Islam Darul Ulum
UNISDA - LAMONGAN

Jl. Airlangga 03 Sukodadi
Lamongan – Jawa Timur – 62254
<https://unisda.ac.id>

Fenomena perubahan iklim, polusi, kerusakan hutan, hingga krisis energi, menuntut adanya kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari semua pihak. Dalam konteks ini, konsep green politic atau politik hijau menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Politik hijau bukan hanya tentang kebijakan lingkungan, melainkan juga tentang bagaimana kita membangun sistem politik dan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan seimbang.

Buku ini berupaya mengupas pemikiran-pemikiran terkait politik hijau, serta memberikan perspektif tentang bagaimana kebijakan berkelanjutan dapat diintegrasikan dalam berbagai sektor kehidupan. Kami berharap, buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pembaca, khususnya para pembuat kebijakan, akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat umum, untuk lebih memahami pentingnya langkah-langkah strategis menuju masa depan yang berkelanjutan.

